

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Tahun 2025



DINAS PERHUBUNGAN
KAB. BANJAR



KATA PENGANTAR

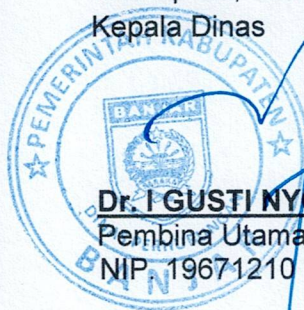
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan dokumen pertanggungjawaban dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya mengacu pada tugas pokok yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar.

Sebagai salah satu unsur dari fungsi pelayanan umum dengan tugas pokok pada bidang transportasi, serta sebagai unsur staf Bupati Banjar yang professional, responsif dan akuntabel, Dinas Perhubungan telah menjalankan serangkaian program dan kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Dinas Perhubungan sendiri untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya Laporan ini juga menjadi masukan penilaian bagi Bupati Kabupaten Banjar. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja.

Terima kasih.

Martapura, 26 Februari 2026

Kepala Dinas



Dr. I GUSTI NYOMAN YUDIANA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19671210 199010 1 001





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Maksud dan Tujuan Laporan	1
A.1 Maksud Laporan	1
A.2 Tujuan Laporan	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	1
B.1 Tugas Pokok	1
B.2 Fungsi	1
B.3 Dasar Hukum	12
B.4 Struktur Organisasi	13
B.5 Kepegawaian	15
C. Isu Strategis	18
D. Sistematika Penyajian	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. Tujuan Strategis Dinas Perhubungan	21
B. Sasaran Strategis Dinas Perhubungan	22
C. Perjanjian Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	52
A. Capaian Kinerja Organisasi	52
A.1 Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2025	53
A.2 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025	54
A.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Tahun Sebelumnya	68
A.4 Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Target Kinerja Sasaran Akhir Periode Renstra	76
A.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Provinsi Dan Nasional	80
A.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	86



A.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	111
A.8 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja	114
A.9 Tindak Lanjut Atas Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2025	129
B. Realisasi Anggaran	134
BAB IV PENUTUP	148
A. Kesimpulan	148
B. Saran – Saran	148
LAMPIRAN	150





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan	15
Tabel 1.2	Isu Strategis Dinas Perhubungan	18
Tabel 2.1	Tujuan Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025	21
Tabel 2.2	Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025.....	22
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	24
Tabel 3.1	Skala Nilai Perangkat Kinerja	53
Tabel 3.2	Target Dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2025	53
Tabel 3.3	Realisasi Kinerja Tahun 2025	54
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi / Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya	69
Tabel 3.5	Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Target Akhir Renstra	76
Tabel 3.6	Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Provinsi & Nasional..	80
Tabel 3.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	111
Tabel 3.8	Realisasi Jenis Belanja	135
Tabel 3.9	Realisasi anggaran berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	135
Tabel 3.10	Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja ...	139





RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar.

Analisa dan bukti - bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra Dinas Perhubungan Kab Banjar yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan.

Analisa terhadap sasaran strategis Dinas Perhubungan Kab. Banjar tahun 2025 menunjukan bahwa capaian pada 1 (satu) asaran strategis dengan 2 (dua) indikator sasaran masuk pada kategori berhasil.

Sasaran strategis yang hendak dicapai adalah :

1. Terwujudnya kinerja perhubungan berkualitas, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Rasio Konektivitas Kabupaten
 - b. Tingkat Keselamatan transportasi Daerah Kabupaten/Kota





Sasaran kinerja Dinas Perhubungan tersebut dijabarkan dalam 2 (dua) program wajib, 20 (dua puluh) kegiatan dan 56 (lima puluh enam) sub kegiatan. Hasil evaluasi dan analisis kinerja sasaran menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Terwujudnya kinerja perhubungan berkualitas dengan indikator Rasio Konektivitas Kabupaten adalah 92,98%.
2. Terwujudnya kinerja perhubungan berkualitas dengan indikator Tingkat Keselamatan transportasi Daerah Kabupaten/Kota adalah 99.96%.

Total anggaran yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 24.264.619.959,00 dengan realisasi sebesar Rp. 20.364.982.339,00 (83.93%). Anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 10.871.982.301,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.693.298.676,00 (89.16%) sedangkan anggaran untuk Program urusan perhubungan yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebesar Rp. 11.449.442.558,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.738.533.030,00 (76.32%) dan Program Pengelolaan Pelayaran sebesar Rp. 1.943.195.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.933.150.633,00 (99,48%).

Tantangan keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia perencana yang handal dan visioner. Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Kedepan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banjar, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Kabupaten Banjar. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat.

Meskipun hasil evaluasi dan analisis kinerja termasuk dalam kategori berhasil tetapi dalam pelaksanaannya masih menemui beberapa kendala/permasalahan. Namun demikian dengan segala kemampuan yang dimiliki dinas baik itu sumber daya manusia, sumber daya peralatan maupun sumber daya





modal/keuangan, semua program/kegiatan yang telah ditetapkan di tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Martapura, 26 Februari 2026

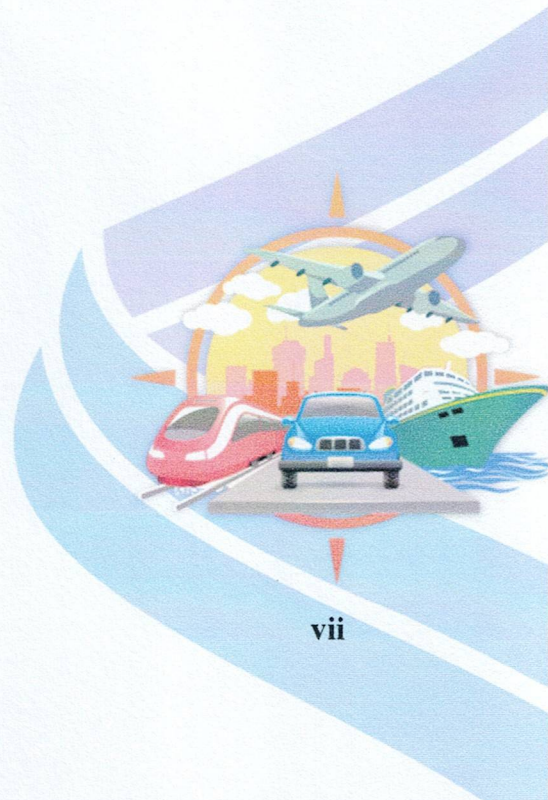
Kepala Dinas



Dr. I GUSTI NYOMAN YUDIANA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19671210 199010 1 001





BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

A.1 Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan.
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Dinas Perhubungan.
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan.
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

A.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan kepada Bupati.
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan.
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas Perhubungan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

B.1 TUGAS POKOK:

Dinas Perhubungan (Dishub) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

B.2 FUNGSI:

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian;





- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
- e. pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan Dishub; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Dinas Perhubungan Sebagai Berikut:

- a. merumuskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas;
- b. merumuskan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perhubungan darat;
- c. menyelenggarakan kegiatan bidang sarana dan prasarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perhubungan darat;
- d. mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas serta pelaksanaan operasional kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Dinas;
- e. mengawasi dan mengendalikan bidang sarana dan prasarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perhubungan darat;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang sarana dan prasarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perhubungan darat;
- g. menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi kepada Bupati dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah pusat dan daerah di bidang sarana dan prasarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perhubungan darat;
- h. menyelenggarakan standar pelayanan minimal di bidang perhubungan;
- i. membina administrasi, organisasi, tata laksana dan personil di lingkungan Dinas;
- j. merumuskan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang perhubungan serta tugas-tugas pembantuan lainnya;
- k. membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- l. melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai peraturan yang berlaku

Uraian Tugas bidang dan seksi serta fungsional di Dinas Perhubungan:





Sekretariat mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- b) memonitor pengelolaan anggaran dan aset di lingkungan Dinas sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan;
- c) menyelenggarakan urusan surat menyurat sesuai Tata Naskah Dinas, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d) menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
- e) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas dan instansi terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran tugas Dinas;
- f) mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan Dinas dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Dinas; dan
- g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a) merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran sub bagian umum dan kepegawaian;
- b) melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- c) melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d) melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;
- e) menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor dan rumah tangga di lingkungan Dinas;
- f) melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Dinas;
- g) melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h) mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional;
- i) menghimpun bahan penyusunan dokumen uraian tugas, Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisis Jabatan dan Beban Kerja Dinas serta Daftar Kebutuhan Pegawai di lingkungan Dinas;
- j) menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan pensiun



pegawai serta pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai;

- k) membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK), penjaminan kenaikan pangkat pegawai, penjaminan kenaikan gaji berkala, penjaminan cuti, absensi pegawai;
- l) melaksanakan proses administrasi pemberian izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Dinas;
- m) menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai, peningkatan kualitas SDM dan mengusulkan ujian dinas pegawai; dan
- n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- a) merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
- b) menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas;
- c) melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan dinas beserta dokumen penunjangnya;
- d) melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- e) Menyusun rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Dinas;
- f) menyusun Profil Dinas berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Dinas;
- g) menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- h) Menyusun laporan program dan kegiatan Dinas secara berkala berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Dinas;
- i) menghimpun bahan penyusunan laporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Perhubungan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas dan PMPRB serta laporan lainnya berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Dinas; dan
- j) menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, aset dan akuntansi keuangan Dinas;





- k) menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
- l) menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- m) menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
- n) menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- o) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan aset; dan
- p) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai tugas:

- a) menyusun rencana kerja, program dan anggaran.
- b) menyusun bahan perumusan kebijakan teknis.
- c) mengkoordinasikan kegiatan
- d) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait.
- e) menyelenggarakan urusan teknis
- f) menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dan
- g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Seksi Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan mempunyai tugas :

- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan
- b) Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran.
- c) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.
- d) menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan.
- e) melaksanakan konsultasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang teknologi kendaraan dan perbengkelan;
- f) melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan darat di wilayah kabupaten.
- g) menetapkan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk angkutan perkotaan dan atau perdesaan dan pelabuhan Pengumpulan Lokal;

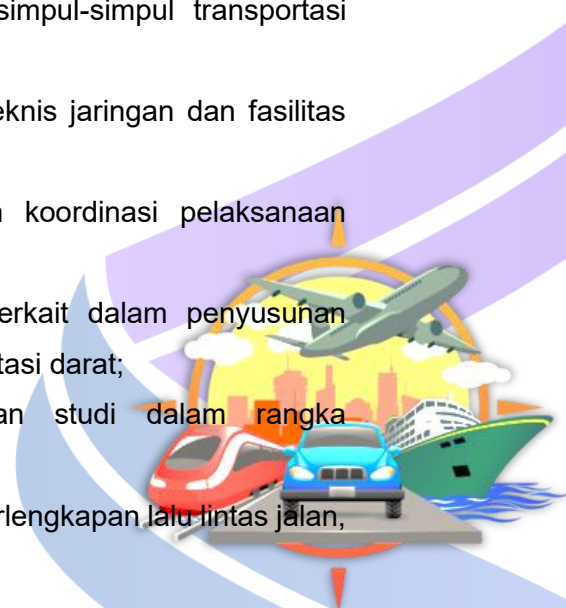




- h) menyiapkan bahan rekomendasi, pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP);
- i) Melaksanakan pekerjaan pembersihan alur di wilayah perairan dan atau wilayah pelabuhan pengumpan lokal;
- j) membuat rekomendasi terhadap karoseri sarana kendaraan bermotor yang akan diuji ulang untuk pertama kali;
- k) melaksanakan administrasi dan membuat rekomendasi tentang status sarana kendaraan bermotor umum atau tidak umum, perubahan presentasi (nilai) perubahan bentuk dan perubahan kendaraan bermotor;
- l) menyediakan angkutan umum perintis untuk jasa angkutan orang dan angkutan barang dalam daerah Kabupaten;
- m) melaksanakan inventarisasi, evaluasi dan pendaftaran jumlah prasarana perbengkelan umum dan bengkel Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) swasta;
- n) Pembuatan surat keterangan kaca berwarna (film coating);
- o) menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
- p) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Seksi Jaringan dan Fasilitas Perhubungan Darat mempunyai tugas :

- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan jaringan dan fasilitas perhubungan darat, rencana umum dan rencana teknis integral atau pemaduan antar moda transportasi dan simpul-simpul transportasi darat;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis jaringan dan fasilitas perhubungan darat;
- c) menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jaringan dan fasilitas perhubungan darat;
- d) melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) transportasi darat;
- e) melaksanakan pengkajian, penelitian dan studi dalam rangka perkembangan transportasi darat;
- f) melaksanakan survey/pendataan fasilitas perlengkapan lalu lintas jalan, perhubungan darat di wilayah kabupaten;





- g) melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan Perhubungan darat rambu- rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas jalan, marka jalan, zebra cross, pita getar (rumble street), PJU serta tanda-tanda pada jalan di wilayah Kabupaten;
- h) membuat usul pengadaan, penempatan dan media dan alat pembantu pengamanan lalu lintas jalan (area traffic control system/ATCS) di wilayah kabupaten;
- i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kerja, program dan anggaran;
- b) menyusun bahan perumusan kebijakan teknis;
- c) mengkoordinasikan kegiatan;
- d) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/ bidang terkait dalam kegiatan;
- e) menyelenggarakan urusan teknis;
- f) menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dan
- g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan

Seksi Manajemen, Analisis Dampak Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan manajemen, analisis dampak lalu lintas dan rekayasa lalu lintas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis manajemen, analisis dampak lalu lintas dan rekayasa lalu lintas;
- c. Menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam rangka manajemen, analisis dampak lalu lintas dan rekayasa lalu lintas;
- d. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan data terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Transportasi Darat untuk pengembangan sistem transportasi di wilayah Kabupaten;
- e. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, sungai dan danau di wilayah kabupaten serta pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas.





- f. Melaksanakan pengkajian dan penerapan manajemen rekayasa lalu lintas terhadap daerah Rawan Kecelakaan (DRK) lalu lintas di wilayah Kabupaten;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- h. Melaksanakan pengoperasian serta pemeliharaan media dan alat bantu pengamanan lalu lintas jalan (Area Traffic Control Sytem/ ATCS);
- i. Menyiapkan bahan rekomendasi batas kecepatan maksimal, larangan pengguna jalan, dan dispensasi bagi jalan tertentu serta penetapan kawasan tertib lalu lintas yang berada pada wilayah Kabupaten;
- j. Melaksanakan kegiatan penyusunan data kinerja lalu lintas jalan serta sungai dan danau (pendataan Lalu Lintas Harian Rata-Rata);
- k. Menyusun rekomendasi manajemen, analisa dampak lalu lintas dan rekayasa lalu lintas terhadap rencana pembangunan dan pengembangan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- l. Melaksanakan manajemen dan pengawasan terhadap parkir di bahu jalan;
- m. Mengatur tentang kewajiban, memberikan bantuan kepada perkumpulan atau badan hukum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas serta perlengkapan jalan lainnya;
- n. Menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan manajemen, analisis dampak lalu lintas dan rekayasa lalu lintas;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Seksi Keselamatan,Operasional Dan Pengendalian Lalu Lintas mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, perumusan kebijakan teknis serta pembinaan keselamatan lalu lintas di jalan dan perairan sungai dan danau;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, perumusan kebijakan teknis serta pembinaan operasional dan pengendalian lalu lintas jalan dan perairan sungai dan danau;





- c) Melaksanakan pengawasan dan penyidikan penyelenggaraan Perda bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai dan danau serta pelanggaran pemeriksaan teknis dan laik jalan serta perizinan angkutan umum di terminal, jalan dan pelabuhan sungai dan danau;
- d) melaksanakan inventarisasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas, pengumpulan data kecelakaan lalu lintas di kabupaten banjar dan usulan rekomendasi penanggulangan;
- e) Melaksanakan kegiatan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas tingkat Kabupaten Banjar;
- f) Melaksanakan kegiatan pembinaan/ penyuluhan keselamatan lalu lintas bagi masyarakat, pelajar, pengemudi kendaraan bermotor serta pengemudi kapal;
- g) melaksanakan pengamanan dan penertiban jalur lalu lintas untuk acara-acara tertentu;
- h) melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional penggunaan jalan, sungai dan danau untuk kepentingan lalu lintas;
- i) Melaksanakan patroli secara sendiri dan/ atau terpadu dengan instansi terkait pada jaringan jalan Kabupaten serta pengawalan bagi pejabat, tamu dan rombongan atau iring-iringan yang memerlukan pengawalan;
- j) menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keselamatan, operasional dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai dan danau;
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Bidang Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kerja, program dan anggaran;
- b) menyusun bahan perumusan kebijakan teknis ;
- c) mengkoordinasikan kegiatan;
- d) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam kegiatan ;
- e) menyelenggarakan teknis urusan ;
- f) menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
- g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Seksi Angkutan Jalan mempunyai tugas :





- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan bidang angkutan jalan;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait angkutan jalan;
- c) menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang angkutan jalan;
- d) menyiapkan bahan rencana kebutuhan jaringan angkutan umum, angkutan pelajar, serta rencana kebutuhan angkutan di wilayah operasional kabupaten;
- e) menyiapkan bahan penetapan wilayah operasi angkutan jalan, tarif ekonomi untuk penumpang angkutan jalan dan jaringan trayek pedesaan yang ada di wilayah kabupaten;
- f) menyiapkan bahan rekomendasi angkutan orang dan barang di jalan dalam satu wilayah kabupaten;
- g) melaksanakan sosialisasi trayek baru, pembinaan sopir, angkutan pedesaan, dan trayek insidentil angkutan;
- h) menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan angkutan jalan;
- i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Seksi Angkutan Sungai dan Danau mempunyai tugas :

- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan bidang angkutan sungai dan danau;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang angkutan sungai dan danau;
- c) menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan angkutan sungai dan danau;
- d) menyiapkan penyusunan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah Kabupaten;
- e) menyiapkan bahan rekomendasi angkutan sungai dan danau dalam satu wilayah kabupaten;
- f) menyiapkan bahan penetapan tarif ekonomi untuk penumpang angkutan sungai dan danau di wilayah Kabupaten;
- g) pelaksanaan dan pengembangan lokasi pelabuhan angkutan sungai dan danau dalam Kabupaten;
- h) sosialisasi angkutan sungai dan danau (seperti: sosialisasi tarif angkutan sungai dan danau, sosialisasi perizinan angkutan sungai dan danau);





- i) menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan angkutan sungai dan danau;
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana program kerja dan anggaran dalam pelaksanaan teknis kegiatan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b) menyelenggarakan sebagian urusan dinas di bidang teknis operasional yang terkait dengan penilaian teknis dan laik jalan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- c) menyelenggarakan pengelolaan penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan lingkup UPTD;
- d) menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan
- e) kegiatan yang berhubungan dengan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- f) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran dalam pelaksanaan teknis kegiatan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b) melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan lingkup UPTD.
- c) melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- d) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

UPTD Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan mempunyai tugas:

- a) menyusun rencana program kerja dan anggaran dalam pelaksanaan teknis kegiatan UPTD Terminal dan Parkir;





- b) menyelenggarakan sebagian urusan dinas di bidang teknis operasional yang terkait dengan UPTD Terminal dan Parkir;
- c) memberikan izin pengelolaan parkir;
- d) melaksanakan penagihan/pemungutan retribusi daerah di lingkungan wilayah kerjanya;
- e) menyelenggarakan pengelolaan penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan lingkup UPTD;
- f) menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan UPTD Terminal dan Parkir; dan
- g) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Terminal dan Parkir mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran dalam pelaksanaan teknis kegiatan Terminal dan Parkir;
- b) melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan lingkup UPTD;
- c) melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Terminal dan Parkir; dan
- d) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B.3 DASAR HUKUM:

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan di bidang perhubungan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;





2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 187);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2025 tentang Perubahan APBD tahun Anggaran 2025
7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Banjar Nomor 28 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Dinas Perhubungan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025–2045.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029.
11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
12. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Nomor HB.00/76/DISHUB/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (Iku) Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar.

B.4 STRUKTUR ORGANISASI:

Keberadaan Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas





dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, maka kalau dilihat dari struktur organisasinya termasuk ke dalam organisasi lini, staf dan fungsional.

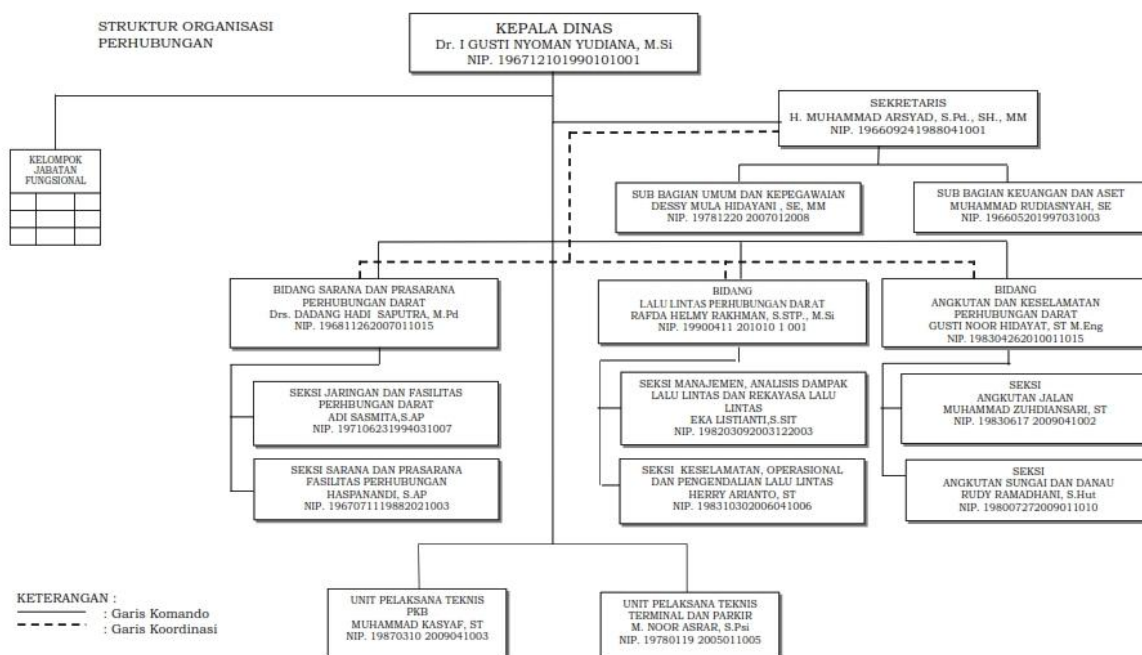
Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
3. Bidang Sarana dan Prasana Perhubungan Darat terdiri dari:
 - a. Seksi Jaringan dan Fasilitas Perhubungan Darat; dan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan.
4. Bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat, terdiri dari :
 - a. Seksi Manajemen, Analisis Dampak Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - b. Seksi Keselamatan, Operasional dan Pengendalian Lalu Lintas.
5. Bidang Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat, terdiri dari :
 - a. Seksi Angkutan Jalan; dan
 - b. Seksi Angkutan Sungai dan Danau.
6. UPTD.





7. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

B.5 Kepegawaian:

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam mendukung tercapainya target kinerja. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Profil Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan selengkapnya bisa dilihat dibawah ini:

Tabel I.1 Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan

NO	JABATAN	ESELON				GOLONGAN				TINGKAT PENDIDIKAN						JML
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	
1	Kepala Dinas		1			1				1						1
2	Sekretaris			1		1					1					1



NO	JABATAN	ESELON				GOLONGAN				TINGKAT PENDIDIKAN						JML
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	
3	Kepala Bidang Angkutan Keselamatan Perhubungan Darat			1			1				1					1
4	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat			1			1				1					1
5	Kepala Bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat			1			1				1					1
6	Kepala Unit Pelaksana Teknis Penguji Kendaraan Bermotor				1		1					1				1
7	Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal & Parkir				1		1					1				1
8	Kasubbag Keuangan Perencanaan dan Aset				1		1					1				1
9	Kasubbag Umum dan Kepegawaian				1		1				1					1



NO	JABATAN	ESELON				GOLONGAN				TINGKAT PENDIDIKAN						JML
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	
10	Kasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan				1		1					1				1
11	Kasi Jaringan dan Fasilitas Perhubungan Darat				1		1					1				1
12	Kasi Angkutan Sungai dan Danau				1		1					1				1
13	Kasi Angkutan Jalan				1		1					1				1
14	Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				1		1					1				1
15	Kasi Keselamatan Operasional dan Pengendalian Lalu Lintas				1		1					1				1
16	Kepala Tata Usaha Terminal dan Parkir				1		1					1				1
17	Kepala Tata Usaha Pengujian Kendaraan Bermotor				1		1						1			1
18	Pelaksana						6	8				4	5	4	1	14



NO	JABATAN	ESELON				GOLONGAN				TINGKAT PENDIDIKAN						JML
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	
19	Fungsional							1					1			1
20	PPPK						7	6	6			7	1	5	6	19
20	Tenaga Kontrak											29	3	41		73
	Jumlah		1	4	11	2	28	15	6	1	5	21	8	9	7	51

C. ISU STRATEGIS

Dinas Perhubungan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Dinas Perhubungan sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perhubungan, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan urusan pemerintah bidang perhubungan.

Oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perhubungan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel I.2 Isu Strategis Dinas Perhubungan

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)



Persentase konektivitas Kabupaten Banjar menunjukkan kenaikan	- belum optimalnya aksesibilitas distribusi orang dan barang - Tingkat keselamatan lalu lintas yang belum optimal - Pengendalian regulasi transportasi yang belum maksimal	Meningkatkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban transportasi	Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan merata	Rendahnya tingkat keselamatan moda transportasi	Pembangunan infrastruktur dasar dan perekonomian, serta konektivitas yang masih terbatas	Belum Optimalnya sistem transportasi yang aman, tertib, lancar, dan terintegrasi
---	--	---	--	---	--	--

Identifikasi isu-isu yang diperoleh dari proses sebelumnya tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada Permendagri 86 Tahun 2017, kesepakatan melalui FGD atau penilaian ahli atau kombinasi sehingga akan diperoleh isu strategis yang akan diselesaikan. Isu strategis pada dokumen perencanaan yang kemudian dimunculkan pada dokumen pelaporan kinerja.





D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar;

Daftar Isi;

Ringkasan Eksekutif;

Pada Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LKjIP, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), Permasalahan serta isu strategis organisasi;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian/Penetapan Kinerja

Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2025 dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 beserta analisisnya

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan Saran





BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan Strategis Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan kualitas layanan perhubungan guna mendukung terciptanya sistem transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan terintegrasi. Upaya ini diwujudkan melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur transportasi yang andal, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan ini adalah Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) sektor perhubungan, yang mencerminkan tingkat ketersediaan, kondisi, dan kinerja infrastruktur transportasi secara menyeluruh.

Tujuan jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Tujuan Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target tahun 2025
Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) (sektor perhubungan)	60

Peningkatan kualitas layanan perhubungan merupakan tujuan strategis Dinas Perhubungan dalam rangka mendukung terwujudnya sistem transportasi yang aman, nyaman, terintegrasi, dan berkelanjutan. Layanan perhubungan yang berkualitas tidak hanya berdampak pada kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Untuk mengukur pencapaian tujuan ini, digunakan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) pada sektor perhubungan sebagai indikator utama. IKLI memberikan gambaran menyeluruh mengenai ketersediaan,



kondisi, dan kinerja infrastruktur transportasi, termasuk jalan, terminal, pelabuhan, dan fasilitas pendukung lainnya. Semakin tinggi nilai IKLI, maka semakin baik pula kualitas layanan infrastruktur yang disediakan, yang mencerminkan keberhasilan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan sektor perhubungan.

B. Sasaran Strategis Dinas Perhubungan

Untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Dinas Perhubungan, ditetapkan dua sasaran utama. Sasaran pertama yaitu terwujudnya kinerja perhubungan berkualitas, yang diukur melalui dua indikator yaitu Rasio Konektivitas Kabupaten dan Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota. Sasaran ini fokus pada peningkatan keterhubungan wilayah serta keselamatan dalam berlalu lintas. Sasaran kedua Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, yang diukur melalui Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Sasaran ini menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan program dan kegiatan perhubungan.

Sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target tahun 2025
1	Terwujudnya kinerja perhubungan berkualitas	Rasio Konektivitas Kabupaten	0.51
		Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota	99,48
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,6

Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa sektor perhubungan mampu memberikan layanan yang optimal, responsif, dan sesuai dengan



kebutuhan masyarakat serta perkembangan wilayah. Kinerja perhubungan yang berkualitas tidak hanya diukur dari kelengkapan sarana dan prasarana, tetapi juga dari efektivitas sistem transportasi dalam menjamin konektivitas dan keselamatan.

Terdapat dua indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini:

1. Rasio Konektivitas Kabupaten, yang menggambarkan tingkat keterhubungan antarwilayah dalam satu kabupaten. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik pula aksesibilitas antarwilayah yang memungkinkan pergerakan orang dan barang secara efisien.
2. Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota, yang mencerminkan kemampuan sistem transportasi dalam meminimalkan risiko kecelakaan dan memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan dan moda transportasi lainnya.

Melalui pencapaian sasaran ini, diharapkan Dinas Perhubungan dapat mewujudkan sistem transportasi daerah yang lebih inklusif, aman, dan terintegrasi, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

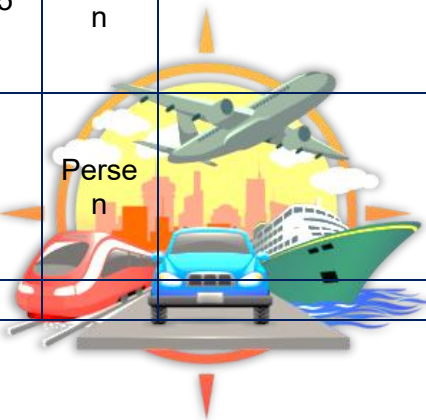
C. Perjanjian Kinerja

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2025 mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2025-2029. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2025 meliputi 2 (dua) sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (pohon kinerja) mulai dari eselon II, eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut:



Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Formulasi perhitungan	Targe t	Satua n	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penangg ung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya kinerja perhubungan berkualitas	Rasio Konektivitas Kabupaten	((IK1 x persentase bobot angkutan jalan) + (IK2 x persentase bobot angkutan sungai))	0,57	Rasio			KEPALA DINAS
		Tingkat Keselamatan transportasi Daerah Kabupaten/Kota	((IK1 x persentase bobot angkutan jalan) + (IK2 x persentase bobot angkutan sungai))	99,5	Perse n			
2	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	((IK1 x persentase bobot angkutan jalan) + (IK2 x persentase bobot angkutan sungai))	79	Perse n			



NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Formulasi perhitungan	Targe t	Satua n	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penangg ung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	Nilai IKKI dari hasil Penjaminan Kualitas (tim inspektorat)	90,25	indeks	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp57.239.700	Sekretari s
						Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Rp6.242.037.800	
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp7.997.000	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp137.622.300	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp349.875.800	

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Formulasi perhitungan	Targe t	Satua n	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penangg ung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp1.533.655.000	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.796.944.701	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp746.610.000	

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Formulasi perhitungan	Targe t	Satua n	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penangg ung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Meningkatnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas dan tepat waktu	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persentase terpenuhinyaa dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	Perse n	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp8.000.000	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp11.430.000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp8.049.700	

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Formulasi perhitungan	Targe t	Satua n	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penangg ung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp8.760.000	
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Rp10.500.000	
						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Rp10.500.000	
5	Terselenggaranya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Pelayanan administrasi keuangan sesuai standar	Persentase Terpenuhinya Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100	Perse n	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp6.030.700.000	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp202.470.000	

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Formulasi perhitungan	Targe t	Satua n	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penangg ung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp8.867.800	
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	Persentase tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah	100	Perse n	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp7.997.000	
7	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Perse n	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp77.622.300	Kasubag Umum dan Perencan aan

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Formulasi perhitungan	Targe t	Satua n	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penangg ung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp60.000.000	
8	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Perse n	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp11.810.000	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp89.603.000	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp24.602.000	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp13.638.800	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp11.050.000	

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Formulasi perhitungan	Targe t	Satua n	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penangg ung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp199.172.000	
9	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	Jumlah Pengadaan BMD dibagi jumlah Kebutuhan dikali 100%	100	Perse n	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp1.296.834.000	
						Pengadaan Mebel	Rp66.903.000	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp169.918.000	

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Formulasi perhitungan	Targe t	Satua n	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penangg ung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Perse n	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp79.949.701	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.716.995.000	
11	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Perse n	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp42.750.000	

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Formulasi perhitungan	Targe t	Satua n	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penangg ung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp615.910.000	
						Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp42.870.000	
						Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp45.080.000	

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Formulasi perhitungan	Targe t	Satua n	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penangg ung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Meningkatnya kualitas Terminal & Halte Sesuai Standar	Persentase terminal & halte yang sesuai standar	(Bobot keterpenuhan terminal (fasilitas utama dan pendukung) x realisasi keterpenuhan terminal) + (Bobot ketersediaan Prasarana Jalan x realisasi ketersediaan Prasarana Jalan)	56,34	perse n	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp445.733.500	Kepala Bidang Sarana dan Prasaran a

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Formulasi perhitungan	Targe t	Satua n	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penangg ung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan danau	Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Bobot keterpenuhan dermaga dikali realisasi keterpenuhan dermaga) + (Bobot ketersediaan kapal yang sesuai standar dikali realisasi ketersediaan kapal yang sesuai standar	51,67	perse n	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp1.389.112.900	
14	Terpenuhinya Prasarana jalan yang sesuai standar	Persentase Prasarana jalan yang sesuai standar	Jumlah Prasarana Jalan yang tersedia dibagi kebutuhan Prasarana Jalan	47	Pesen	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp399.116.000	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Fasilitas
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rp46.617.500	

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Formulasi perhitungan	Targe t	Satua n	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penangg ung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Meningkatnya kualitas Dermaga Sungai dan Danau	Persentase Dermaga yang sesuai standar	Jumlah Dermaga/Shelter *bobot 25% + Kondisi Dermaga * bobot 25% + Perencanaan * bobot 25% + Pengawasan * bobot 25%	45	Perse n	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp893.343.000	Perhubu ngan
						Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Rp200.000.000	
16	Terpenuhinya Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia dibagi kebutuhan perlengkapan jalan	60	perse n	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp1.085.794.726	Kepala Seksi Jaringan dan

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Formulasi perhitungan	Targe t	Satua n	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penangg ung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp137.543.900	Fasilitas Perhubu ngan Darat
17	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	Jumlah Kendaraan Yang lewat pada ruas jalan dibagi kapasitas jalan sesuai perhitungan MKJI	0,37	Indeks	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp3.382.407.000	Kepala Bidang Lalu Lintas Perhubu ngan Darat
						Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp8.607.000	
						Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp14.340.000	

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Formulasi perhitungan	Targe t	Satua n	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penangg ung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Meningkatnya penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada pusat kegiatan dan ruas jalan/persimpangan	Persentase penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dapat diterapkan dibagi kebutuhan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dikali 100%	100	Perse n	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp180.610.000	Kepala Seksi Manajem en, Analisis Dampak Lalu Lintas dan Rekayas a Lalu Lintas
						Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp19.240.000	
						Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rp1.760.255.190	

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Formulasi perhitungan	Targe t	Satua n	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penangg ung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp206.092.000	
19	Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan andalalin	Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin	Objek wajib andalalin yang memiliki rekomendasi dibagi potensi objek wajib andalalin dikali 100%	72,5	Perse n	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Rp3.305.000	
						Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Rp5.302.000	

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Formulasi perhitungan	Targe t	Satua n	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penangg ung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Meningkatnya penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada pusat kegiatan dan ruas jalan/persimpangan	Persentase penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dapat diterapkan dibagi kebutuhan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dikali 100%	100	Perse n	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp1.216.209.810	Kepala Seksi Keselam atan Operasio nal Pengend alian
21	Meningkatnya Ketaatan dan keselamatan Berlalu Lintas	Persentase Ketaatan Pengguna Jalan	Kondisi yang diharapkan (100%) dikurangi persentase jumlah pelanggaran	85,5	Perse n	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Rp14.340.000	

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Formulasi perhitungan	Targe t	Satua n	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penangg ung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Meningkatnya Trayek Angkutan Umum	Persentase Izin Trayek Angkutan Umum Yang Aktif	Jumlah Trayek yang Aktif dibagi Jumlah Trayek yang Ditetapkan kali 100%	16,67	Perse n	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp4.344.199.860	Kepala Bidang Angkuta n Keselam atan Perhubu ngan Darat
						Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp95.000.000	

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Formulasi perhitungan	Targe t	Satua n	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penangg ung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Bobot keterpenuhan dermaga dikali realisasi keterpenuhan dermaga) + (Bobot ketersediaan kapal yang sesuai standar dikali realisasi ketersediaan kapal yang sesuai standar	46,89	Perse n	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Rp364.082.200	
						Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp190.000.000	

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Formulasi perhitungan	Targe t	Satua n	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penangg ung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp1.389.112.900	
24	Meningkatnya kualitas Dermaga Sungai dan Danau	Persentase Dermaga yang sesuai standar	Jumlah Dermaga/Shelter *bobot 25% + Kondisi Dermaga * bobot 25% + Perencanaan * bobot 25% + Pengawasan * bobot 25%	45	Perse n	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp295.769.900	Kepala Seksi Angkuta n Sungai dan Danau

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Formulasi perhitungan	Targe t	Satua n	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penangg ung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Meningkatnya layanan perizinan angkutan sungai dan danau	Persentase meningkatnya layanan perizinan angkutan sungai dan danau	Jumlah angkutan Sungai dan Danau yang berizin dibagi jumlah seluruh Angkutan Sungai dan Danau yang Beroperasi	9	Perse n	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp31.370.200	

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Formulasi perhitungan	Targe t	Satua n	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penangg ung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp332.712.000	
26	Tersedianya Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Sungai dan Danau	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen yang Direalisasikan dibagi dengan dokumen yang direncanakan kali 100%	100	Perse n	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp190.000.000	

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Formulasi perhitungan	Targe t	Satua n	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penangg ung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan Barang	Persentase angkutan umum dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Jumlah trayek angkutan umum dengan kinerja tingkat pelayanan yang baik dibagi jumlah trayek angkutan umum yang ada dikali 100%	70	Perse n	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp315.383.400	Kepala Seksi Angkuta n Jalan
						Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp4.028.816.460	

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Formulasi perhitungan	Targe t	Satua n	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penangg ung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Tersedianya Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Orang dan Barang	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan	Jumlah Dokumen yang Direalisasikan dibagi dengan dokumen yang direncanakan kali 100%	100	Perse n	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp95.000.000	
29	Meningkatnya Kelaikan Transportasi Perhubungan	Persentase Transportasi Perhubungan yang Laik Jalan	(Jumlah Hasil Pemeriksaan Kendaraan yang lulus uji / Target Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar Tahun N) X 100%	79	Perse n	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp1.500.312.322	Kepala UPT PKB

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Formulasi perhitungan	Targe t	Satua n	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penangg ung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Meningkatnya Kelaikan Uji Laik Jalan	Persentase Pemeriksaan Uji Laik Jalan yang lulus uji	(Jumlah Kendaraan yang lulus uji / Jumlah Kendaraan yang diuji) x 100%	100	Perse n	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rp359.910.882	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT PKB
						Penyediaan Bukti lulus Uji Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Rp112.500.000	
31	Meningkatnya Kualitas Sarana dan prasarana Penguji Kendaraan Bermotor	Persentase kualitas Sarana Prasarana dalam kondisi baik	(Jumlah Sarana Prasarana PKB dalam keadaan baik/Jumlah Sarana Prasarana PKB) X 100%	100	Perse n	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Rp954.988.040	
						Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Rp72.913.400	

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Formulasi perhitungan	Targe t	Satua n	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penangg ung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Meningkatnya Kawasan Parkir Tertib	Persentase Kawasan Parkir Tertib	jumlah titik parkir yang memiliki ijin dibagi jumlah seluruh target titik parkir yang dalam pembinaan dishub dikali 100%	100	Perse n	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp168.162.500	Kepala UPT Terminal dan Parkir
33	Meningkatnya kualitas Terminal & Halte Sesuai Standar	Persentase terminal & halte yang sesuai standar	(Bobot keterpenuhan terminal (fasilitas utama dan pendukung) x realisasi keterpenuhan terminal) + (Bobot ketersediaan Prasarana Jalan x realisasi ketersediaan Prasarana Jalan)	56,34	Perse n	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rp267.341.750	

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Formulasi perhitungan	Targe t	Satua n	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penangg ung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Terpenuhinya Prasarana Terminal sesuai standar	Persentase Prasarana terminal yang sesuai standar	(Jlh fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe c yang tersedia/jlh fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dgn standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan)*100%	70	Perse n	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rp223.354.250	Kepala Sub Bagian UPT Terminal dan Parkir
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Rp43.987.500	

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Formulasi perhitungan	Targe t	Satua n	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penangg ung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	Meningkatnya Efektivitas pengawasan parkir	Persentase Pengawasan titik Parkir	jumlah titik parkir yang memiliki ijin dibagi jumlah seluruh target titik parkir yang dalam pembinaan dishub dikali 100%	100	Perse n	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp168.162.500	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2025.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak) dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus:

➤ Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

➤ Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana})) \times 100 \%$$

Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari



hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Skala Nilai Perangkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

A.1 TARGET DAN REALISASI KINERJA TUJUAN TAHUN 2025

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Pemerintah Kabupaten Banjar menjadikan pembangunan sektor perhubungan sebagai bagian penting sesuai dengan Misi 2 Kepala Daerah Kabupaten Banjar yaitu “Pemantapan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan, dan berkelanjutan”. Misi ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan sistem transportasi yang aman, tertib, lancar, dan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas pelayanan perhubungan yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Banjar.

Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar berperan dalam memperkuat konektivitas antarwilayah, mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan mengusung tujuan kinerja yang dipaparkan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Target Dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2025

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7



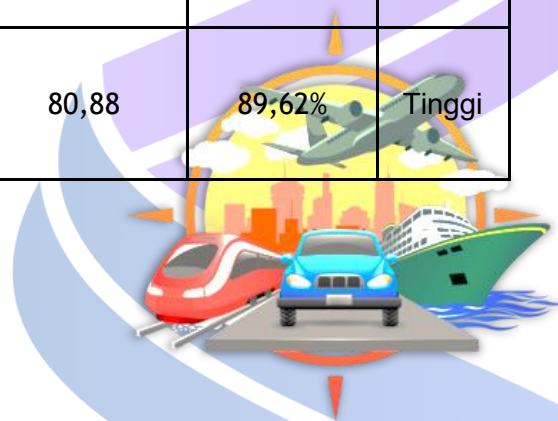
1	Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) (sektor perhubungan)	60	Persen	70,56	118%
---	---	---	----	--------	-------	------

A.2 TARGET DAN REALISASI SASARAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam tabel berikut:

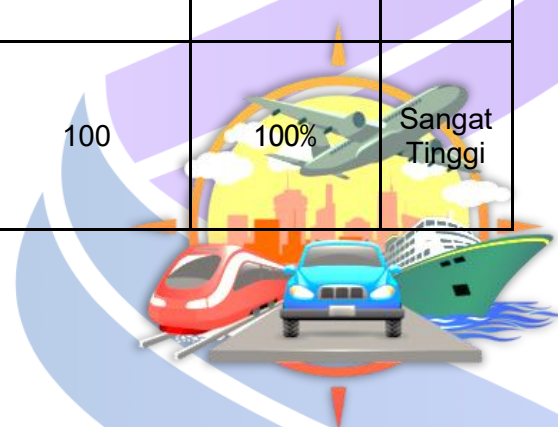
Tabel 3.3
Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya kinerja perhubungan berkualitas	Rasio Konektivitas Kabupaten	0,57	Rasio	0,53	92,98%	Sangat Tinggi
		Tingkat Keselamatan transportasi Daerah Kabupaten/Kota	99,5	Persen	99,46	99,96%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79	Persen	78,58	99,47%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	90,25	indeks	80,88	89,62%	Tinggi



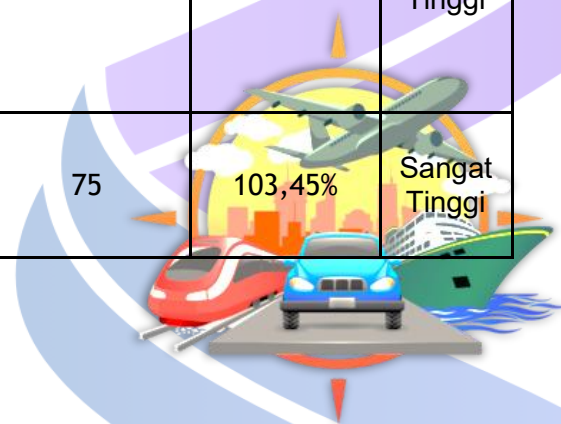


4	Meningkatnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas dan tepat waktu	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100	Persen	100	100%	Sangat Tinggi
5	Terselenggaranya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Pelayanan administrasi keuangan sesuai standar	100	Persen	100	100%	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	100	Persen	100	100%	Sangat Tinggi
7	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	100	100%	Sangat Tinggi
8	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	100	100%	Sangat Tinggi
9	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	100	Persen	100	100%	Sangat Tinggi
10	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100	Persen	100	100%	Sangat Tinggi



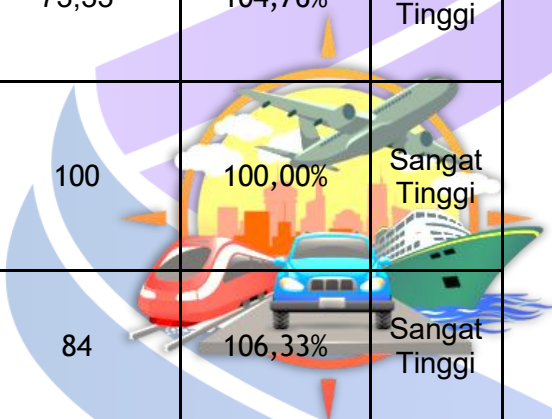


11	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	100	100%	Sangat Tinggi
12	Meningkatnya kualitas Terminal & Halte Sesuai Standar	Persentase terminal & halte yang sesuai standar	56,34	persen	59,37	105,38%	Sangat Tinggi
13	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan danau	Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	51,67	persen	53,89	104,30%	Sangat Tinggi
14	Terpenuhinya Prasarana jalan yang sesuai standar	Persentase Prasarana jalan yang sesuai standar	47	Pesen	50	106,38%	Sangat Tinggi
15	Meningkatnya kualitas Dermaga Sungai dan Danau	Persentase Dermaga yang sesuai standar	45	Persen	48	106,67%	Sangat Tinggi
16	Terpenuhinya Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	60	persen	68,98	114,97%	Sangat Tinggi
17	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	0,37	Indeks	0,42	113,51%	Sangat Tinggi
18	Meningkatnya penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada pusat kegiatan dan ruas jalan/ persimpangan	Persentase penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas	100	Persen	100	100%	Sangat Tinggi
19	Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan andalalin	Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin	72,5	Persen	75	103,45%	Sangat Tinggi





20	Meningkatnya penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada pusat kegiatan dan ruas jalan/ persimpangan	Persentase penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
21	Meningkatnya Ketaatan dan keselamatan Berlalu Lintas	Persentase Ketaatan Pengguna Jalan	85,5	Persen	84	98,25%	Sangat Tinggi
22	Meningkatnya Trayek Angkutan Umum	Persentase Izin Trayek Angkutan Umum Yang Aktif	16,67	Persen	16,67	100%	Sangat Tinggi
23	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	46,89	Persen	53,89	114,93%	Sangat Tinggi
24	Meningkatnya kualitas Dermaga Sungai dan Danau	Persentase Dermaga yang sesuai standar	45	Persen	48	106,67%	Sangat Tinggi
25	Meningkatnya layanan perizinan angkutan sungai dan danau	Persentase meningkatnya layanan perizinan angkutan sungai dan danau	9	Persen	7	77,78%	Sedang
26	Tersedianya Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Sungai dan Danau	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Sungai dan Danau	100	Persen	100	100%	Sangat Tinggi
27	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan Barang	Persentase angkutan umum dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	70	Persen	73,33	104,76%	Sangat Tinggi
28	Tersedianya Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Orang dan Barang	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
29	Meningkatnya Kelaikan Transportasi Perhubungan	Persentase Transportasi Perhubungan yang Laik Jalan	79	Persen	84	106,33%	Sangat Tinggi





30	Meningkatnya Kelaikan Uji Laik Jalan	Persentase Pemeriksaan Uji Laik Jalan yang lulus uji	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
31	Meningkatnya Kualitas Sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase kualitas Sarana Prasarana dalam kondisi baik	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
32	Meningkatnya Kawasan Parkir Tertib	Persentase Kawasan Parkir Tertib	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
33	Meningkatnya kualitas Terminal & Halte Sesuai Standar	Persentase terminal & halte yang sesuai standar	56,34	Persen	59,37	105,38%	Sangat Tinggi
34	Terpenuhinya Prasarana Terminal sesuai standar	Persentase Prasarana terminal yang sesuai standar	70	Persen	68,75	98,21%	Sangat Tinggi
35	Meningkatnya Efektivitas pengawasan parkir	Persentase Pengawasan titik Parkir	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar telah mencapai target, dengan capaian sangat tinggi dengan rincian sebagai berikut :

1) Terwujudnya kinerja perhubungan berkualitas

Terwujudnya kinerja perhubungan berkualitas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

a) Rasio Konektivitas Kabupaten

Rasio Konektivitas merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keterhubungan antarwilayah atau antarm Jaringan infrastruktur yang berperan penting dalam mendukung mobilitas, aksesibilitas, dan pemerataan pembangunan. Pencapaiannya dilakukan melalui proses perencanaan jaringan, pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur, serta optimalisasi koneksi yang telah ada. Pada periode penilaian, ditetapkan target rasio sebesar 0,57 dan berhasil direalisasikan sebesar 0,53, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 92,98% yang diperoleh dari perbandingan realisasi terhadap rencana dikalikan 100%.

b) Tingkat Keselamatan transportasi Daerah Kabupaten/Kota

Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi di daerah, baik bagi pengguna maupun penyedia layanan transportasi. Pencapaian indikator ini dilakukan



melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi, penguatan pengawasan, penegakan aturan, serta edukasi keselamatan kepada masyarakat. Selain itu, koordinasi antar pemangku kepentingan juga menjadi bagian penting dalam menjaga standar keselamatan transportasi. Pada periode penilaian ditetapkan target sebesar 99,5% dan terealisasi sebesar 99,46%, sehingga capaian kinerja mencapai sekitar 99,96% dari rencana yang telah ditetapkan.

2) Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan indikator yang menggambarkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Pencapaiannya dilakukan melalui penguatan manajemen kinerja, penyelarasan perencanaan dengan penganggaran, serta peningkatan kualitas evaluasi dan pelaporan kinerja. Pada periode penilaian ditetapkan target sebesar 79 dan terealisasi 78,58, sehingga capaian kinerja mencapai sekitar 99,47% dari rencana yang telah ditetapkan.

3) Peningkatan Nilai Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Perangkat Daerah

Nilai IKKI Perangkat Daerah merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kualitas kinerja internal perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Pencapaiannya dilakukan melalui peningkatan tata kelola organisasi, penguatan pelaksanaan program dan kegiatan, serta evaluasi kinerja secara berkelanjutan. Pada periode penilaian ditetapkan target sebesar 90,25% dan terealisasi 80,88%, sehingga capaian kinerja mencapai sekitar 89,62% dari rencana yang telah ditetapkan.

4) Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas

Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kepatuhan serta kualitas perangkat daerah dalam menyusun dokumen manajemen kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Pencapaiannya dilakukan melalui perencanaan yang terkoordinasi, pemenuhan standar dalam penyusunan dokumen, penyelesaian dokumen sesuai jadwal, serta peningkatan kapasitas pegawai dalam proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja. Indikator ini diperoleh dari perhitungan jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan dibagi dengan keseluruhan target jumlah dokumen perencanaan $\times 100\%$. Pada periode penilaian ditetapkan target sebesar 100% dan seluruhnya berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100% dari rencana yang telah ditetapkan.

5) Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas

Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu merupakan indikator yang menggambarkan tingkat ketepatan





penyusunan dan kualitas dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencapaiannya dilakukan melalui pengelolaan administrasi keuangan yang tertib, pengendalian jadwal penyusunan laporan, penerapan standar akuntansi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan. Indikator ini diperoleh dari perhitungan jumlah dokumen keuangan yang dihasilkan dibagi dengan keseluruhan target jumlah dokumen keuangan $\times 100\%$. Pada periode penilaian ditetapkan target sebesar 100% dan seluruhnya berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100% dari rencana yang telah ditetapkan.

6) Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah merupakan indikator yang menggambarkan tingkat ketertiban, kelengkapan, dan keakuratan pengelolaan serta pencatatan aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pencapaian indikator ini dilakukan melalui penatausahaan aset yang sistematis, pemutakhiran data barang milik daerah secara berkala, serta pengawasan dan pengendalian administrasi oleh pengelola aset. Indikator ini diperoleh dari perhitungan jumlah dokumen pengelolaan barang yang dihasilkan dibagi dengan keseluruhan target jumlah dokumen pengelolaan barang $\times 100\%$. Pada periode penilaian ditetapkan target sebesar 100% dan berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100% dari rencana yang telah ditetapkan.

7) Lancarnya administrasi kepegawaian daerah

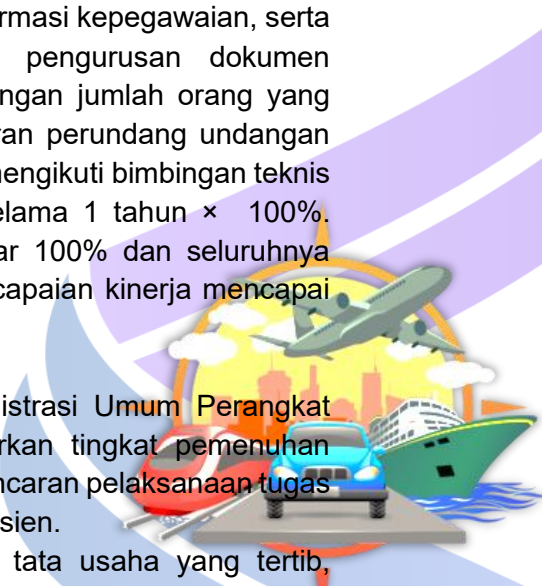
Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian secara lengkap, tepat waktu, dan sesuai ketentuan bagi seluruh aparatur perangkat daerah.

Pencapaian indikator ini dilakukan melalui pengelolaan administrasi kepegawaian yang tertib, pemanfaatan sistem informasi kepegawaian, serta peningkatan koordinasi dan ketelitian dalam pengurusan dokumen kepegawaian. Indikator ini diperoleh dari perhitungan jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan selama 1 tahun dibagi dengan target orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan selama 1 tahun $\times 100\%$. Pada periode penilaian ditetapkan target sebesar 100% dan seluruhnya berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100% dari rencana yang telah ditetapkan.

8) Terselenggaranya kegiatan kantor

Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pemenuhan layanan administrasi umum yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif dan efisien.

Pencapaiannya dilakukan melalui penataan tata usaha yang tertib, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta pengelolaan





administrasi umum yang terencana dan terkoordinasi dengan baik. Indikator ini diperoleh dari perhitungan jumlah penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran yang terfasilitasi dibagi dengan jumlah penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran $\times 100\%$. Pada periode penilaian ditetapkan target sebesar 100% dan seluruhnya berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100% dari rencana yang telah ditetapkan.

9) Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Rencana

Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang dengan perencanaan kebutuhan yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah. Pencapaian indikator ini dilakukan melalui penyusunan rencana kebutuhan barang yang akurat, pelaksanaan proses pengadaan sesuai ketentuan, serta pengendalian dan evaluasi secara berkala agar pengadaan tepat jumlah, waktu, dan mutu. Indikator ini diperoleh dari perhitungan Jumlah Pengadaan BMD dibagi jumlah Kebutuhan dikali 100%. Pada periode penilaian ditetapkan target sebesar 100% dan seluruh pengadaan berhasil direalisasikan sesuai rencana sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100% dari rencana yang telah ditetapkan.

10) Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor

Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi merupakan indikator yang menggambarkan tingkat ketersediaan dan pemenuhan jasa pendukung operasional perkantoran guna menunjang kelancaran pelayanan dan aktivitas kerja perangkat daerah.

Pencapaian indikator ini dilakukan melalui perencanaan kebutuhan jasa penunjang secara tepat, pengadaan dan pengelolaan layanan pendukung sesuai standar, serta pengawasan pelaksanaan agar berjalan efektif dan berkesinambungan. Indikator ini diperoleh dari perhitungan Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Pada periode penilaian ditetapkan target sebesar 100% dan seluruhnya berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100% dari rencana yang telah ditetapkan.

11) Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan

Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pemenuhan kegiatan pemeliharaan aset daerah agar tetap berfungsi optimal dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pencapaian indikator ini dilakukan melalui perencanaan pemeliharaan yang terstruktur, pelaksanaan perawatan rutin dan berkala, serta pengendalian dan evaluasi kondisi barang milik daerah secara berkesinambungan. Indikator ini diperoleh dari perhitungan jumlah barang milik daerah yang terpelihara dibagi dengan barang milik daerah sesuai RKBMD $\times 100\%$. Pada periode penilaian ditetapkan target sebesar 100%



dan seluruhnya berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100% dari rencana yang telah ditetapkan.

12) Meningkatkan kualitas Terminal & Halte Sesuai Standar

Persentase terminal dan halte yang sesuai standar merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pemenuhan prasarana transportasi terhadap standar teknis, keselamatan, kenyamanan, dan kelayakan pelayanan bagi pengguna. Pencapaian indikator ini dilakukan melalui kegiatan pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan fasilitas terminal serta halte, disertai pengawasan dan evaluasi kesesuaian dengan standar yang ditetapkan.

Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan (Bobot keterpenuhan terminal (fasilitas utama dan pendukung) x realisasi keterpenuhan terminal) + (Bobot ketersediaan Prasarana Jalan x realisasi ketersediaan Prasarana Jalan). Pada periode penilaian ditetapkan target sebesar 56,34% dan terealisasi sebesar 59,37%, sehingga capaian kinerja mencapai 105,38% yang diperoleh dari perbandingan realisasi terhadap rencana dikalikan 100%.

13) Meningkatkan Pelayanan Angkutan Sungai dan danau

Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik merupakan indikator yang menggambarkan kualitas layanan angkutan perairan dalam mendukung mobilitas masyarakat secara aman, nyaman, dan andal. Pencapaian indikator ini dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana angkutan sungai dan danau, pembinaan operator, pengawasan standar pelayanan, serta evaluasi kinerja pelayanan secara berkala.

Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan Bobot keterpenuhan dermaga dikali realisasi keterpenuhan dermaga) + (Bobot ketersediaan kapal yang sesuai standar dikali realisasi ketersediaan kapal yang sesuai standar sehingga mendapat capaian sangat tinggi. Pada periode penilaian ditetapkan target sebesar 51,67% dan berhasil direalisasikan sebesar 53,89%, sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai capaian sebesar 104,03%.

14) Terpenuhinya Prasarana jalan yang sesuai standar

Persentase prasarana jalan yang sesuai standar merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kelayakan dan kualitas infrastruktur jalan dalam mendukung kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan transportasi. Pencapaian indikator ini dilakukan melalui pembangunan dan peningkatan kualitas jalan, pemeliharaan rutin dan berkala, serta pengawasan teknis agar prasarana jalan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan Jumlah Prasarana Jalan yang tersedia dibagi kebutuhan Prasarana Jalan dikali 100%. Pada periode penilaian ditetapkan target sebesar 47% dan berhasil direalisasikan sebesar 50%, sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai capaian sebesar 106,38%.

15) Meningkatnya kualitas Dermaga Sungai dan Danau





Persentase dermaga yang sesuai standar merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kelayakan prasarana dermaga dalam mendukung keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan kegiatan transportasi perairan. Pencapaian indikator ini berasal dari perhitungan Jumlah Dermaga/Shelter * bobot 25% + Kondisi Dermaga * bobot 25% + Perencanaan * bobot 25% + Pengawasan * bobot 25%. Pada periode penilaian ditetapkan target sebesar 45% dan berhasil direalisasikan sebesar 48%, sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai capaian sebesar 106,67%.

16) Terpenuhinya Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan

Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpenuhi merupakan indikator yang menggambarkan tingkat ketersediaan dan kelengkapan fasilitas pendukung jalan, seperti rambu, marka, dan perangkat keselamatan lainnya, dalam menunjang kelancaran serta keselamatan lalu lintas. Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan jumlah perlengkapan jalan yang tersedia dibagi kebutuhan perlengkapan jalan dan mendapat capaian sangat tinggi. Pada periode penilaian ditetapkan target sebesar 46% dan terealisasi sebesar 68,98%, sehingga memperoleh predikat sedang dengan nilai capaian kinerja sebesar 114,97%.

17) Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas

V/C Ratio merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan untuk menilai tingkat kinerja dan kelancaran arus lalu lintas pada suatu ruas jalan. Pencapaian indikator ini dilakukan melalui pengaturan manajemen lalu lintas, dan pengendalian volume kendaraan agar kinerja jaringan jalan tetap optimal. V/C ratio yaitu perbandingan volume dengan kapasitas. Apabila nilai VC ratio telah mencapai nilai 0,8 atau lebih besar, maka dapat dikategorikan arus telah mendekati kapasitas, sehingga perlu dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Pada periode penilaian ditetapkan target V/C ratio sebesar 0,37 dan terealisasi sebesar 0,42, sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai capaian sebesar 113,51%.

18) Meningkatnya penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada pusat kegiatan dan ruas jalan/ persimpangan

Persentase penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pelaksanaan upaya pengaturan, pengendalian, dan rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan kelancaran, keselamatan, dan efisiensi pergerakan kendaraan. Pencapaian indikator ini dilakukan melalui penerapan rekayasa lalu lintas di titik rawan kemacetan, pengaturan arus lalu lintas ketika ada acara keagamaan, pemasangan perlengkapan pendukung, serta evaluasi kinerja lalu lintas secara berkala.

Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan Manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dapat diterapkan dibagi kebutuhan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dikali 100%. Pada periode penilaian ditetapkan target sebesar 100% dan seluruhnya berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai capaian 100%.

19) Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan andalalin



Persentase objek wajib Andalalin yang mematuhi peraturan Andalalin merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kepatuhan pengembang atau penyelenggara kegiatan terhadap ketentuan Analisis Dampak Lalu Lintas dalam rangka menjaga kinerja dan keselamatan lalu lintas. Pencapaian indikator ini dilakukan melalui sosialisasi peraturan Andalalin, pembinaan dan pendampingan kepada objek wajib, serta pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan rekomendasi Andalalin.

Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan Objek wajib andalalin yang memiliki rekomendasi dibagi potensi objek wajib andalalin dikali 100%. Pada periode penilaian ditetapkan target sebesar 72,5% dan berhasil direalisasikan sebesar 75%, sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai capaian sebesar 103,45%.

20) Meningkatnya penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada pusat kegiatan dan ruas jalan/ persimpangan

Persentase penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pelaksanaan upaya pengaturan, pengendalian, dan rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan kelancaran, keselamatan, dan efisiensi pergerakan kendaraan. Pencapaian indikator ini dilakukan melalui penerapan rekayasa lalu lintas di titik rawan kemacetan, pengaturan arus lalu lintas ketika ada acara keagamaan, pemasangan perlengkapan pendukung, serta evaluasi kinerja lalu lintas secara berkala.

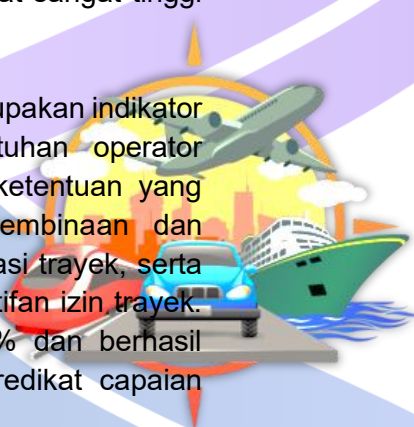
Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan Manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dapat diterapkan dibagi kebutuhan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dikali 100%. Pada periode penilaian ditetapkan target sebesar 100% dan seluruhnya berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai capaian 100%.

21) Meningkatnya Ketaatan dan keselamatan Berlalu Lintas

Persentase Ketaatan Pengguna Jalan merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas terhadap peraturan, rambu, dan ketentuan keselamatan di jalan. Pencapaian indikator ini dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi keselamatan berlalu lintas, penegakan hukum, serta peningkatan sarana pendukung keselamatan jalan. Pada periode penilaian ditetapkan target sebesar 85,5% dan terealisasi sebesar 84%, sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai capaian sebesar 98,25%.

22) Meningkatnya Trayek Angkutan Umum

Persentase Izin Trayek Angkutan Umum yang Aktif merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pemanfaatan dan kepatuhan operator angkutan umum dalam mengaktifkan izin trayek sesuai ketentuan yang berlaku. Pencapaian indikator ini dilakukan melalui pembinaan dan sosialisasi kepada operator angkutan, penataan dan evaluasi trayek, serta kemudahan pelayanan perizinan untuk mendorong pengaktifan izin trayek. Pada periode penilaian ditetapkan target sebesar 16,67% dan berhasil direalisasikan sebesar 16,67%, sehingga memperoleh predikat capaian tinggi dengan nilai capaian sebesar 100%.





23) Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau

Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik merupakan indikator yang menggambarkan kualitas pelayanan angkutan perairan dalam mendukung mobilitas masyarakat secara aman, nyaman, dan andal. Pencapaian indikator ini dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana angkutan sungai dan danau, pembinaan operator, pengawasan standar pelayanan, serta evaluasi kinerja pelayanan secara berkala. Pada periode penilaian ditetapkan target sebesar 46,89% dan berhasil direalisasikan sebesar 53,89%, sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai capaian sebesar 114,93%.

24) Meningkatnya kualitas Dermaga Sungai dan Danau

Persentase dermaga yang sesuai standar merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kelayakan prasarana dermaga dalam mendukung keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan kegiatan transportasi perairan. Pencapaian indikator ini berasal dari perhitungan $\text{Jumlah Dermaga/Shelter} \times \text{bobot } 25\% + \text{Kondisi Dermaga} \times \text{bobot } 25\% + \text{Perencanaan} \times \text{bobot } 25\% + \text{Pengawasan} \times \text{bobot } 25\%$. Pada periode penilaian ditetapkan target sebesar 45% dan berhasil direalisasikan sebesar 48%, sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai capaian sebesar 106,67%.

25) Meningkatnya layanan perizinan angkutan sungai dan danau

Persentase meningkatnya layanan perizinan angkutan sungai dan danau merupakan indikator yang menggambarkan peningkatan kinerja pelayanan perizinan bagi angkutan perairan dalam rangka mendukung tertib administrasi dan kelancaran operasional. Pencapaian indikator ini dilakukan melalui penyederhanaan prosedur perizinan, peningkatan kualitas pelayanan, serta pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha angkutan sungai dan danau. Pada periode penilaian ditetapkan target sebesar 9% dan terealisasi sebesar 7%, sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai capaian sebesar 77,78%.

26) Tersedianya Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Sungai dan Danau

Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Sungai dan Danau merupakan indikator yang menggambarkan kesiapan dan kelengkapan dokumen sebagai dasar penetapan tarif angkutan perairan yang adil dan sesuai ketentuan. Pencapaian indikator ini dilakukan melalui pengumpulan data biaya operasional, kajian teknis dan ekonomi, serta penyusunan dokumen usulan tarif secara terkoordinasi dan tepat waktu. Pada periode penilaian ditetapkan target sebesar 100% dan seluruhnya berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai capaian 100%.

27) Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan Barang

Persentase angkutan umum dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik merupakan indikator yang menggambarkan kualitas pelayanan angkutan umum dalam memenuhi aspek keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keandalan bagi masyarakat. Pencapaian indikator ini dilakukan melalui



pembinaan operator angkutan umum, peningkatan standar pelayanan, pengawasan operasional, serta evaluasi kinerja pelayanan secara berkala. Pada periode penilaian ditetapkan target sebesar 70% dan berhasil direalisasikan sebesar 73,33%, sehingga memperoleh capaian dengan predikat rendah dan nilai sebesar 104,76%.

28) Tersedianya Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Orang dan Barang

Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan merupakan indikator yang menggambarkan kesiapan dan kelengkapan dokumen sebagai dasar penetapan tarif angkutan yang sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan pelayanan. Pencapaian indikator ini dilakukan melalui pengumpulan data biaya operasional, kajian teknis dan ekonomi, serta penyusunan dokumen usulan tarif secara sistematis dan terkoordinasi. Pada periode penilaian ditetapkan target sebesar 100% dan seluruhnya berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga memperoleh capaian dengan predikat sangat tinggi dan nilai 100%.

29) Meningkatnya Kelayakan Transportasi Perhubungan

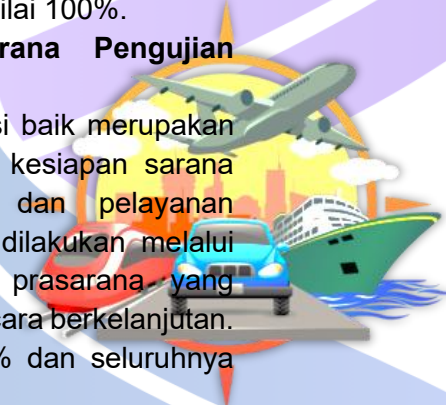
Persentase Transportasi Perhubungan yang Laik Jalan merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kelayakan operasional sarana transportasi berdasarkan pemenuhan persyaratan teknis dan keselamatan. Pencapaian indikator ini dilakukan melalui pengujian kendaraan bermotor secara berkala, pengawasan kepatuhan terhadap standar laik jalan, serta pembinaan kepada pemilik dan operator transportasi. Pada periode penilaian ditetapkan target sebesar 79% dan berhasil direalisasikan sebesar 84%, sehingga memperoleh predikat capaian sedang dengan nilai capaian sebesar 106,33%.

30) Meningkatnya Kelayakan Uji Laik Jalan

Persentase Pemeriksaan Uji Laik Jalan yang lulus uji merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan kendaraan dalam memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan untuk dapat beroperasi di jalan. Pencapaian indikator ini dilakukan melalui pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor secara tertib dan sesuai standar, peningkatan kualitas pelayanan uji, serta pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis kendaraan. Pada periode penilaian ditetapkan target sebesar 100% dan seluruh kendaraan yang diuji dinyatakan lulus sebesar 100%, sehingga memperoleh capaian dengan predikat sangat tinggi dan nilai 100%.

31) Meningkatnya Kualitas Sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor

Persentase kualitas sarana prasarana dalam kondisi baik merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kelayakan dan kesiapan sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan perhubungan secara optimal. Pencapaian indikator ini dilakukan melalui pemeliharaan rutin dan berkala, perbaikan sarana prasarana yang mengalami kerusakan, serta pengawasan kondisi aset secara berkelanjutan. Pada periode penilaian ditetapkan target sebesar 100% dan seluruhnya





berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga memperoleh capaian dengan predikat sangat tinggi dan nilai 100%.

32) Meningkatnya Kawasan Parkir Tertib

Persentase Kawasan Parkir Tertib merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keteraturan penyelenggaraan parkir dalam mendukung kelancaran lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan. Pencapaian indikator ini dilakukan melalui penataan kawasan parkir, pengawasan dan penertiban parkir, serta pembinaan kepada pengelola dan juru parkir agar mematuhi ketentuan yang berlaku. Pada periode penilaian ditetapkan target sebesar 100% dan seluruhnya berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga memperoleh capaian dengan predikat sangat tinggi dan nilai 100%.

33) Meningkatnya kualitas Terminal & Halte Sesuai Standar

Persentase terminal dan halte yang sesuai standar merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pemenuhan prasarana transportasi terhadap standar teknis, keselamatan, kenyamanan, dan kelayakan pelayanan bagi pengguna. Pencapaian indikator ini dilakukan melalui pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan fasilitas terminal serta halte, disertai pengawasan dan evaluasi kesesuaian dengan standar yang ditetapkan. Pada periode penilaian ditetapkan target sebesar 56,34% dan berhasil direalisasikan sebesar 59,37%, sehingga memperoleh predikat tinggi dengan nilai capaian sebesar 105,38%.

34) Terpenuhinya Prasarana Terminal sesuai standar

Persentase prasarana terminal yang sesuai standar merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kelayakan dan kualitas fasilitas terminal dalam mendukung keselamatan, kenyamanan, serta kelancaran pelayanan transportasi. Pencapaian indikator ini dilakukan melalui pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana terminal, serta pengawasan teknis untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan. Pada periode penilaian ditetapkan target sebesar 70% dan terealisasi sebesar 68,75%, sehingga memperoleh predikat tinggi dengan nilai capaian sebesar 98,21%.

35) Meningkatnya Efektivitas pengawasan parkir

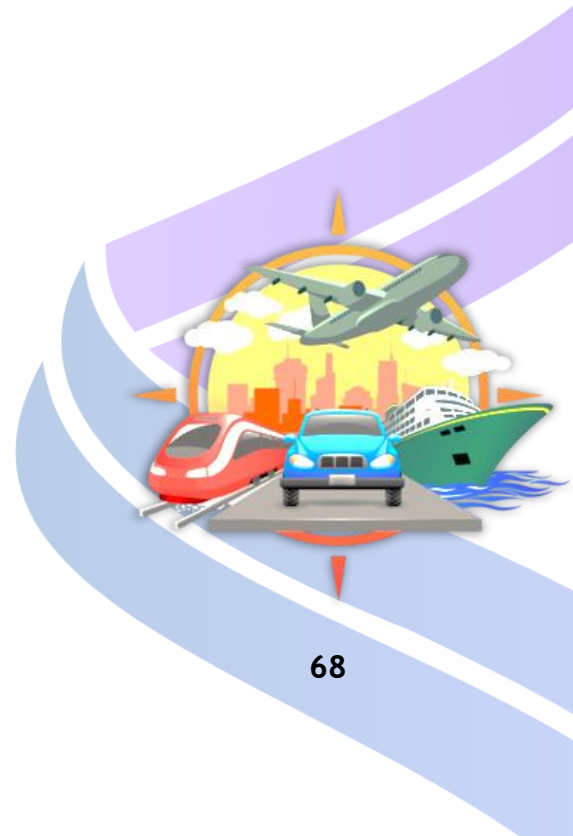
Persentase Pengawasan Titik Parkir merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pelaksanaan pengawasan terhadap lokasi parkir guna menjaga ketertiban, kelancaran lalu lintas, dan kepatuhan terhadap ketentuan parkir. Pencapaian indikator ini dilakukan melalui pengaturan jadwal pengawasan, penugasan petugas secara rutin, serta penertiban dan evaluasi di titik-titik parkir yang telah ditetapkan. Pada periode penilaian ditetapkan target sebesar 100% dan seluruhnya berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga memperoleh capaian dengan predikat sangat tinggi dan nilai 100%.





A.3 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan bagian dari kinerja strategis (*SKPD*) sebagaimana yang tercantum pada perubahan Renstra Periode Tahun 2025-2029. Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:



Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Ket.
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya kinerja perhubungan berkualitas	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	0,53	92,98%	90	124,13%	84,17	93,52%	
		Tingkat Keselamatan transportasi Daerah Kabupaten/Kota	Persen	99,46	99,96%	n/a	n/a	n/a	n/a	
2	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	78,58	99,47%	78,22	100%	78,26	100%	
3	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	indeks	80,88	89,62%	87,08	114,57%	74,50	102,05%	
4	Meningkatnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas dan tepat waktu	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persen	100	100%	100%	100%	100%	100,00%	

5	Terselenggaranya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Pelayanan administrasi keuangan sesuai standar	Persen	100	100%	100%	100%	100%	100,00%	
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	Persen	100	100%	100%	100%	100%	100,00%	
7	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100%	100%	100%	100%	100,00%	
8	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100%	100%	100%	100%	100,00%	
9	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	Persen	100	100%	100%	100%	100%	100,00%	
10	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Persen	100	100%	100%	100%	100%	100,00%	

11	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100%	100%	100%	100%	100,00%	
12	Meningkatnya kualitas Terminal & Halte Sesuai Standar	Persentase terminal & halte yang sesuai standar	persen	59,37	105,38%	n/a	n/a	n/a	n/a	
13	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan danau	Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	persen	53,89	104,30%	n/a	n/a	n/a	n/a	
14	Terpenuhiya Prasarana jalan yang sesuai standar	Persentase Prasarana jalan yang sesuai standar	Pesen	50	106,38%	n/a	n/a	n/a	n/a	
15	Meningkatnya kualitas Dermaga Sungai dan Danau	Persentase Dermaga yang sesuai standar	Persen	48	100%	67	100%	68	88,31%	
16	Terpenuhiya Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	persen	68,98	106,12%	n/a	n/a	n/a	n/a	
17	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	Indeks	0,42	114,13%	0,38	100%	0,39	108%	

18	Meningkatnya penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada pusat kegiatan dan ruas jalan/persimpangan	Persentase penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Persen	100	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	
19	Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan andalalin	Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin	Persen	75	103%	75	100,00%	70	82,35%	
20	Meningkatnya penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada pusat kegiatan dan ruas jalan/persimpangan	Persentase penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Persen	100	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	
21	Meningkatnya Ketaatan dan keselamatan Berlalu Lintas	Persentase Ketaatan Pengguna Jalan	Persen	84	98,25%	86	100,51%	84,34	96,08%	
22	Meningkatnya Trayek Angkutan Umum	Persentase Izin Trayek Angkutan Umum Yang Aktif	Persen	16,67	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	
23	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Persen	53,89	104,30%	n/a	n/a	n/a	n/a	

24	Meningkatnya kualitas Dermaga Sungai dan Danau	Persentase Dermaga yang sesuai standar	Persen	48,00	100%	67	100%	68	88,31%	
25	Meningkatnya layanan perizinan angkutan sungai dan danau	Persentase meningkatnya layanan perizinan angkutan sungai dan danau	Persen	7	70%	n/a	n/a	n/a	n/a	
26	Tersedianya Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Sungai dan Danau	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Sungai dan Danau	Persen	100	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	
27	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan Barang	Persentase angkutan umum dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Persen	73,33	88%	50	100,00%	36,36	48,48%	
28	Tersedianya Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Orang dan Barang	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan	Persen	100	100%	100	100,00%	100	100%	
29	Meningkatnya Kelayakan Transportasi Perhubungan	Persentase Transportasi Perhubungan yang Laik Jalan	Persen	84	105%	n/a	n/a	n/a	n/a	
30	Meningkatnya Kelayakan Uji Laik Jalan	Persentase Pemeriksaan Uji Laik Jalan yang lulus uji	Persen	100	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	

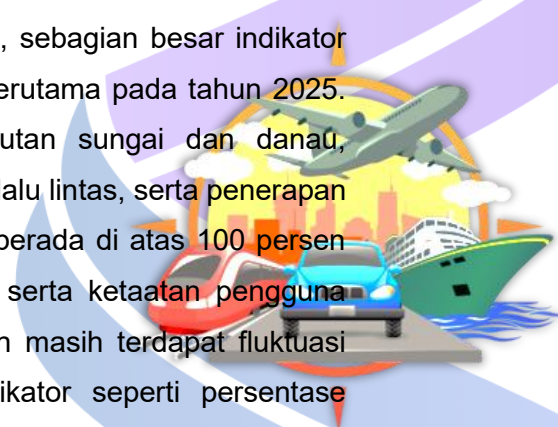
31	Meningkatnya Kualitas Sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase kualitas Sarana Prasarana dalam kondisi baik	Persen	100	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	
32	Meningkatnya Kawasan Parkir Tertib	Persentase Kawasan Parkir Tertib	Persen	100	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	
33	Meningkatnya kualitas Terminal & Halte Sesuai Standar	Persentase terminal & halte yang sesuai standar	Persen	59,37	97,33%	n/a	n/a	n/a	n/a	
34	Terpenuhinya Prasarana Terminal sesuai standar	Persentase Prasarana terminal yang sesuai standar	Persen	68,75	91,67%	n/a	n/a	n/a	n/a	
35	Meningkatnya Efektivitas pengawasan parkir	Persentase Pengawasan titik Parkir	Persen	100	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	



Pada tahun 2023–2025, kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar secara umum menunjukkan tren yang positif dan stabil pada sebagian besar indikator strategis. Sasaran utama “Terwujudnya kinerja perhubungan berkualitas” tercermin dari Rasio Konektivitas Kabupaten yang pada tahun 2025 mencapai capaian 92,98 persen, meskipun masih sedikit menurun dibandingkan capaian tahun 2024 yang melebihi target. Tingkat keselamatan transportasi daerah pada tahun 2025 juga berada pada kategori sangat baik dengan capaian hampir sempurna, yaitu 99,96 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas layanan perhubungan dan keselamatan transportasi telah berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Dari sisi tata kelola dan akuntabilitas, kinerja perangkat daerah menunjukkan hasil yang sangat baik. Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tiga tahun terakhir konsisten berada pada kisaran 78 dengan capaian mendekati atau mencapai 100 persen target. Demikian pula pada indikator kepatuhan dan kinerja intern (IKKI) yang secara umum berada pada kategori baik, meskipun pada tahun 2025 terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Seluruh indikator pendukung administrasi, seperti perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, administrasi umum, pengadaan, serta pemeliharaan sarana prasarana, menunjukkan capaian 100 persen selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini menandakan bahwa sistem administrasi dan pengelolaan internal Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar telah berjalan tertib, konsisten, dan sesuai standar.

Pada sektor pelayanan teknis perhubungan, sebagian besar indikator menunjukkan capaian yang melampaui target, terutama pada tahun 2025. Kualitas terminal dan halte, pelayanan angkutan sungai dan danau, prasarana jalan, perlengkapan jalan, kelancaran lalu lintas, serta penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas umumnya berada di atas 100 persen capaian. Indikator ketaatan terhadap andalalin serta ketaatan pengguna jalan juga berada pada kategori baik, meskipun masih terdapat fluktuasi antar tahun. Namun demikian, beberapa indikator seperti persentase





terminal dan prasarana terminal yang sesuai standar masih belum sepenuhnya mencapai target, sehingga memerlukan perhatian lebih lanjut dalam peningkatan kualitas infrastruktur transportasi darat.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar berhasil menjaga kinerja organisasi dan pelayanan publik pada tingkat yang sangat baik, baik dari sisi tata kelola maupun layanan teknis. Peningkatan pada sektor keselamatan, kelancaran lalu lintas, kelaikan kendaraan, kawasan parkir tertib, serta pelayanan angkutan umum menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan sistem transportasi daerah yang aman, tertib, dan berkualitas. Ke depan, tantangan utama terletak pada pemerataan kualitas infrastruktur, peningkatan standar terminal dan dermaga, serta penguatan konsistensi kinerja pada indikator yang masih berfluktuasi, agar pelayanan perhubungan di Kabupaten Banjar semakin optimal dan berkelanjutan.

A.4 REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DAN TARGET KINERJA SASARAN AKHIR PERIODE RENSTRA

Indikator kinerja sasaran Tahun 2025 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Periode Tahun 2025-2029. Pencapaian kinerja tahun 2025 Perubahan Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Perubahan Renstra 2025, untuk mengetahui kemampuan (*SKPD*) selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dan Target akhir Renstra di Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dan Target Akhir Renstra

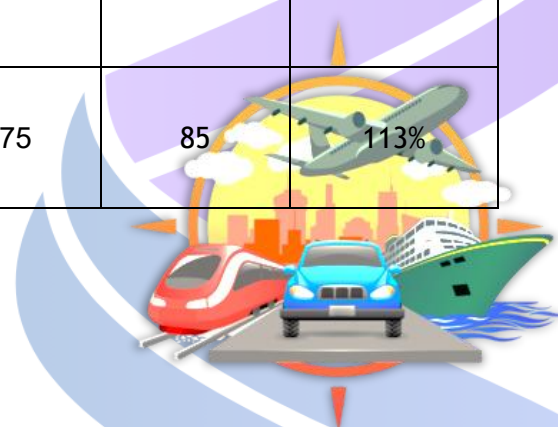
NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Periode Akhir Renstra (2030)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2030)
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya kinerja perhubungan berkualitas	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	0,53	0,8	151%



		Tingkat Keselamatan transportasi Daerah Kabupaten/Kota	Persen	99,46	99,59	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	78,58	81	103%
3	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	indeks	80,88	91,25	113%
4	Meningkatnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas dan tepat waktu	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persen	100	100	100%
5	Terselenggaranya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Pelayanan administrasi keuangan sesuai standar	Persen	100	100	100%
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	Persen	100	100	100%
7	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	100%
8	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100%
9	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	Persen	100	100	100%
10	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase jasa penunjang pelayanan umum	Persen	100	100	100%

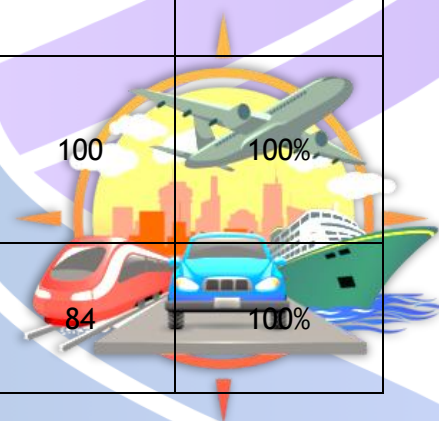


		kantor yang terpenuhi				
11	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100%
12	Meningkatnya kualitas Terminal & Halte Sesuai Standar	Persentase terminal & halte yang sesuai standar	persen	59,37	85	143%
13	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan danau	Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	persen	53,89	70,78	131%
14	Terpenuhinya Prasarana jalan yang sesuai standar	Persentase Prasarana jalan yang sesuai standar	Pesen	50	92	184%
15	Meningkatnya kualitas Dermaga Sungai dan Danau	Persentase Dermaga yang sesuai standar	Persen	48	98	204%
16	Terpenuhinya Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	persen	68,98	85	123%
17	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	Indeks	0,42	0,355	85%
18	Meningkatnya penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada pusat kegiatan dan ruas jalan/ persimpangan	Persentase penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Persen	100	100	100%
19	Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan andalalin	Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin	Persen	75	85	113%





20	Meningkatnya penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada pusat kegiatan dan ruas jalan/ persimpangan	Persentase penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Persen	100	100	100%
21	Meningkatnya Ketaatan dan keselamatan Berlalu Lintas	Persentase Ketaatan Pengguna Jalan	Persen	84	88	105%
22	Meningkatnya Trayek Angkutan Umum	Persentase Izin Trayek Angkutan Umum Yang Aktif	Persen	16,67	50	200%
23	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Persen	53,89	70,78	131%
24	Meningkatnya kualitas Dermaga Sungai dan Danau	Persentase Dermaga yang sesuai standar	Persen	48,00	98	204%
25	Meningkatnya layanan perizinan angkutan sungai dan danau	Persentase meningkatnya layanan perizinan angkutan sungai dan danau	Persen	1	5	500%
26	Tersedianya Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Sungai dan Danau	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Sungai dan Danau	Persen	100	100	100%
27	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan Barang	Persentase angkutan umum dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Persen	73,33	100	136%
28	Tersedianya Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Orang dan Barang	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan	Persen	100	100	100%
29	Meningkatnya Kelaikan Transportasi Perhubungan	Persentase Transportasi Perhubungan yang Laik Jalan	Persen	84	100	100%





30	Meningkatnya Kelaikan Uji Laik Jalan	Persentase Pemeriksaan Uji Laik Jalan yang lulus uji	Persen	100	100	100%
31	Meningkatnya Kualitas Sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase kualitas Sarana Prasarana dalam kondisi baik	Persen	100	100	100%
32	Meningkatnya Kawasan Parkir Tertib	Persentase Kawasan Parkir Tertib	Persen	100	100	100%
33	Meningkatnya kualitas Terminal & Halte Sesuai Standar	Persentase terminal & halte yang sesuai standar	Persen	59,37	85	143%
34	Terpenuhinya Prasarana Terminal sesuai standar	Persentase Prasarana terminal yang sesuai standar	Persen	68,75	90	131%
35	Meningkatnya Efektivitas pengawasan parkir	Persentase Pengawasan titik Parkir	Persen	100	100	100%

A.5 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR PROVINSI DAN NASIONAL

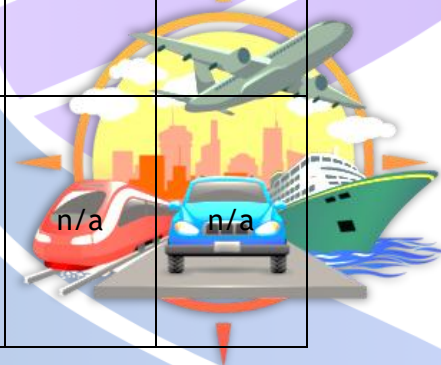
Perbandingan realisasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dengan standar provinsi dan nasional bertujuan untuk mengetahui penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar lebih baik/kurang baik dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya kinerja perhubungan berkualitas	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	0,53	n/a	n/a
		Tingkat Keselamatan transportasi Daerah Kabupaten/Kota	Persen	99,46	n/a	n/a

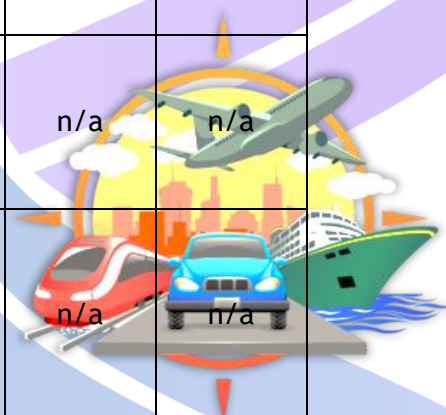


2	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	78,58	n/a	n/a
3	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	indeks	80,88	n/a	n/a
4	Meningkatnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas dan tepat waktu	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persen	100	n/a	n/a
5	Terselenggaranya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Pelayanan administrasi keuangan sesuai standar	Persen	100	n/a	n/a
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	Persen	100	n/a	n/a
7	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	n/a	n/a
8	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	n/a	n/a





9	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	Persen	100	n/a	n/a
10	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Persen	100	n/a	n/a
11	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	n/a	n/a
12	Meningkatnya kualitas Terminal & Halte Sesuai Standar	Persentase terminal & halte yang sesuai standar	persen	59,37	n/a	n/a
13	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan danau	Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	persen	53,89	n/a	n/a
14	Terpenuhiya Prasarana jalan yang sesuai standar	Persentase Prasarana jalan yang sesuai standar	Pesen	50	n/a	n/a
15	Meningkatnya kualitas Dermaga Sungai dan Danau	Persentase Dermaga yang sesuai standar	Persen	48	n/a	n/a
16	Terpenuhiya Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	persen	68,98	n/a	n/a

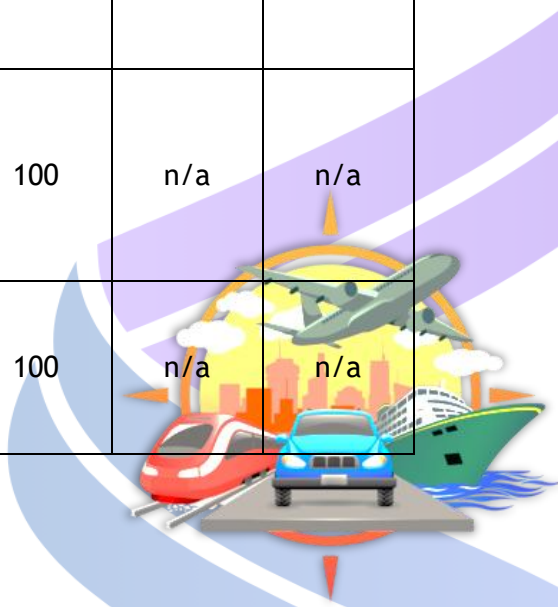




17	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	Indeks	0,42	n/a	n/a
18	Meningkatnya penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada pusat kegiatan dan ruas jalan/ persimpangan	Persentase penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Persen	100	n/a	n/a
19	Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan andalalin	Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin	Persen	75	n/a	n/a
20	Meningkatnya penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada pusat kegiatan dan ruas jalan/ persimpangan	Persentase penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Persen	100	n/a	n/a
21	Meningkatnya Ketaatan dan keselamatan Berlalu Lintas	Persentase Ketaatan Pengguna Jalan	Persen	84	n/a	n/a
22	Meningkatnya Trayek Angkutan Umum	Persentase Izin Trayek Angkutan Umum Yang Aktif	Persen	16,67	n/a	n/a
23	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Persen	53,89	n/a	n/a
24	Meningkatnya kualitas Dermaga Sungai dan Danau	Persentase Dermaga yang sesuai standar	Persen	48,00	n/a	n/a
25	Meningkatnya layanan perizinan	Persentase meningkatnya layanan	Persen	100	n/a	n/a



	angkutan sungai dan danau	perizinan angkutan sungai dan danau				
26	Tersedianya Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Sungai dan Danau	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Sungai dan Danau	Persen	100	n/a	n/a
27	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan Barang	Persentase angkutan umum dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Persen	73,33	n/a	n/a
28	Tersedianya Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Orang dan Barang	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan	Persen	100	n/a	n/a
29	Meningkatnya Kelaikan Transportasi Perhubungan	Persentase Transportasi Perhubungan yang Laik Jalan	Persen	84	n/a	n/a
30	Meningkatnya Kelaikan Uji Laik Jalan	Persentase Pemeriksaan Uji Laik Jalan yang lulus uji	Persen	100	n/a	n/a
31	Meningkatnya Kualitas Sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase kualitas Sarana Prasarana dalam kondisi baik	Persen	100	n/a	n/a
32	Meningkatnya Kawasan Parkir Tertib	Persentase Kawasan Parkir Tertib	Persen	100	n/a	n/a





33	Meningkatnya kualitas Terminal & Halte Sesuai Standar	Persentase terminal & halte yang sesuai standar	Persen	59,37	n/a	n/a
34	Terpenuhinya Prasarana Terminal sesuai standar	Persentase Prasarana terminal yang sesuai standar	Persen	68,75	n/a	n/a
35	Meningkatnya Efektivitas pengawasan parkir	Persentase Pengawasan titik Parkir	Persen	100	n/a	n/a





Realisasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan sektor perhubungan di daerah tersebut. Penilaian kinerja ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta bagaimana pencapaian tersebut dapat disandingkan dengan standar kinerja yang berlaku di tingkat provinsi maupun nasional.

Namun, dalam analisis ini, kami tidak dapat melakukan perbandingan secara langsung dengan standar provinsi dan nasional, karena data terkait kinerja Dinas Perhubungan di tingkat provinsi dan nasional tidak tersedia atau tidak dapat diakses pada saat penyusunan laporan ini. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam menarik kesimpulan yang lebih komprehensif mengenai posisi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dalam konteks yang lebih luas, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Meskipun demikian, berdasarkan realisasi kinerja yang tercatat di Kabupaten Banjar, dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan telah berusaha maksimal dalam mencapai target yang ada, dengan fokus pada peningkatan layanan transportasi, infrastruktur, dan keselamatan di wilayah Kabupaten Banjar. Ke depan, sangat diharapkan adanya penyediaan data yang lebih lengkap baik dari tingkat provinsi maupun nasional, agar perbandingan yang lebih akurat dan objektif dapat dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar sebanding dengan standar yang ada di tingkat provinsi dan nasional.

A.6 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Dalam pencapaian target kinerja sasaran, terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan. Adapun analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah atau akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan sebagai berikut :

1) Terwujudnya kinerja perhubungan berkualitas

Terwujudnya kinerja perhubungan berkualitas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

a) Rasio Konektivitas Kabupaten

Rasio Konektivitas Kabupaten mempunyai target rasio 0,57 dan telah terealisasi rasio 0.53 sehingga memperoleh predikat capaian sangat tinggi dengan nilai 104%.

Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini Adalah:

- karena adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar unit kerja di internal Dinas Perhubungan,





- Adanya komitmen yang tinggi dari masing-masing pengampu kinerja untuk bersama-sama mencapai target kinerja Rasio Konektivitas Dinas Perhubungan, yang ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama pencapaian target kinerja, fasilitas penunjang kerja yang memadai, dukungan dan komitmen instansi dan stakeholder terkait.

Sedangkan faktor penghambat dalam mencapai target capaian ini adalah:

- Luasnya cakupan wilayah kabupaten Banjar yang harus di ampu oleh dinas perhubungan kabupaten Banjar,
- Kurangnya sumber daya manusia dan juga terbatasnya anggaran.

Upaya perbaikan atau solusi yang dilakukan adalah:

- Dalam menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis serta penguatan kompetensi sesuai bidang tugas,
- Melakukan penataan distribusi personel yang lebih proporsional
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan pengawasan dapat membantu meningkatkan produktivitas kerja meskipun dengan jumlah personel yang terbatas.
- Terkait keterbatasan anggaran, Dinas Perhubungan perlu mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan memprioritaskan program yang berdampak langsung terhadap pencapaian sasaran strategis.

b) Tingkat Keselamatan transportasi Daerah Kabupaten/Kota

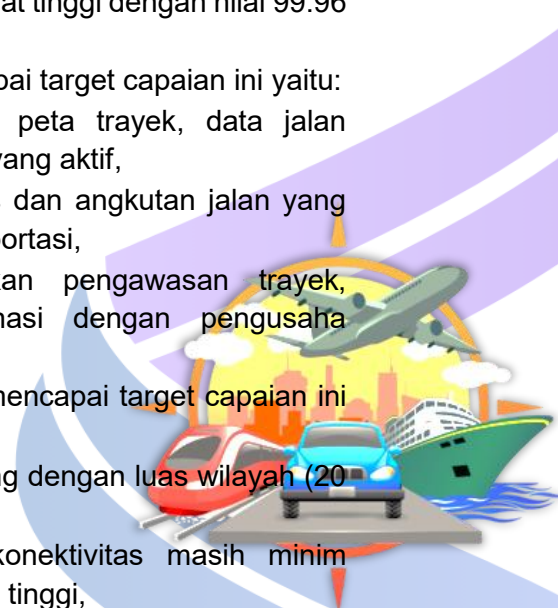
Tingkat Keselamatan transportasi Daerah Kabupaten/Kota mempunyai target 99,5 persen dan telah terealisasi 99,46 persen sehingga memperoleh predikat capaian sangat tinggi dengan nilai 99.96 persen.

Adapun faktor pendorong dalam mencapai target capaian ini yaitu:

- Dinas Perhubungan sudah memiliki peta trayek, data jalan kolektor, serta moda angkutan umum yang aktif,
- Terdapat staf teknis bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang rutin memantau kondisi jaringan transportasi,
- Dinas Perhubungan rutin melakukan pengawasan trayek, pemantauan terminal, dan koordinasi dengan pengusaha transportasi lokal.

Sedangkan faktor penghambat dalam mencapai target capaian ini adalah:

- Jumlah petugas Dishub tidak sebanding dengan luas wilayah (20 kecamatan lebih)
- Survei jaringan jalan dan trayek konektivitas masih minim dikarenakan membutuhkan biaya yang tinggi,





- Data jalan, angkutan umum, dan akses desa yang dimiliki masih tersebar per bidang dan belum terintegrasi secara terpusat,
- Tidak adanya sistem traffic counting otomatis; pemantauan jaringan jalan masih manual,

Upaya perbaikan atau solusi yang dilakukan Adalah:

- Untuk mengatasi keterbatasan jumlah petugas, Dinas Perhubungan perlu mengatur penempatan petugas berdasarkan wilayah prioritas,
- Memperkuat kerja sama dengan kecamatan, desa, dan instansi terkait dalam kegiatan pendataan dan pemantauan,
- Minimnya survei jaringan jalan dan trayek akibat tingginya biaya dapat diatasi dengan penetapan skala prioritas wilayah, pelaksanaan survei secara bertahap, serta kerja sama dengan pihak akademisi atau lembaga teknis,
- Pengelolaan data jalan, angkutan umum, dan akses desa yang masih manual perlu ditingkatkan melalui pengembangan sistem basis data terintegrasi agar perencanaan dan pemantauan lebih cepat dan akurat.

2) Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2025. Target SAKIP pada tahun 2025 sebesar 79 dengan realisasi sebesar 78,58 sehingga memperoleh predikat capaian sangat tinggi dengan nilai 99,47.

Adapun faktor pendorong dalam mencapai target capaian ini yaitu:

- Komitmen pimpinan dan koordinasi antarperangkat daerah menjadi pendorong utama peningkatan nilai SAKIP.
- Pemanfaatan teknologi informasi membantu pengelolaan data dan pelaporan kinerja dan juga evaluasi dan monitoring rutin yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan faktor penghambat dalam mencapai target capaian ini adalah:

- Pemahaman terhadap konsep SAKIP masih rendah di beberapa unit kerja.
- Data kinerja belum terintegrasi dan sulit divalidasi.
- Evaluasi internal belum dilaksanakan secara optimal.
- Indikator kinerja belum menggambarkan hasil (outcome) secara jelas.
- Perubahan kebijakan dan regulasi menyebabkan penyesuaian dokumen perencanaan.

Upaya perbaikan atau solusi yang dilakukan Adalah:

- Untuk mengatasi rendahnya pemahaman konsep SAKIP di beberapa unit kerja, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan secara rutin agar penerapan SAKIP semakin optimal.





- Pengelolaan data kinerja perlu diperbaiki melalui pengembangan sistem data terintegrasi sehingga proses pengumpulan, validasi, dan pelaporan data menjadi lebih mudah dan akurat.
- Evaluasi internal sudah dilaksanakan secara berkala dan terstruktur sebagai dasar perbaikan kinerja,
- Penyusunan indikator kinerja perlu diarahkan pada indikator berbasis hasil (outcome) agar lebih mencerminkan dampak kinerja.

3) Peningkatan Nilai Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Perangkat Daerah

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Nilai IKKI Perangkat Daerah. Nilai IKKI perangkat daerah adalah nilai Indeks Kinerja Kegiatan Instansi yang merupakan hasil penilaian kinerja kegiatan instansi. Target IKKI pada tahun 2025 sebesar 90,25 dengan realisasi sebesar 80,88 sehingga memperoleh predikat capaian sangat tinggi dengan nilai 89,62%.

Adapun faktor pendorong dalam mencapai target capaian ini yaitu:

- Adanya struktur organisasi yang jelas sesuai Permendagri dan regulasi teknis perhubungan. Kehadiran sistem administrasi kepegawaian (absensi digital, evaluasi kinerja ASN).

Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian target Nilai IKKI yaitu:

- Masih belum meratanya pemahaman aparatur terhadap indikator penilaian kinerja internal,
- Keterbatasan jumlah pegawai pada beberapa unit kerja sehingga beban kerja belum seimbang,
- Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi kinerja dalam proses pemantauan dan evaluasi.
- Pelaksanaan evaluasi internal yang belum sepenuhnya rutin dan terdokumentasi dengan baik juga mempengaruhi optimalisasi capaian kinerja.

Upaya perbaikan atau solusi yang dilakukan Adalah:

- Perlu dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkelanjutan terkait indikator dan mekanisme penilaian IKKI kepada seluruh pegawai.
- Penguatan distribusi tugas dan penataan beban kerja perlu dilakukan agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif.
- Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi kinerja serta pelaksanaan evaluasi internal secara rutin dan terstruktur perlu ditingkatkan sebagai dasar perbaikan kinerja berkelanjutan sehingga capaian Nilai IKKI perangkat daerah dapat terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

4) Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu. Target indikator ini pada tahun 2025 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian 100%.

Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah:



- Pemenuhan dokumen yang dibuat sesuai dengan waktu yang ditetapkan,
- Tersedianya data dukung dalam pemenuhan laporan,
- Terjadinya koordinasi yang terjalin baik antar unit kerja di internal Dinas Perhubungan, sehingga memudahkan pengumpulan data perencanaan serta berkonsultasi dengan pihak terkait dalam pemenuhan dokumen dan laporan.

Sedangkan faktor penghambat/penyebab kegagalan untuk indikator ini adalah:

- Perlunya penyesuaian dengan format penyusunan perencanaan yang baru dan menyesuaikan standart biaya terkait penyusunan RKA.

Upaya perbaikan atau solusi yang dilakukan Adalah:

- Perlunya penyesuaian dengan format penyusunan perencanaan yang baru serta perubahan standar biaya dalam penyusunan RKA,
- Perlu dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkala kepada seluruh unit kerja agar memahami ketentuan terbaru.

5) Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu. Target indikator ini pada tahun 2025 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%.

Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah:

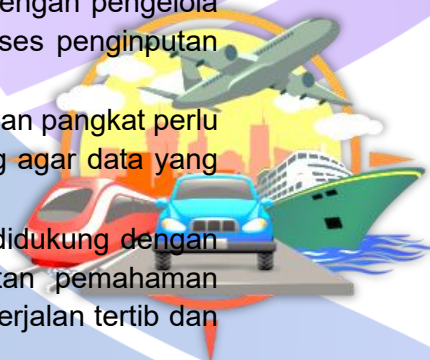
- Data keuangan yang diarsipkan dengan baik,
- Laporan yang terselesaikan,
- SDM yang berkualitas dalam mendukung kinerja keuangan Dinas Perhubungan.

Sedangkan faktor penghambat/penyebab kegagalan untuk indikator ini adalah:

- Sistem SIPD kadang error dan tidak bisa dibuka,
- Penyesuaian pendapatan terkait dengan struktur PNS seperti kenaikan gaji kenaikan pangkat atau berkala yang memerlukan data yang valid dari bagian yang bersangkutan.

Upaya perbaikan atau solusi yang dilakukan Adalah:

- Solusi untuk mengatasi kendala sistem SIPD yang sering mengalami gangguan yaitu perlu dilakukan koordinasi intensif dengan pengelola sistem serta penyiapan waktu cadangan dalam proses penginputan data.
- Penyesuaian pendapatan ASN terkait kenaikan gaji dan pangkat perlu didukung dengan penguatan koordinasi antar bidang agar data yang digunakan selalu valid dan mutakhir.
- Pemisahan pengelolaan gaji ASN dan PPPK perlu didukung dengan penyusunan prosedur yang jelas serta peningkatan pemahaman petugas agar proses pengelolaan keuangan dapat berjalan tertib dan tepat waktu.





6) Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah. Target indikator ini pada tahun 2025 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%.

Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah:

- Adanya partisipasi dan dukungan internal kantor dalam penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan BMD,
- Data dukung yang lengkap sehingga penyusunan laporan dapat berjalan dengan lancar,
- SDM yang kompeten,
- Koordinasi yang berjalan baik antar instansi terkait.

Sedangkan faktor penghambat/penyebab kegagalan untuk indikator ini adalah:

- Kurangnya koordinasi pengurus barang dengan pembuat usulan anggaran
- Kebutuhan Barang yang Berubah ubah
- Terdapat penyesuaian Standar Harga barang terbaru.

Upaya perbaikan atau solusi yang dilakukan adalah

- Solusi untuk mengatasi kurangnya koordinasi antara pengurus barang dan penyusun usulan anggaran adalah perlu dilakukan penguatan komunikasi dan koordinasi secara rutin agar perencanaan kebutuhan barang dapat disusun lebih sinkron dan konsisten.
- Diperlukan penyusunan jadwal pembaruan data kebutuhan barang
- Pemutakhiran secara berkala terhadap Standar Harga terbaru sebagai acuan bersama, sehingga perubahan kebutuhan dan penyesuaian harga dapat diantisipasi sejak awal dan penyusunan anggaran dapat berjalan lebih tepat dan akurat.

7) Lancarnya administrasi kepegawaian daerah

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Target indikator ini pada tahun 2025 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%.

Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah:

- Adanya dukungan anggaran yang tersedia untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek),
- Adanya penawaran Bimtek dari pihak terkait,
- Adanya bimtek yang diadakan secara gratis untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sedangkan faktor penghambat/penyebab kegagalan untuk indikator ini adalah:

- Belum banyak tersedia undangan bimbingan teknis
- Kendala jadwal bimbingan teknis yang tidak ideal





- Anggaran dan target yang tidak sesuai dengan jumlah pegawai Dinas Perhubungan.

Upaya perbaikan atau solusi yang dilakukan Adalah:

- Solusi untuk mengatasi keterbatasan undangan bimbingan teknis serta kendala jadwal dan anggaran yaitu perlu dilakukan perencanaan kebutuhan pelatihan secara lebih terstruktur dengan memprioritaskan pegawai yang paling membutuhkan peningkatan kompetensi.
- Pemanfaatan pelatihan daring dan kerja sama dengan instansi penyelenggara dapat menjadi alternatif untuk memperluas kesempatan mengikuti bimbingan teknis.
- Penyesuaian target pelatihan dengan jumlah pegawai yang tersedia
- Pengalokasian anggaran secara lebih proporsional juga perlu dilakukan agar pengembangan kapasitas pegawai dapat berjalan lebih efektif dan merata.

8) Terselenggaranya kegiatan kantor

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Terselenggaranya kegiatan kantor adalah Persentase Terselenggaranya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran. Indikator ini diperoleh dari perhitungan jumlah penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran yang terfasilitasi dibagi dengan jumlah penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran $\times 100\%$. Target indikator ini pada tahun 2025 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%.

Adapun faktor pendorongnya adalah:

- Tersedianya anggaran dalam mencari bahan/barang yang diinginkan,
- Ketersediaan stok bahan/barang yang diinginkan
- Komunikasi yang jelas, terbuka, dan tepat waktu antara semua pihak yang terlibat.

Sedangkan faktor penghambat/penyebab kegagalan untuk indikator ini adalah:

- Terkendalanya perumusan kebutuhan barang logistik.

Upaya perbaikan atau solusi yang dilakukan Adalah:

- Perlunya dilakukan perencanaan kebutuhan secara lebih sistematis dan terkoordinasi melalui penyusunan daftar kebutuhan barang yang jelas berdasarkan data pemakaian dan rencana kegiatan.
- Penguatan koordinasi antar unit kerja
- Pelaksanaan rapat perencanaan secara berkala dapat membantu menyamakan persepsi dan memastikan kebutuhan barang dirumuskan secara tepat, sehingga proses pengadaan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan.

9) Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Rencana

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan. Indikator ini diperoleh dari perhitungan Jumlah Pengadaan BMD dibagi jumlah





Kebutuhan dikali 100%. Target indikator ini pada tahun 2025 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%.

Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah:

- Alokasi anggaran yang cukup dan penggunaan yang tepat waktu
- Kebijakan dan regulasi yang mendukung pengadaan yang efisien dan efektif.

Faktor penghambat nya yaitu:

- Proses pengadaan yang melibatkan banyak tahapan dan persetujuan dari berbagai pihak sering kali memperlambat pelaksanaan
- Terbatasnya jumlah penyedia barang yang memenuhi spesifikasi dan persyaratan yang ditetapkan.

Upaya perbaikan atau solusi yang dilakukan Adalah:

- Perlunya dilakukan penyederhanaan alur kerja
- Penjadwalan proses pengadaan secara lebih awal agar pelaksanaan kegiatan tidak tertunda.
- Penguatan koordinasi antar pihak yang terlibat dalam proses persetujuan perlu ditingkatkan agar setiap tahapan dapat diselesaikan tepat waktu.
- Terkait terbatasnya jumlah penyedia barang yang memenuhi spesifikasi, diperlukan perluasan jaringan penyedia melalui sosialisasi kebutuhan pengadaan, peninjauan kembali spesifikasi teknis agar tetap sesuai standar namun lebih fleksibel, serta peningkatan pemanfaatan e-katalog dan sistem pengadaan elektronik untuk memperoleh penyedia yang lebih beragam dan kompetitif.

10) Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi. Jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi adalah dokumen umum dan kepegawaian yang dihasilkan selama 1 tahun. Indikator ini diperoleh dari perhitungan Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Target indikator ini pada tahun 2025 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%.

Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah:

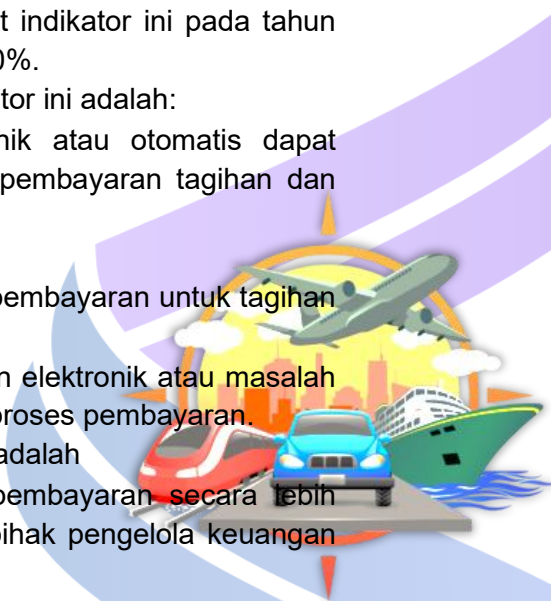
- Penggunaan sistem pembayaran elektronik atau otomatis dapat mempercepat dan mempermudah proses pembayaran tagihan dan juga tersedianya anggaran.

Faktor penghambat nya yaitu:

- Jika anggaran tidak dicairkan tepat waktu, pembayaran untuk tagihan listrik dan air bisa tertunda
- Gangguan teknis dalam sistem pembayaran elektronik atau masalah dengan akses internet dapat menghambat proses pembayaran.

Upaya perbaikan atau solusi yang dilakukan adalah

- Perlunya dilakukan perencanaan jadwal pembayaran secara lebih awal serta penguatan koordinasi dengan pihak pengelola keuangan agar dana tersedia tepat waktu.





- Penyiapan dana cadangan operasional dapat menjadi langkah antisipatif agar pembayaran tagihan listrik dan air tetap dapat dilakukan sesuai jadwal.
- Terkait gangguan teknis sistem pembayaran elektronik dan akses internet, perlu disiapkan alternatif jalur pembayaran serta peningkatan kualitas jaringan dan pemeliharaan sistem secara berkala agar proses pembayaran dapat berjalan lancar dan tidak mengganggu operasional kantor.

11) Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Barang milik daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan adalah dokumen umum dan kepegawaian Dinas Perhubungan yang dihasilkan selama 1 tahun. Indikator ini diperoleh dari perhitungan jumlah barang milik daerah yang terpelihara dibagi dengan barang milik daerah sesuai RKBMD $\times 100\%$. Target indikator ini pada tahun 2025 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%.

Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah:

- Tersedianya anggaran dan ketersediaan stok barang/sparepart yang diinginkan.

Faktor penghambat nya yaitu:

- Sulitnya mencari bengkel yang sesuai keinginan dan juga jarak bengkel yang sesuai terlalu jauh.

Upaya perbaikan atau solusi yang dilakukan adalah

- Perlu dilakukan pendataan dan penetapan daftar bengkel rekanan yang memenuhi standar teknis dan berada lebih dekat dengan lokasi kerja.
- Kerja sama dengan bengkel resmi atau bengkel lokal yang kompeten dapat diperluas agar pilihan layanan perawatan semakin banyak.
- Perencanaan jadwal pemeliharaan secara lebih teratur juga perlu dilakukan agar perawatan kendaraan dapat dilaksanakan lebih efisien dan tidak terkendala jarak maupun ketersediaan bengkel.

12) Meningkatnya kualitas Terminal & Halte Sesuai Standar

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase terminal & halte yang sesuai standar dengan target 56,34 % dan telah terealisasi 59,37 % sehingga memperoleh predikat tinggi dengan nilai 105,38 %. Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan (Bobot keterpenuhan terminal (fasilitas utama dan pendukung) $\times$ realisasi keterpenuhan terminal) + (Bobot ketersediaan Prasarana Jalan $\times$ realisasi ketersediaan Prasarana Jalan).

Faktor pendorong meningkatnya persentase terminal dan halte yang sesuai standar antara lain:

- Adanya regulasi dan standar teknis yang jelas, dukungan pendanaan dari pemerintah, program revitalisasi sarana transportasi, serta meningkatnya kesadaran akan keselamatan, kenyamanan, dan aksesibilitas pengguna (termasuk difabel).



Faktor penghambatnya yaitu:

- Adanya keterbatasan anggaran, kondisi infrastruktur lama yang sulit disesuaikan dengan standar baru,
- Keterbatasan lahan pembangunan,
- Lemahnya pengawasan dan pemeliharaan,
- Rendahnya koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan terminal dan halte.

Upaya perbaikan atau solusi yang dilakukan adalah

- Perlu dilakukan penetapan skala prioritas pembangunan dan pemeliharaan terminal serta halte pada lokasi yang paling strategis, disertai upaya penguatan dukungan pendanaan dari pemerintah provinsi, pusat, maupun kerja sama dengan pihak swasta.
- Kondisi infrastruktur lama yang sulit disesuaikan dengan standar baru dapat diatasi melalui program rehabilitasi dan penyesuaian bertahap sesuai kemampuan anggaran.
- Keterbatasan lahan perlu disikapi dengan perencanaan tata ruang yang lebih optimal serta pemanfaatan lahan secara efisien.
- Penguatan fungsi pengawasan dan pemeliharaan secara rutin
- Peningkatan koordinasi antarinstansi terkait perlu dilakukan agar pengelolaan terminal dan halte dapat berjalan lebih terpadu, berkelanjutan, dan sesuai standar yang ditetapkan.

13) Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan danau

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik dengan target 51,67 % dan terealisasi 53,89 % sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 104,03%. Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan $\text{Bobot keterpenuhan dermaga dikali realisasi keterpenuhan dermaga} + (\text{Bobot ketersediaan kapal yang sesuai standar dikali realisasi ketersediaan kapal yang sesuai standar sehingga mendapat capaian sangat tinggi.}$

Faktor pendorong meningkatnya persentase angkutan sungai dan danau dengan kinerja pelayanan yang baik antara lain:

- Adanya peningkatan sarana dan prasarana transportasi air,
- Peremajaan armada angkutan sungai,
- Penerapan standar keselamatan dan pelayanan,
- Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga konektivitas wilayah perairan.
- Peran operator dan awak kapal yang kompeten juga turut meningkatkan kualitas layanan.

Faktor penghambatnya yaitu:

- Kondisi alam dan cuaca yang tidak menentu,
- Pendangkalan sungai dan danau,
- Keterbatasan anggaran untuk perawatan armada dan dermaga,
- Rendahnya kepatuhan terhadap standar pelayanan,
- Lemahnya pengawasan dan pembinaan terhadap operator angkutan.

Upaya perbaikan atau solusi yang dilakukan adalah:





- Perlu dilakukan pemantauan rutin kondisi perairan
- Pelaksanaan pengerukan secara bertahap pada jalur-jalur prioritas.
- Keterbatasan anggaran perawatan armada dan dermaga dapat diatasi melalui penetapan skala prioritas pemeliharaan serta penguatan dukungan pendanaan dari pemerintah provinsi, pusat, maupun kerja sama dengan pihak swasta.
- Rendahnya kepatuhan terhadap standar pelayanan perlu ditindaklanjuti dengan sosialisasi standar layanan, penguatan pengawasan,
- Penerapan sanksi dan pembinaan secara konsisten kepada operator angkutan agar kualitas pelayanan angkutan sungai dan danau dapat terus meningkat.

14) Terpenuhinya Prasarana jalan yang sesuai standar

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Prasarana jalan yang sesuai standar dengan target 47% dan telah terealisasi 50% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 106,38%. Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan Jumlah Prasarana Jalan yang tersedia dibagi kebutuhan Prasarana Jalan dikali 100% dan mendapat capaian sangat tinggi.

Faktor pendorong meningkatnya persentase prasarana jalan yang sesuai standar antara lain adalah:

- Adanya perencanaan pembangunan jalan yang berbasis standar teknis,
- Mempunyai alokasi anggaran yang memadai,
- Program peningkatan dan pemeliharaan jalan secara berkala,
- Pemanfaatan teknologi dan pengawasan kualitas konstruksi yang lebih baik.

Faktor penghambatnya meliputi:

- Tingginya beban lalu lintas yang mempercepat kerusakan jalan,
- Kondisi geografis dan cuaca ekstrem,
- Kualitas pelaksanaan konstruksi yang belum optimal,
- Lemahnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelanggaran pemanfaatan jalan.

Upaya perbaikan atau solusi yang dilakukan Adalah:

- Perlu dilakukan penetapan skala prioritas penanganan ruas jalan berdasarkan tingkat kerusakan dan volume lalu lintas
- Penguatan dukungan pendanaan dari pemerintah kabupaten.
- Tingginya beban lalu lintas dan pengaruh kondisi geografis
- Kualitas pelaksanaan konstruksi perlu ditingkatkan dengan penguatan pengendalian mutu dan pengawasan lapangan yang lebih ketat.
- Pengendalian dan pengawasan terhadap pelanggaran pemanfaatan jalan perlu diperkuat melalui penegakan aturan,
- Sosialisasi kepada pengguna jalan, serta koordinasi dengan instansi terkait agar kondisi prasarana jalan dapat terjaga sesuai standar.

15) Meningkatkan kualitas Dermaga Sungai dan Danau





Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Dermaga yang sesuai standar dengan target 45% dan terealisasi 48% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 106,67%. Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan Jumlah Dermaga/Shelter * bobot 25% + Kondisi Dermaga * bobot 25% + Perencanaan * bobot 25% + Pengawasan * bobot 25% sehingga mendapat capaian sangat tinggi.

Faktor pendorongnya meliputi:

- Adanya regulasi teknis kepelabuhanan,
- program pembangunan dan rehabilitasi dermaga,
- Dukungan pendanaan untuk meningkatkan keselamatan dan kelayakan operasional.

Faktor penghambatnya antara lain:

- Keterbatasan anggaran,
- Kondisi bangunan dermaga yang sudah lama,
- Kerusakan akibat faktor alam,
- Kurangnya pemeliharaan rutin.

Upaya perbaikan atau solusi yang dilakukan adalah

- Perlu dilakukan penetapan skala prioritas rehabilitasi dermaga pada lokasi yang paling strategis
- Penguatan dukungan pendanaan dari pemerintah kabupaten maupun kerja sama dengan pihak swasta.
- Kondisi bangunan lama dan kerusakan akibat faktor alam perlu ditangani melalui program rehabilitasi dan perkuatan struktur secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.
- Pelaksanaan pemeliharaan rutin perlu ditingkatkan melalui penyusunan jadwal perawatan yang teratur dan penguatan pengawasan agar kondisi dermaga tetap terjaga, aman, dan layak operasional.

16) Terpenuhinya Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpenuhi dengan target 60% dan telah terealisasi 68,98% sehingga memperoleh predikat sedang dengan nilai 114,97%. Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan jumlah perlengkapan jalan yang tersedia dibagi kebutuhan perlengkapan jalan dan mendapat capaian sangat tinggi.

Faktor pendorongnya adalah:

- Komitmen pemerintah dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas,
- Ketersediaan standar perlengkapan jalan,
- Program pengadaan dan pemasangan rambu, marka, dan APILL.

Faktor penghambatnya meliputi:

- Keterbatasan anggaran, vandalisme, kerusakan akibat cuaca, serta kurangnya pengawasan dan pemeliharaan.

Upaya perbaikan atau solusi yang dilakukan adalah





- Perlu dilakukan penetapan skala prioritas pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi rawan kecelakaan serta penguatan dukungan pendanaan dari pemerintah provinsi dan pusat.
- Vandalisme dapat diminimalkan melalui peningkatan sosialisasi kepada masyarakat serta penguatan pengawasan bersama aparat terkait.
- Kerusakan akibat cuaca perlu diantisipasi dengan penggunaan material yang lebih tahan terhadap kondisi lingkungan.
- Pengawasan dan pemeliharaan perlengkapan jalan perlu ditingkatkan melalui inspeksi rutin dan perbaikan berkala agar fungsi rambu, marka, dan APILL tetap optimal dalam mendukung keselamatan lalu lintas.

17) Meningkatkan Kelancaran Lalu Lintas

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah V/C Ratio Jalan di Kabupaten dengan target V/C ratio 0,37 dan telah terealisasi 0,42 rasio memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 113,51%. V/C ratio yaitu perbandingan volume dengan kapasitas. Apabila nilai VC ratio telah mencapai nilai 0,8 atau lebih besar, maka dapat dikategorikan arus telah mendekati kapasitas, sehingga perlu dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Sedangkan V/C Ratio Kabupaten Banjar tahun 2025 adalah 0,42 (Tingkat Pelayanan) sehingga telah mencapai target tahunan.

Faktor pendorongnya yaitu:

- Membaiknya V/C ratio antara lain peningkatan kapasitas jalan, pengembangan jaringan jalan alternatif, serta penerapan manajemen lalu lintas.

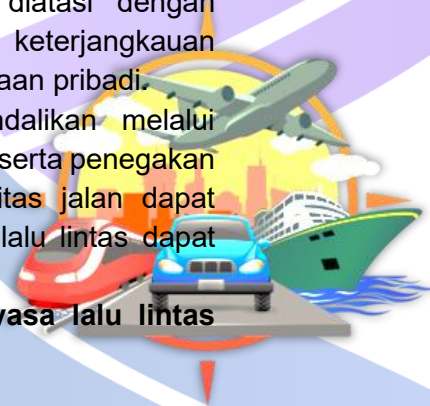
Faktor penghambatnya meliputi:

- Pertumbuhan volume lalu lintas yang cepat,
- Keterbatasan ruang jalan,
- Rendahnya penggunaan angkutan umum,
- Aktivitas samping jalan yang tinggi.

Upaya perbaikan atau solusi yang dilakukan adalah

- Perlu dilakukan pengaturan lalu lintas yang lebih efektif melalui rekayasa lalu lintas, pengaturan simpang, serta pengembangan jalur alternatif.
- Rendahnya penggunaan angkutan umum perlu diatasi dengan peningkatan kualitas layanan, kenyamanan, dan keterjangkauan angkutan umum agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi.
- Aktivitas samping jalan yang tinggi perlu dikendalikan melalui penertiban parkir, pengaturan aktivitas perdagangan, serta penegakan aturan pemanfaatan ruang jalan, sehingga kapasitas jalan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan kelancaran lalu lintas dapat terjaga.

18) Meningkatnya penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada pusat kegiatan dan ruas jalan/ persimpangan





Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan target 100% dan telah terealisasi 100% dan memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 100%. Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan Manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dapat diterapkan dibagi kebutuhan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dikali 100%.

Faktor pendorongnya adalah:

- Adanya kebijakan dan pedoman teknis, peningkatan kapasitas SDM perhubungan, serta dukungan data dan teknologi lalu lintas.

Faktor penghambatnya meliputi

- Keterbatasan SDM dan anggaran, kurangnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya kepatuhan pengguna jalan.

Upaya perbaikan atau solusi yang dilakukan adalah

- Perlu dilakukan penetapan skala prioritas kegiatan serta peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi secara optimal.
- Kurangnya koordinasi lintas sektor dapat diatasi dengan penguatan forum koordinasi dan komunikasi rutin antar instansi terkait agar pelaksanaan kebijakan berjalan lebih terpadu.
- Rendahnya kepatuhan pengguna jalan perlu ditindaklanjuti melalui peningkatan sosialisasi, edukasi keselamatan lalu lintas, serta penegakan hukum secara konsisten agar penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

19) Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan andalalin

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin dengan target 72,5% dan telah terealisasi 75% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 103,45%. Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan Objek wajib andalalin yang memiliki rekomendasi dibagi potensi objek wajib andalalin dikali 100%.

Faktor pendorongnya meliputi:

- Penegakan regulasi andalalin,
- Meningkatnya kesadaran pengembang,
- Proses perizinan yang terintegrasi dengan persyaratan andalalin.

Faktor penghambatnya antara lain:

- Lemahnya pengawasan dan sanksi, kurangnya pemahaman pengembang, serta anggapan bahwa andalalin menambah biaya dan waktu pembangunan.

Upaya perbaikan atau solusi yang dilakukan adalah

- Perlu dilakukan penguatan fungsi pengawasan secara rutin serta penerapan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran ketentuan andalalin.
- Kurangnya pemahaman pengembang dapat diatasi melalui peningkatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan sejak tahap perencanaan pembangunan.





20) Meningkatnya penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada pusat kegiatan dan ruas jalan/ persimpangan

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan target 100% dan telah terealisasi 100% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 100%. Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan Manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dapat diterapkan dibagi kebutuhan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dikali 100%.

Faktor pendorongnya adalah:

- Adanya kebijakan dan pedoman teknis,
- Peningkatan kapasitas SDM perhubungan,
- Dukungan data dan teknologi lalu lintas.

Faktor penghambatnya meliputi:

- Keterbatasan SDM dan anggaran,
- Kurangnya koordinasi lintas sektor,
- Rendahnya kepatuhan pengguna jalan.

Upaya perbaikan atau solusi yang dilakukan adalah

- Perlu dilakukan penetapan skala prioritas kegiatan
- Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi secara optimal.
- Kurangnya koordinasi lintas sektor dapat diatasi dengan penguatan forum koordinasi dan komunikasi rutin antarinstansi terkait agar pelaksanaan kebijakan berjalan lebih terpadu.
- Rendahnya kepatuhan pengguna jalan perlu ditindaklanjuti melalui peningkatan sosialisasi, edukasi keselamatan lalu lintas, serta penegakan hukum secara konsisten agar penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

21) Meningkatnya Ketaatan dan keselamatan Berlalu Lintas

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Ketaatan Pengguna Jalan dengan target 85,5% dan telah terealisasi 84% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 98,25%. Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan Kondisi yang diharapkan (100%) dikurangi persentase jumlah pelanggaran.

Faktor pendorong meningkatnya ketaatan pengguna jalan antara lain:

- Adanya penegakan hukum lalu lintas yang konsisten,
- Kegiatan sosialisasi dan edukasi keselamatan berlalu lintas,
- Ketersediaan rambu dan perlengkapan jalan yang memadai.
- Dukungan teknologi seperti tilang elektronik dan pengawasan berbasis kamera juga berperan dalam membentuk perilaku tertib berlalu lintas.

Faktor penghambatnya meliputi:

- Rendahnya kesadaran dan disiplin sebagian pengguna jalan,
- Budaya berlalu lintas yang belum tertib,
- keterbatasan personel pengawasan,
- Lemahnya efek jera dari sanksi yang diterapkan.

Upaya perbaikan atau solusi yang dilakukan adalah





- Perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi keselamatan lalu lintas secara berkelanjutan kepada masyarakat.
- Keterbatasan personel pengawasan dapat diatasi melalui penguatan kerja sama dengan kepolisian, pemanfaatan teknologi pemantauan, serta pengaturan jadwal pengawasan yang lebih efektif.
- Lemahnya efek jera dari sanksi perlu ditindaklanjuti dengan penerapan penegakan hukum yang lebih tegas, konsisten, dan transparan agar dapat meningkatkan kepatuhan serta menciptakan budaya berlalu lintas yang lebih tertib dan aman.

22) Meningkatnya Trayek Angkutan Umum

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Izin Trayek Angkutan Umum Yang Aktif. Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan Jumlah Trayek yang Aktif dibagi Jumlah Trayek yang Ditetapkan kali 100%. Target sasaran ini yaitu 16,67% dan telah terealisasi 16,67% memperoleh predikat capaian tinggi 100%.

Faktor pendorong tingginya persentase izin trayek yang aktif meliputi:

- Kebutuhan masyarakat terhadap layanan angkutan umum,
- Kemudahan proses perizinan, serta pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap operator angkutan.
- Stabilitas pendapatan operator juga mendorong mereka untuk tetap mengaktifkan izin trayek.

Faktor penghambatnya antara lain:

- Menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum,
- Persaingan dengan angkutan tidak berizin,
- Kondisi armada yang tidak layak,
- Beban biaya operasional yang cukup tinggi.

Upaya perbaikan atau solusi yang dilakukan adalah

- Solusi untuk mengatasi menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum, perlu dilakukan peningkatan kualitas layanan, kenyamanan, ketepatan waktu, serta tarif yang terjangkau.
- Persaingan dengan angkutan tidak berizin perlu ditangani melalui penegakan aturan dan penertiban secara konsisten.
- Kondisi armada yang tidak layak perlu diperbaiki melalui program peremajaan dan pemeliharaan kendaraan secara berkala.
- Tingginya beban biaya operasional dapat diatasi melalui efisiensi operasional, dukungan subsidi, serta kerja sama dengan pemerintah daerah agar keberlangsungan layanan angkutan umum tetap terjaga.

23) Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik. Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan Bobot keterpenuhan dermaga dikali realisasi keterpenuhan dermaga + (Bobot ketersediaan kapal yang sesuai standar dikali realisasi ketersediaan kapal yang sesuai standar. Target sasaran ini adalah 46,89 % dan telah terealisasi 53,89 % sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 114,93%.



Faktor pendorong meningkatnya persentase angkutan sungai dan danau dengan kinerja pelayanan yang baik antara lain:

- Adanya peningkatan sarana dan prasarana transportasi air, peremajaan armada, penerapan standar keselamatan dan pelayanan,
- Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga konektivitas wilayah perairan.
- Peran operator dan awak kapal yang kompeten juga turut meningkatkan kualitas layanan.

Faktor penghambatnya meliputi:

- Kondisi alam dan cuaca yang tidak menentu,
- Pendangkalan sungai dan danau,
- Keterbatasan anggaran untuk perawatan armada dan dermaga,
- Rendahnya kepatuhan terhadap standar pelayanan, serta lemahnya pengawasan dan pembinaan terhadap operator angkutan.

Upaya perbaikan atau solusi yang dilakukan adalah

- Solusi untuk mengatasi pengaruh kondisi alam dan cuaca yang tidak menentu serta pendangkalan sungai dan danau, perlu dilakukan pemantauan rutin kondisi perairan serta pelaksanaan pengerukan secara bertahap pada jalur-jalur prioritas.
- Keterbatasan anggaran perawatan armada dan dermaga dapat diatasi melalui penetapan skala prioritas pemeliharaan serta penguatan dukungan pendanaan dari pemerintah provinsi, pusat, maupun kerja sama dengan pihak swasta.
- Rendahnya kepatuhan terhadap standar pelayanan perlu ditindaklanjuti dengan sosialisasi standar layanan, penguatan pengawasan, serta penerapan sanksi dan pembinaan secara konsisten kepada operator angkutan agar kualitas pelayanan angkutan sungai dan danau dapat terus meningkat.

24) Meningkatkan kualitas Dermaga Sungai dan Danau

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Dermaga yang sesuai standar dengan target 45% dan terealisasi 48% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 106,67%. Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan Jumlah Dermaga/Shelter * bobot 25% + Kondisi Dermaga * bobot 25% + Perencanaan * bobot 25% + Pengawasan * bobot 25% sehingga mendapat capaian sangat tinggi.

Faktor pendorongnya meliputi:

- Adanya regulasi teknis kepelabuhanan,
- Program pembangunan dan rehabilitasi dermaga,
- Dukungan pendanaan untuk meningkatkan keselamatan dan kelayakan operasional.

Faktor penghambatnya antara lain:

- Keterbatasan anggaran,
- kondisi bangunan lama,
- kerusakan akibat faktor alam,
- serta kurangnya pemeliharaan rutin.





Upaya perbaikan atau solusi yang dilakukan adalah

- Solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran, perlu dilakukan penetapan skala prioritas penanganan serta penguatan dukungan pendanaan dari pemerintah Kabupaten, maupun kerja sama dengan pihak swasta.
- Kondisi bangunan lama dan kerusakan akibat faktor alam perlu ditangani melalui program rehabilitasi dan perkuatan bangunan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.
- Selain itu, pemeliharaan rutin perlu ditingkatkan melalui penyusunan jadwal perawatan yang teratur dan penguatan pengawasan agar kondisi bangunan tetap terjaga, aman, dan layak digunakan.

25) Meningkatkan layanan perizinan angkutan sungai dan danau

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase meningkatnya layanan perizinan angkutan sungai dan danau. Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan Jumlah angkutan Sungai dan Danau yang berizin dibagi jumlah seluruh Angkutan Sungai dan Danau yang Beroperasi. Target sasaran ini yaitu 9% dan telah terealisasi 7% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 77,78%.

Faktor pendorong peningkatan layanan perizinan angkutan sungai dan danau antara lain:

- Penyederhanaan prosedur perizinan,
- Pemanfaatan sistem pelayanan berbasis digital,
- Serta meningkatnya kesadaran operator akan pentingnya legalitas dan keselamatan angkutan.
- Dukungan kebijakan pemerintah daerah juga turut memperkuat pelayanan ini.

Adapun faktor penghambatnya meliputi:

- Keterbatasan SDM pengelola perizinan,
- Akses informasi yang belum merata,
- serta rendahnya pemahaman sebagian operator terhadap prosedur perizinan yang berlaku.

Upaya perbaikan atau solusi yang dilakukan adalah

- Solusi untuk mengatasi keterbatasan SDM pengelola perizinan, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan serta penataan distribusi tugas yang lebih proporsional.
- Akses informasi yang belum merata dapat diperbaiki melalui pengembangan media informasi digital dan sosialisasi langsung kepada operator angkutan.
- Rendahnya pemahaman terhadap prosedur perizinan perlu ditindaklanjuti dengan bimbingan teknis, pendampingan, serta penyediaan panduan perizinan yang jelas dan mudah dipahami agar proses perizinan dapat berjalan lebih tertib, cepat, dan sesuai ketentuan.

26) Tersedianya Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Sungai dan Danau





Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Sungai dan Danau. Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan Jumlah Dokumen yang Direalisasikan dibagi dengan dokumen yang direncanakan kali 100%. Target sasaran ini yaitu 100% dan telah terealisasi 100% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 100%.

Faktor pendorong tersedianya dokumen usulan penetapan tarif antara lain:

- Adanya kebutuhan akan kepastian tarif bagi operator dan pengguna jasa, dukungan regulasi, serta ketersediaan data operasional sebagai dasar penyusunan tarif.
- Koordinasi antara pemerintah daerah, operator, dan pemangku kepentingan lainnya juga berperan penting.

Faktor penghambatnya meliputi:

- Keterbatasan data yang akurat,
- Kapasitas teknis dalam penyusunan kajian tarif, serta perbedaan kepentingan antara operator dan pengguna jasa.

Upaya perbaikan atau solusi yang dilakukan adalah

- Solusi untuk mengatasi keterbatasan data yang akurat,
- Perlu dilakukan penguatan sistem pendataan dan pengumpulan data secara berkala agar tersedia data yang valid sebagai dasar penyusunan tarif.
- Keterbatasan kapasitas teknis dapat diatasi melalui peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan serta kerja sama dengan tenaga ahli atau lembaga teknis.
- Perbedaan kepentingan antara operator dan pengguna jasa perlu dijembatani melalui forum konsultasi dan dialog bersama agar penetapan tarif dapat mempertimbangkan keseimbangan antara kelangsungan usaha operator dan keterjangkauan bagi masyarakat.

27) Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan Barang

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase angkutan umum dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik. Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan Jumlah trayek angkutan umum dengan kinerja tingkat pelayanan yang baik dibagi jumlah trayek angkutan umum yang ada dikali 100%. Target sasaran ini yaitu 70% dan telah terealisasi 73,33% sehingga memperoleh capaian predikat rendah dengan nilai 104,76%.

Faktor pendorong meningkatnya kinerja pelayanan angkutan umum antara lain:

- Memiliki armada yang sudah diremajakan,
- Penerapan standar pelayanan minimal,
- Peningkatan kompetensi pengemudi dan awak,
- Serta pengawasan dan evaluasi kinerja secara berkala.
- Dukungan kebijakan dan insentif bagi operator juga mendorong peningkatan kualitas layanan.





Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi:

- Ada beberapa usia armada yang sudah tua,
- Rendahnya tingkat okupansi penumpang,
- serta persaingan dengan kendaraan pribadi dan angkutan informal.

Upaya perbaikan atau solusi yang dilakukan adalah

- Solusi untuk mengatasi keterbatasan modal operator dan usia armada yang sudah tua, perlu diberikan dukungan pembiayaan melalui skema kredit lunak, subsidi, atau program peremajaan armada.
- Rendahnya tingkat okupansi penumpang dapat diatasi dengan peningkatan kualitas layanan, penyesuaian rute sesuai kebutuhan masyarakat, serta promosi penggunaan angkutan umum.
- Persaingan dengan kendaraan pribadi dan angkutan informal perlu ditangani melalui penegakan aturan, penertiban angkutan tidak resmi, serta pengembangan kebijakan yang mendorong masyarakat beralih ke angkutan umum yang aman, nyaman, dan terjangkau.

28) Tersedianya Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Orang dan Barang

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan. Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan Jumlah Dokumen yang Direalisasikan dibagi dengan dokumen yang direncanakan kali 100%. Dokumen ini dibuat dengan dasar dari kajian usulan penetapan tarif sesuai dengan kondisi di lapangan. Target sasaran ini yaitu 100% dan telah terealisasi 100% sehingga memperoleh capaian predikat sangat tinggi dengan nilai 100%.

Faktor pendorong meningkatnya ketersediaan dokumen usulan penetapan tarif angkutan antara lain

- Adanya kebutuhan akan kepastian tarif yang adil bagi masyarakat dan operator,
- Dukungan regulasi yang mengatur mekanisme penetapan tarif,
- serta meningkatnya kapasitas teknis pemerintah daerah dalam menyusun kajian tarif.
- Ketersediaan data biaya operasional kendaraan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan turut mendukung penyusunan dokumen ini.

Faktor penghambatnya meliputi:

- Keterbatasan data yang akurat dan terkini,
- Keterbatasan SDM yang memahami analisis tarif, serta perbedaan kepentingan antara operator dan pengguna jasa.

Upaya perbaikan atau solusi yang dilakukan adalah

- Solusi untuk mengatasi keterbatasan data yang akurat dan terkini, perlu dilakukan penguatan sistem pendataan dan pembaruan data secara berkala agar tersedia data yang valid sebagai dasar analisis tarif.





- Keterbatasan SDM yang memahami analisis tarif dapat diatasi melalui pelatihan teknis, peningkatan kompetensi, serta kerja sama dengan tenaga ahli atau lembaga terkait.
- Perbedaan kepentingan antara operator dan pengguna jasa perlu dijembatani melalui forum konsultasi dan dialog bersama agar penetapan tarif dapat mempertimbangkan keseimbangan antara keberlanjutan usaha operator dan keterjangkauan bagi masyarakat.

29) Meningkatkan Kelaikan Transportasi Perhubungan

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Transportasi Perhubungan yang Laik Jalan. Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan (Jumlah Hasil Pemeriksaan Kendaraan yang lulus uji / Target Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar Tahun N) X 100%. Target sasaran ini yaitu 79% dan telah terealisasi 84% sehingga memperoleh predikat capaian sedang dengan nilai 106,33%.

Faktor pendorong meningkatnya persentase transportasi perhubungan yang laik jalan meliputi:

- Penerapan standar keselamatan kendaraan, pelaksanaan pengujian kendaraan secara berkala, serta kesadaran operator dan pemilik kendaraan akan pentingnya keselamatan dan kelayakan operasional.
- Dukungan fasilitas pengujian dan pengawasan dari pemerintah juga berperan penting.

Adapun faktor penghambatnya antara lain:

- Usia kendaraan yang sudah tua,
- Keterbatasan biaya perawatan,
- Rendahnya kepatuhan sebagian operator terhadap ketentuan teknis,
- Serta lemahnya pengawasan di lapangan.

Upaya perbaikan atau solusi yang dilakukan adalah

- Solusi untuk mengatasi usia kendaraan yang sudah tua dan keterbatasan biaya perawatan, perlu didorong program peremajaan armada serta pemberian dukungan pembiayaan atau subsidi perawatan.
- Rendahnya kepatuhan operator terhadap ketentuan teknis perlu ditindaklanjuti melalui peningkatan sosialisasi aturan, pembinaan, serta penerapan sanksi secara konsisten.
- Lemahnya pengawasan di lapangan dapat diatasi dengan penguatan jumlah dan kapasitas petugas, penjadwalan pemeriksaan rutin, serta pemanfaatan teknologi pengawasan agar kelaikan kendaraan dapat terjaga dan keselamatan transportasi semakin meningkat.

30) Meningkatkan Kelaikan Uji Laik Jalan

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Pemeriksaan Uji Laik Jalan yang lulus uji. Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan jumlah Kendaraan yang lulus uji / Jumlah Kendaraan yang diuji x 100%. Target sasaran ini yaitu 100% dan telah terealisasi 100% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 100%.





Faktor pendorong tingginya persentase kelulusan uji laik jalan antara lain:

- Kondisi kendaraan yang terawat,
- pemahaman pemilik kendaraan terhadap persyaratan teknis,
- serta ketersediaan sarana dan prasarana pengujian yang memadai.
- Pembinaan dan sosialisasi sebelum pelaksanaan uji juga membantu meningkatkan tingkat kelulusan.

Faktor penghambatnya meliputi:

- Masih banyaknya kendaraan yang tidak memenuhi standar teknis,
- kurangnya perawatan rutin,
- serta keterbatasan waktu dan biaya yang dialokasikan pemilik kendaraan untuk mempersiapkan uji.

Upaya perbaikan atau solusi yang dilakukan adalah

- Solusi untuk mengatasi banyaknya kendaraan yang belum memenuhi standar teknis dan kurangnya perawatan rutin, perlu ditingkatkan sosialisasi kepada pemilik kendaraan mengenai pentingnya pemeliharaan berkala serta kepatuhan terhadap standar keselamatan.
- Keterbatasan waktu dan biaya pemilik kendaraan dapat diatasi dengan penyediaan jadwal uji yang lebih fleksibel, pelayanan yang lebih cepat, serta pemberian kemudahan informasi dan bimbingan teknis sebelum pelaksanaan uji.
- Dengan langkah tersebut, kesiapan kendaraan dalam mengikuti uji laik jalan dapat meningkat dan tingkat kelulusan uji dapat lebih optimal.

31) Meningkatkan Kualitas Sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase kualitas Sarana Prasarana dalam kondisi baik. Realisasi Indikator ini berasal dari Jumlah Sarana Prasarana PKB dalam keadaan baik/Jumlah Sarana Prasarana PKB X 100%. Target sasaran ini yaitu 100% dan telah terealisasi 100% sehingga memperoleh predikat tinggi dengan nilai 100%.

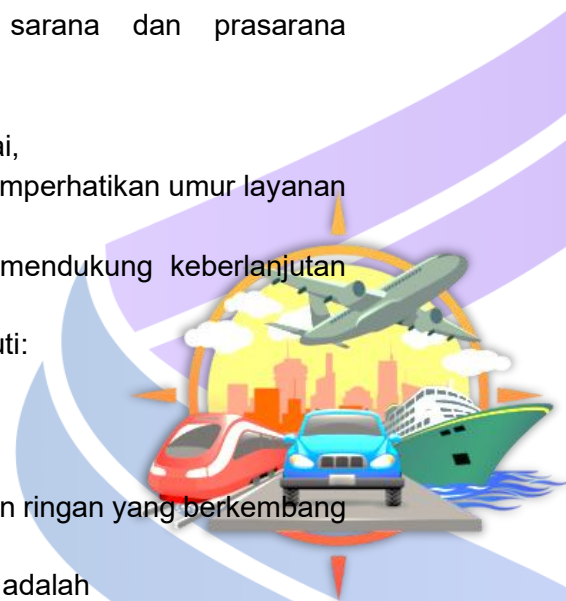
Faktor pendorong terjaganya kualitas sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik antara lain:

- Adanya program pemeliharaan rutin,
- Alokasi anggaran perawatan yang memadai,
- serta perencanaan pembangunan yang memperhatikan umur layanan aset.
- Pengawasan dan evaluasi berkala juga mendukung keberlanjutan kualitas infrastruktur.

Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi:

- Keterbatasan anggaran pemeliharaan,
- Intensitas penggunaan yang tinggi,
- Pengaruh cuaca dan kondisi lingkungan,
- Serta keterlambatan penanganan kerusakan ringan yang berkembang menjadi kerusakan berat.

Upaya perbaikan atau solusi yang dilakukan adalah





- Solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemeliharaan, perlu dilakukan penetapan skala prioritas penanganan sarana prasarana berdasarkan tingkat kerusakan dan intensitas penggunaan.
- Pengaruh cuaca dan kondisi lingkungan perlu diantisipasi melalui peningkatan kualitas material serta perencanaan pemeliharaan yang lebih adaptif.
- Keterlambatan penanganan kerusakan ringan dapat diatasi dengan penguatan inspeksi rutin dan pelaksanaan perbaikan sejak dini agar kerusakan tidak berkembang menjadi lebih berat, sehingga kondisi sarana prasarana dapat tetap terjaga dan layak digunakan.

32) Meningkatnya Kawasan Parkir Tertib

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Kawasan Parkir Tertib. Realisasi Indikator ini berasal dari jumlah titik parkir yang memiliki ijin dibagi jumlah seluruh target titik parkir yang dalam pembinaan dishub dikali 100%. Target sasaran ini yaitu 100% dan telah terealisasi 100% sehingga memperoleh predikat tinggi dengan nilai 100%.

Faktor pendorong meningkatnya persentase kawasan parkir tertib antara lain:

- Adanya penataan dan penetapan lokasi parkir yang jelas,
- Penerapan regulasi perparkiran,
- serta pengawasan yang konsisten oleh petugas.
- Dukungan sarana pendukung seperti rambu parkir, marka, dan sistem parkir berbasis teknologi juga membantu meningkatkan ketertiban.

Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi:

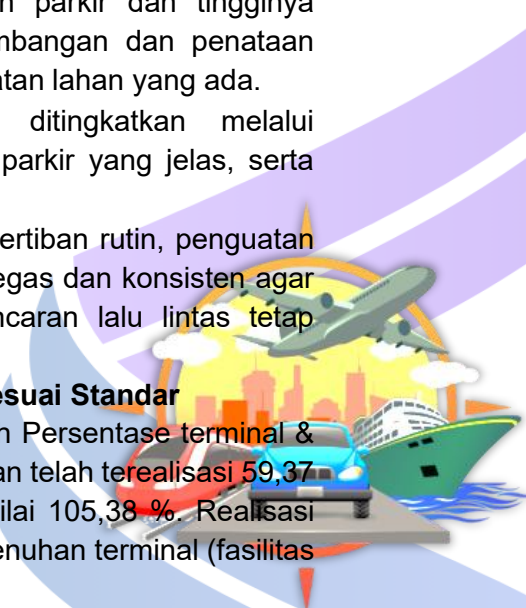
- Keterbatasan lahan parkir,
- Tingginya volume kendaraan,
- Rendahnya kesadaran pengguna,
- serta masih adanya praktik parkir liar yang sulit dikendalikan.

Upaya perbaikan atau solusi yang dilakukan adalah

- Solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan parkir dan tingginya volume kendaraan, perlu dilakukan pengembangan dan penataan lokasi parkir baru serta optimalisasi pemanfaatan lahan yang ada.
- Rendahnya kesadaran pengguna perlu ditingkatkan melalui sosialisasi, pemasangan rambu dan marka parkir yang jelas, serta edukasi tertib parkir.
- Praktik parkir liar perlu ditangani melalui penertiban rutin, penguatan pengawasan, serta penerapan sanksi yang tegas dan konsisten agar ketertiban parkir dapat terwujud dan kelancaran lalu lintas tetap terjaga.

33) Meningkatnya kualitas Terminal & Halte Sesuai Standar

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase terminal & halte yang sesuai standar dengan target 56,34 % dan telah terealisasi 59,37 % sehingga memperoleh predikat tinggi dengan nilai 105,38 %. Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan (Bobot keterpenuhan terminal (fasilitas





utama dan pendukung) x realisasi keterpenuhan terminal) + (Bobot ketersediaan Prasarana Jalan x realisasi ketersediaan Prasarana Jalan).

Faktor pendorong meningkatnya persentase terminal dan halte yang sesuai standar antara lain:

- Adanya regulasi dan standar teknis yang jelas,
- Dukungan pendanaan dari pemerintah,
- Program revitalisasi sarana transportasi,
- serta meningkatnya kesadaran akan keselamatan, kenyamanan, dan aksesibilitas pengguna (termasuk difabel).

Faktor penghambatnya meliputi:

- Keterbatasan anggaran,
- kondisi infrastruktur lama yang sulit disesuaikan dengan standar baru, keterbatasan lahan,
- Lemahnya pengawasan dan pemeliharaan,
- serta rendahnya koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan terminal dan halte.

Upaya perbaikan atau solusi yang dilakukan adalah

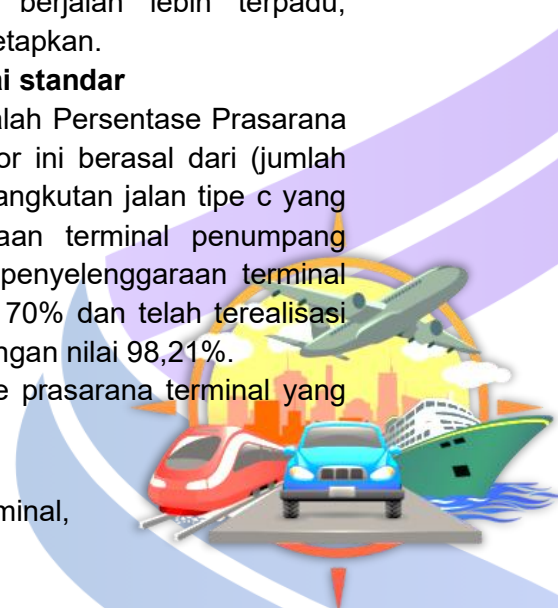
- Solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran, perlu dilakukan penetapan skala prioritas pembangunan dan pemeliharaan terminal serta halte pada lokasi yang paling strategis serta penguatan dukungan pendanaan dari pemerintah, maupun kerja sama dengan pihak swasta.
- Kondisi infrastruktur lama yang sulit disesuaikan dengan standar baru dapat diatasi melalui program rehabilitasi dan penyesuaian bertahap sesuai kemampuan anggaran.
- Keterbatasan lahan perlu disikapi dengan perencanaan tata ruang yang lebih optimal serta pemanfaatan lahan secara efisien.
- Selain itu, penguatan pengawasan dan pemeliharaan secara rutin serta peningkatan koordinasi antarinstansi terkait perlu dilakukan agar pengelolaan terminal dan halte dapat berjalan lebih terpadu, berkelanjutan, dan sesuai standar yang ditetapkan.

34) Terpenuhinya Prasarana Terminal sesuai standar

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Prasarana terminal yang sesuai standar. Realisasi Indikator ini berasal dari (jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe c yang tersedia dibagi jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dgn standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan)*100%. Target sasaran ini yaitu 70% dan telah terealisasi 68,75% sehingga memperoleh predikat tinggi dengan nilai 98,21%.

Faktor pendorong meningkatnya persentase prasarana terminal yang sesuai standar meliputi:

- Adanya standar teknis terminal,
- Program pembangunan dan revitalisasi terminal,





- serta dukungan pendanaan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa. Pengawasan terhadap pengelolaan terminal juga mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal.

Faktor penghambatnya antara lain:

- Kondisi bangunan terminal yang sudah tua,
- Keterbatasan anggaran pemeliharaan,
- Rendahnya intensitas perawatan,
- serta kurangnya koordinasi antara pengelola terminal dan instansi terkait.

Upaya perbaikan atau solusi yang dilakukan adalah

- Solusi untuk mengatasi kondisi bangunan terminal yang sudah tua dan keterbatasan anggaran pemeliharaan, perlu dilakukan penetapan skala prioritas rehabilitasi terminal serta penguatan dukungan pendanaan dari pemerintah daerah dan pihak terkait.
- Rendahnya intensitas perawatan perlu ditingkatkan melalui penyusunan jadwal pemeliharaan rutin dan pengawasan yang lebih teratur.
- Kurangnya koordinasi antara pengelola terminal dan instansi terkait dapat diatasi dengan penguatan komunikasi dan rapat koordinasi berkala agar penanganan pemeliharaan dan pengelolaan terminal dapat berjalan lebih terpadu, efektif, dan berkelanjutan.

35) Meningkatnya Efektivitas pengawasan parkir

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Pengawasan titik Parkir. Realisasi Indikator ini berasal dari jumlah titik parkir yang memiliki ijin dibagi jumlah seluruh target titik parkir yang dalam pembinaan dishub dikali 100%. Target sasaran ini yaitu 100% dan telah terealisasi 100% sehingga memperoleh predikat tinggi dengan nilai 100%.

Faktor pendorong meningkatnya persentase pengawasan titik parkir antara lain:

- Ketersediaan petugas pengawas,
- Penerapan kebijakan pengendalian parkir,
- serta pemanfaatan teknologi seperti CCTV dan sistem pelaporan.
- Koordinasi antara dinas perhubungan dan aparat penegak hukum juga memperkuat efektivitas pengawasan.

Adapun faktor penghambatnya meliputi:

- Keterbatasan jumlah petugas,
- Luasnya wilayah pengawasan,
- Rendahnya kepatuhan pengguna parkir,
- serta belum optimalnya sarana pendukung pengawasan di seluruh titik parkir.

Upaya perbaikan atau solusi yang dilakukan adalah

- Solusi untuk mengatasi keterbatasan jumlah petugas dan luasnya wilayah pengawasan, perlu dilakukan pengaturan penempatan petugas berdasarkan titik parkir prioritas serta penguatan kerja sama dengan aparat terkait.





- Rendahnya kepatuhan pengguna parkir perlu ditingkatkan melalui sosialisasi tertib parkir, pemasangan rambu yang jelas, serta penerapan sanksi secara konsisten.
- Keterbatasan sarana pendukung pengawasan dapat diatasi dengan penyediaan fasilitas pengawasan secara bertahap, seperti alat komunikasi dan sistem pemantauan, agar pengawasan parkir dapat berjalan lebih efektif dan merata.

A.7 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran Sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.7
Efisien Penggunaan Sumber Daya

NO	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas dan tepat waktu	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100%	97,51	2,49
2	Terselenggaranya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Pelayanan administrasi keuangan sesuai standar	100%	90,17	9,83
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	100%	98,63	1,37



NO	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
4	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	95,82	4,18
5	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	98,3	1,7
6	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	100%	93,99	#VALUE!
7	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100%	74,54	25,46
8	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	99,73	0,27
9	Meningkatnya kualitas Terminal & Halte Sesuai Standar	Persentase terminal & halte yang sesuai standar	105%	71,1	28,9
10	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan danau	Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	104%	99,48	0,52
11	Terpenuhinya Prasarana jalan yang sesuai standar	Persentase Prasarana jalan yang sesuai standar	106%	54,2	45,8
12	Meningkatnya kualitas Dermaga Sungai dan Danau	Persentase Dermaga yang sesuai standar	100%	99,49	0,51
13	Terpenuhinya Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	106%	95,14	4,86



NO	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
14	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	114%	97,42	2,58
15	Meningkatnya penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada pusat kegiatan dan ruas jalan/persimpangan	Persentase penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas	100%	98,32	1,68
16	Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan andalalin	Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin	103,45%	96,78	3,22
17	Meningkatnya penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada pusat kegiatan dan ruas jalan/persimpangan	Persentase penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas	100%	98,32	1,68
18	Meningkatnya Trayek Angkutan Umum	Persentase Izin Trayek Angkutan Umum Yang Aktif	100%	47,51	52,49
19	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	104%	99,48	0,52
20	Meningkatnya kualitas Dermaga Sungai dan Danau	Persentase Dermaga yang sesuai standar	100%	99,49	0,51
21	Tersedianya Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Sungai dan Danau	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Sungai dan Danau	100%	99,61	0,39
22	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan Barang	Persentase angkutan umum dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	100%	46,38	53,62
23	Tersedianya Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Orang dan Barang	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan	100%	99,37	0,63



NO	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
24	Meningkatnya Kelaikan Transportasi Perhubungan	Persentase Transportasi Perhubungan yang Laik Jalan	105%	96,6	3,4
25	Meningkatnya Kelaikan Uji Laik Jalan	Persentase Pemeriksaan Uji Laik Jalan yang lulus uji	100%	97,31	2,69
26	Meningkatnya Kualitas Sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase kualitas Sarana Prasarana dalam kondisi baik	100%	96,27	3,73
27	Meningkatnya Kawasan Parkir Tertib	Persentase Kawasan Parkir Tertib	100%	97,88	2,12
28	Meningkatnya kualitas Terminal & Halte Sesuai Standar	Persentase terminal & halte yang sesuai standar	105%	71,1	28,9
29	Meningkatnya Efektivitas pengawasan parkir	Persentase Pengawasan titik Parkir	100%	97,88	2,12

A.8 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja merupakan kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab pada unit kerja tersebut. Hasil dari pelaksanaan analisis kinerja berkaitan dengan SDM, Anggaran, sarana dan prasarana dan hal-hal lain terkait. Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2025 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran strategis yang telah ditargetkan telah tercapai dan juga Belum Tercapai, tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan merupakan hasil yang selalu ingin dicapai oleh Perangkat Daerah dengan segala Kendala dan Resikonya. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Terwujudnya kinerja perhubungan berkualitas

Terwujudnya kinerja perhubungan berkualitas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

a) Rasio Konektivitas Kabupaten

Program yang menunjang indikator Rasio Konektivitas Kabupaten yaitu:





- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- Program Pengelolaan Pelayaran

Aktivitas kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian Rasio Konektivitas Kabupaten yaitu:

- Mengusulkan dan mengawal pembangunan infrastruktur transportasi daerah.
- Mengatur dan mengevaluasi trayek angkutan umum.
- Berkoordinasi dengan provinsi dan pusat terkait konektivitas antarwilayah. (cukup isikan program, Kegiatan dan aktivitas sesuai PK) utk aktivitasnya sesuai level jabatan.

b) Tingkat Keselamatan transportasi Daerah Kabupaten/Kota

Program yang menunjang indikator Tingkat Keselamatan transportasi Daerah Kabupaten/Kota yaitu:

- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Aktivitas kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian b)Tingkat Keselamatan transportasi Daerah Kabupaten/Kota yaitu:

- Menyusun dan melaksanakan program keselamatan transportasi daerah.
- Melaksanakan sosialisasi dan edukasi keselamatan berlalu lintas.
- Mengawasi kelayakan kendaraan umum dan sarana Transportasi.
- Berkoordinasi dengan kepolisian, rumah sakit, dan instansi terkait penanganan kecelakaan.

2) Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Program yang menunjang indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah yaitu:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Aktivitas kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah yaitu:

- Menyusun dan menyelaraskan perencanaan kinerja dengan RPJMD dan Renstra.
- Menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang terukur dan relevan.
- Mengendalikan pelaksanaan program berbasis kinerja dan hasil.
- Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara berkala.
- Mendorong efisiensi anggaran dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

3) Peningkatan Nilai Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Perangkat Daerah

Program yang menunjang indikator Nilai IKKI Perangkat Daerah yaitu:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Aktivitas kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian Nilai IKKI Perangkat Daerah yaitu:

- Menyusun rencana kerja bidang yang selaras dengan Renstra dan Renja perangkat daerah.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan.





- Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja staf dan unit di bawahnya.
- Menyusun laporan kinerja bidang secara tepat waktu dan akurat.
- Mengendalikan penggunaan anggaran agar efektif, efisien, dan tepat sasaran.

4) Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas

Kegiatan yang menunjang indikator Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu yaitu:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
- Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

Aktivitas kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu yaitu:

- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra, Renja, RKT).
- Menyusun jadwal dan tahapan perencanaan agar dokumen selesai tepat waktu.
- Menghimpun, memverifikasi, dan mengharmonisasi usulan program dan kegiatan dari seluruh bidang.
- Menyusun jadwal dan tahapan perencanaan agar dokumen selesai tepat waktu.
- Menghimpun, memverifikasi, dan mengharmonisasi usulan program dan kegiatan dari seluruh bidang

5) Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas

Kegiatan yang menunjang indikator persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu yaitu:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Aktivitas kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu yaitu:

- Menyusun rencana kerja dan jadwal penyusunan dokumen keuangan perangkat daerah.
- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen penatausahaan keuangan (SPJ, SPP, SPM, SP2D).
- Menghimpun dan merekonsiliasi data keuangan secara berkala.





- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen administrasi aset perangkat daerah.
- Menyusun dan menerapkan SOP pengelolaan dokumen keuangan dan aset.

6) Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan yang menunjang indikator persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yaitu:

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Aktivitas kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yaitu:

- Menyusun rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sesuai kebutuhan perangkat daerah.
- Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi BMD.
- Melaksanakan inventarisasi BMD secara berkala.
- Mengkoordinasikan pengamanan administrasi BMD (dokumen kepemilikan, penetapan status penggunaan).
- Memberikan pembinaan kepada pengurus barang dan pengguna barang.

7) Lancarnya administrasi kepegawaian daerah

Subkegiatan yang menunjang indikator Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yaitu:

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Aktivitas kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yaitu:

- Menyusun dan memperbaiki data kepegawian ASN dan non-ASN secara berkala.
- Menyediakan dukungan sarana dan prasarana kerja yang menunjang pelayanan administrasi.
- Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran terkait pelayanan administrasi kepegawaian.
- Berkoordinasi dengan BKD/BKPSDM dan unit kerja terkait.
- Memastikan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai SOP dan peraturan perundang-undangan.

8) Terselenggaranya kegiatan kantor

Subkegiatan yang menunjang indikator Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan





- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Aktivitas kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu:

- Pengeolaan surat masuk dan surat keluar secara tertib, tepat waktu, dan terdokumentasi.
- Penyusunan rencana kerja (Renja) perangkat daerah.
- Penyusunan RKA, DPA, dan dokumen perencanaan anggaran lainnya.
- Penyusunan SOP pelayanan administrasi umum.
- Peningkatan kualitas pelayanan adminstrasi melalui perbaikan proses kerja.

9) Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Rencana

Subkegiatan yang menunjang indikator Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan yaitu:

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Aktivitas kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan yaitu:

- Penyusunan dan pemutakhiran Rencana Kebutuhan Barang Milik Derah (RKBMD)
- Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan BMD berdasarkan usulan bidang/unit kerja
- Verifikasi dan sinkronisasi kebutuhan BMD dengan dokumen perencanaan dan anggaran
- Penanganan kendala dan penyesuaian rencana kebutuhan BMD apabila diperlukan
- Penyusunan data dukung capaian indicator Presentase Pengadaan BMD sesuai RKBMD

10) Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor

Subkegiatan yang menunjang indikator Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi yaitu:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Aktivitas kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi yaitu:

- Menyusun rencana kebutuhan jasa penunjang pelayanan kantor (kebersihan, keamanan, listrik, air, internet, ATK, dll) secara periodic
- Mengkoordinasikan pengadaan jasa penunjang sesuai perencanaan dan anggaran yang tersedia
- Memastikan ketersediaan dan kelancaran layanan kebersihan dan keamanan kantor





- Mengelola dan mengawasi pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
- Mengendalikan penggunaan utilitas kantor (listrik, air, jaringan internet/telekomunikasi) agar optimal dan berkelanjutan

11) Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan

Subkegiatan yang menunjang indikator Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu:

- Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Aktivitas kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu:

- Menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah secara berkala (gedung, kendaraan dinas, peralatan kantor, dan aset lainnya)
- Melakukan inventarisasi dan pemetaan kondisi BMD sebagai dasar perencanaan pemeliharaan
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan rutin dan berkala terhadap BMD penunjang urusan pemerintahan
- Mengusulkan dan mengelola anggaran pemeliharaan BMD sesuai prioritas dan kebutuhan
- Memastikan ketersediaan layanan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

12) Meningkatnya kualitas Terminal & Halte Sesuai Standar

Kegiatan yang menunjang indikator Persentase terminal & halte yang sesuai standar yaitu:

- Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Aktivitas kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian Persentase terminal & halte yang sesuai standar yaitu:

- Menyusun perencanaan kebutuhan peningkatan dan pemenuhan standar terminal dan halte sesuai regulasi dan pedoman teknis
- Melakukan pendataan dan penilaian kondisi eksisting terminal dan halte secara berkala
- Menetapkan prioritas penanganan sarana dan prasarana terminal dan halte berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi pelayanan
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan fasilitas terminal dan halte
- Memastikan pemenuhan standar teknis terminal dan halte (keselamatan, kenyamanan, aksesibilitas, dan kelayakan fungsi)

13) Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan danau



Kegiatan yang menunjang indikator Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik yaitu:

- Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Aktivitas kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik yaitu:

- Menyusun perencanaan pengembangan dan peningkatan sarana prasarana angkutan sungai dan danau sesuai standar pelayanan
- Melakukan pendataan dan evaluasi kondisi sarana prasarana angkutan sungai dan danau secara berkala
- Menetapkan prioritas peningkatan fasilitas penunjang keselamatan dan kenyamanan angkutan sungai dan danau
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan dermaga, tambatan perahu, dan fasilitas pendukung lainnya
- Memastikan ketersediaan dan kelayakan sarana prasarana pendukung operasional angkutan sungai dan danau

14) Terpenuhi Prasarana jalan yang sesuai standar

Subkegiatan yang menunjang indikator Persentase Prasarana jalan yang sesuai standar yaitu:

- Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

Aktivitas kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian Persentase Prasarana jalan yang sesuai standar yaitu:

- Melakukan pendataan dan inventarisasi kondisi prasarana jalan secara berkala
- Menyusun rencana kebutuhan peningkatan dan penanganan prasarana jalan sesuai standar teknis
- Menetapkan prioritas penanganan prasarana jalan berdasarkan tingkat kerusakan dan volume lalu lintas
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan prasarana jalan
- Memastikan pemenuhan standar prasarana jalan meliputi keselamatan, kelancaran, dan kelayakan fungsi

15) Meningkatnya kualitas Dermaga Sungai dan Danau

Subkegiatan yang menunjang indikator Persentase Dermaga yang sesuai standar dengan yaitu:

- Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
- Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau

Aktivitas kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian Persentase Dermaga yang sesuai standar yaitu:

- Melakukan pendataan dan inventarisasi kondisi dermaga secara berkala





- Menyusun rencana kebutuhan pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan dermaga sesuai standar teknis
- Menetapkan prioritas penanganan dermaga berdasarkan tingkat kerusakan dan intensitas penggunaan
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi dermaga
- Memastikan pemenuhan standar dermaga meliputi aspek keselamatan, keamanan, dan kelayakan fungsi

16) Terpenuhiya Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan

Program yang menunjang indikator Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpenuhi yaitu:

- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Aktivitas kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpenuhi yaitu:

- Melakukan pendataan dan inventarisasi kondisi perlengkapan jalan secara berkala
- Menyusun rencana kebutuhan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sesuai standar teknis
- Menetapkan prioritas lokasi pemasangan perlengkapan jalan berdasarkan tingkat risiko keselamatan dan volume lalu lintas
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan
- Memastikan pemenuhan standar perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, guardrail, dan fasilitas keselamatan lainnya

17) Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas

Kegiatan yang menunjang indikator V/C Ratio Jalan di Kabupaten yaitu:

- Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
- Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Aktivitas kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian V/C Ratio Jalan di Kabupaten yaitu:

- Menyusun perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan kinerja jaringan jalan
- Melakukan survei dan analisis volume lalu lintas serta kapasitas jalan secara berkala
- Mengidentifikasi titik kemacetan dan ruas jalan dengan tingkat pelayanan rendah
- Mengkoordinasikan penerapan rekayasa lalu lintas (pengaturan arus, satu arah, pembatasan kendaraan, dan manajemen simpang)
- Mengoptimalkan pengaturan lalu lintas melalui penyesuaian waktu APILL dan pengendalian simpang





18) Meningkatnya penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada pusat kegiatan dan ruas jalan/ persimpangan

Subkegiatan yang menunjang indikator Persentase penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas yaitu:

- Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Aktivitas kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian Persentase penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas yaitu:

- Menyusun perencanaan penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan dan simpang prioritas
- Melakukan survei lalu lintas (volume, kecepatan, tundaan, dan tingkat pelayanan jalan) sebagai dasar analisis
- Melaksanakan kajian Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) terhadap kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas
- Mengidentifikasi permasalahan lalu lintas dan kebutuhan penanganan rekayasa lalu lintas
- Menetapkan skema rekayasa lalu lintas (pengaturan arus, sistem satu arah, manajemen simpang, pembatasan kendaraan, dan pengalihan arus)

19) Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan andalalin

Subkegiatan yang menunjang indikator Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin yaitu:

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
- Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin

Aktivitas kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin yaitu:

- Melakukan pendataan dan identifikasi objek/kegiatan yang wajib menyusun Andalalin
- Menyusun rencana pembinaan dan pengawasan kepatuhan objek wajib Andalalin
- Melakukan evaluasi dokumen Andalalin sesuai ketentuan dan standar teknis yang berlaku
- Memberikan rekomendasi teknis Andalalin sebagai dasar penerbitan perizinan
- Melakukan koordinasi dengan instansi perizinan terkait dalam penerapan ketentuan Andalalin

20) Meningkatnya penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada pusat kegiatan dan ruas jalan/ persimpangan





Subkegiatan yang menunjang indikator Persentase penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas yaitu:

- Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

Aktivitas kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian Persentase penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas yaitu:

- Menyusun rencana pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang berorientasi pada keselamatan dan kelancaran lalu lintas
- Melakukan identifikasi dan pemetaan lokasi rawan kecelakaan serta gangguan lalu lintas
- Mengkoordinasikan penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas di lapangan
- Memastikan penerapan rekayasa lalu lintas sesuai standar keselamatan dan ketentuan teknis
- Melakukan pengendalian operasional lalu lintas pada jam sibuk dan kegiatan tertentu

21) Meningkatnya Ketaatan dan keselamatan Berlalu Lintas

Subkegiatan yang menunjang indikator Persentase Ketaatan Pengguna Jalan yaitu:

- Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

Aktivitas kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian Persentase Ketaatan Pengguna Jalan dengan target 85,5% dan telah terealisasi 84% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 98,25% yaitu:

- Menyusun rencana kegiatan peningkatan ketaatan pengguna jalan yang berorientasi pada keselamatan berlalu lintas
- Melakukan pemantauan dan pengendalian perilaku pengguna jalan di ruas dan simpang prioritas
- Melaksanakan kegiatan pengawasan dan penertiban lalu lintas bersama instansi terkait
- Mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi sebagai dasar penentuan langkah pengendalian
- Melaksanakan sosialisasi dan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada pengguna jalan

22) Meningkatnya Trayek Angkutan Umum

Kegiatan yang menunjang indikator Persentase Izin Trayek Angkutan Umum Yang Aktif yaitu:

- Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Aktivitas kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian Persentase Izin Trayek Angkutan Umum Yang Aktif yaitu:





- Menyusun perencanaan dan kebijakan pengelolaan trayek angkutan umum sesuai kebutuhan pelayanan Masyarakat.
- Melakukan pendataan dan pemutakhiran data trayek angkutan umum yang ditetapkan dan yang aktif beroperasi.
- Melaksanakan pembinaan kepada operator angkutan umum agar trayek tetap aktif dan beroperasi sesuai izin.
- Mengkoordinasikan penerbitan, perpanjangan, dan penertiban izin trayek angkutan umum.
- Melakukan pengawasan terhadap operasional angkutan umum sesuai izin trayek yang diberikan.

23) Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau

Kegiatan yang menunjang indikator Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik yaitu:

- Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha
- Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Aktivitas kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik yaitu:

- Menyusun kebijakan dan perencanaan pengelolaan angkutan sungai dan danau sesuai standar pelayanan
- Melakukan pendataan dan evaluasi kinerja operasional angkutan sungai dan danau secara berkala
- Melaksanakan pembinaan kepada operator angkutan sungai dan danau untuk meningkatkan kualitas pelayanan
- Mengkoordinasikan penerbitan dan pengawasan izin operasional angkutan sungai dan danau
- Memastikan pemenuhan standar keselamatan dan kelayakan operasional angkutan sungai dan danau

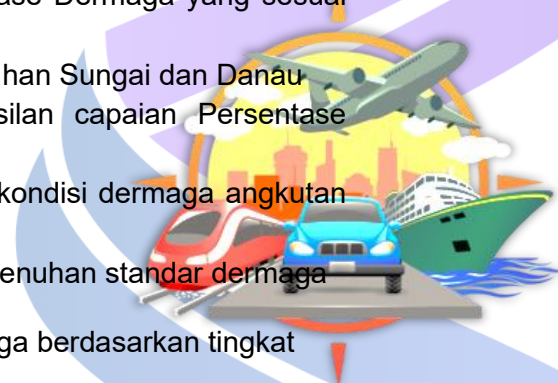
24) Meningkatnya kualitas Dermaga Sungai dan Danau

Subkegiatan yang menunjang indikator Persentase Dermaga yang sesuai standar yaitu:

- Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau

Aktivitas kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian Persentase Dermaga yang sesuai standar yaitu:

- Melakukan pendataan dan inventarisasi kondisi dermaga angkutan sungai dan danau secara berkala
- Menyusun rencana peningkatan dan pemenuhan standar dermaga angkutan sungai dan danau
- Menetapkan prioritas penanganan dermaga berdasarkan tingkat kerusakan dan intensitas operasional





- Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan dermaga
- Memastikan dermaga memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna

25) Meningkatnya layanan perizinan angkutan sungai dan danau

Subkegiatan yang menunjang indikator Persentase meningkatnya layanan perizinan angkutan sungai dan danau yaitu:

- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Aktivitas kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian Persentase meningkatnya layanan perizinan angkutan sungai dan danau yaitu:

- Menyusun rencana peningkatan kualitas dan cakupan layanan perizinan angkutan sungai dan danau
- Melakukan pendataan dan pemutakhiran data kapal dan operator angkutan sungai dan danau
- Memberikan pelayanan penerbitan, perpanjangan, dan perubahan izin angkutan sungai dan danau
- Melaksanakan pembinaan kepada operator terkait pemenuhan persyaratan perizinan
- Mengkoordinasikan proses perizinan dengan instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku

26) Tersedianya Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Sungai dan Danau

Subkegiatan yang menunjang indikator Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Sungai dan Danau yaitu:

- Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Aktivitas kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Sungai dan Danau yaitu:

- Menyusun rencana penyusunan dokumen usulan penetapan tarif angkutan sungai dan danau
- Mengumpulkan dan mengolah data biaya operasional angkutan sungai dan danau
- Melakukan survei lapangan terkait kondisi operasional dan pelayanan angkutan sungai dan danau
- Melakukan analisis struktur biaya dan kemampuan bayar pengguna jasa angkutan sungai dan danau





- Mengkaji ketentuan dan regulasi terkait penetapan tarif angkutan sungai dan danau

27) Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan Barang

Subkegiatan yang menunjang indikator Persentase angkutan umum dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik yaitu:

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Aktivitas kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian Persentase angkutan umum dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik yaitu:

- Menyusun rencana peningkatan kinerja pelayanan angkutan umum jalan
- Melakukan pendataan dan evaluasi kinerja operasional angkutan umum secara berkala
- Melaksanakan pembinaan kepada operator angkutan umum untuk meningkatkan mutu pelayanan
- Mengkoordinasikan penerbitan dan pengawasan izin operasional angkutan umum
- Memastikan pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan umum

28) Tersedianya Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Orang dan Barang

Subkegiatan yang menunjang indikator Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan yaitu:

- Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Aktivitas kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan yaitu:

- Menyusun rencana penyusunan dokumen usulan penetapan tarif angkutan jalan
- Mengumpulkan dan memutakhirkan data biaya operasional angkutan jalan
- Melakukan survei lapangan terkait kondisi operasional dan tingkat pelayanan angkutan jalan
- Melakukan analisis struktur biaya, tingkat layanan, dan kemampuan bayar pengguna jasa
- Mengkaji regulasi dan ketentuan perundang-undangan terkait penetapan tarif angkutan

29) Meningkatnya Kelaikan Transportasi Perhubungan

Kegiatan yang menunjang indikator Persentase Transportasi Perhubungan yang Laik Jalan yaitu:





- Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Aktivitas kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian Persentase Transportasi Perhubungan yang Laik Jalan yaitu:

- Menyusun perencanaan dan kebijakan operasional pengujian kendaraan bermotor
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor (uji KIR) sesuai ketentuan
- Memastikan seluruh proses pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan sesuai standar teknis dan regulasi
- Mengendalikan kualitas dan akurasi hasil pengujian kendaraan bermotor
- Mengawasi kinerja petugas penguji agar profesional, objektif, dan berintegritas

30) Meningkatnya Kelaikan Uji Laik Jalan

Subkegiatan yang menunjang indikator Persentase Pemeriksaan Uji Laik Jalan yang lulus uji yaitu:

- Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Penyediaan Bukti lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Aktivitas kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian Persentase Pemeriksaan Uji Laik Jalan yang lulus uji yaitu:

- Menyusun perencanaan dan pengelolaan administrasi pelaksanaan uji laik jalan di UPT PKB
- Mengelola administrasi pendaftaran, penjadwalan, dan pelayanan pemeriksaan uji laik jalan
- Melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen kendaraan sebelum uji
- Mengelola pencatatan, pengarsipan, dan pemutakhiran data hasil pemeriksaan uji laik jalan
- Mendukung kelancaran operasional pengujian melalui penyediaan sarana dan kebutuhan administrasi

31) Meningkatnya Kualitas Sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor

Subkegiatan yang menunjang indikator Persentase kualitas Sarana Prasarana dalam kondisi baik yaitu:

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Aktivitas kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian Persentase kualitas Sarana Prasarana dalam kondisi baik yaitu:

- apa saja aktivitas kegiatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT PKB dalam menunjang keberhasilan capaian
- Melakukan pendataan dan inventarisasi kondisi sarana dan prasarana UPT PKB
- Mengelola administrasi pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana





- Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan rutin dan berkala sarana dan prasarana
- Memastikan ketersediaan sarana prasarana pendukung operasional pengujian kendaraan bermotor

32) Meningkatkan Kawasan Parkir Tertib

Kegiatan yang menunjang indikator Persentase Kawasan Parkir Tertib yaitu:

- Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Aktivitas kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian Persentase Kawasan Parkir Tertib yaitu:

- Kepala UPT Terminal dan Parkir
- Melakukan pendataan dan pemetaan lokasi kawasan parkir
- Menetapkan pola dan sistem parkir sesuai ketentuan dan karakteristik kawasan
- Mengkoordinasikan pelaksanaan penataan dan pengelolaan kawasan parkir
- Mengawasi operasional parkir agar tertib, aman, dan sesuai peraturan

33) Meningkatkan kualitas Terminal & Halte Sesuai Standar

Kegiatan yang menunjang indikator Persentase terminal & halte yang sesuai standar yaitu:

- Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Aktivitas kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian Persentase terminal & halte yang sesuai standar yaitu:

- Menyusun rencana pengelolaan, pemeliharaan, dan peningkatan terminal serta halte
- Melakukan pendataan dan penilaian kondisi eksisting terminal dan halte secara berkala
- Menetapkan prioritas pemenuhan standar terminal dan halte sesuai tingkat kebutuhan pelayanan
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan terminal serta halte
- Memastikan fasilitas terminal dan halte memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan kelayakan fungsi

34) Terpenuhinya Prasarana Terminal sesuai standar

Subkegiatan yang menunjang indikator Persentase Prasarana terminal yang sesuai standar yaitu:

- Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)

Aktivitas kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian Persentase Prasarana terminal yang sesuai standar yaitu:

- Menyusun perencanaan administrasi dan dukungan operasional pemeliharaan prasarana terminal





- Mengelola administrasi pendataan dan inventarisasi prasarana terminal
- Mendukung pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan prasarana terminal melalui pengelolaan administrasi
- Mengkoordinasikan kebutuhan sarana penunjang prasarana terminal
- Memastikan kelengkapan administrasi pemeliharaan prasarana terminal

35) Meningkatnya Efektivitas pengawasan parkir

Subkegiatan yang menunjang indikator Persentase Pengawasan titik Parkir yaitu:

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

Aktivitas kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian Persentase Pengawasan titik Parkir yaitu:

- apa saja aktivitas kegiatan Kepala Sub Bagian UPT Terminal dan Parkir dalam menunjang keberhasilan capaian
- Mengelola pendataan dan inventarisasi titik parkir resmi yang diawasi
- Mendukung pelaksanaan pengawasan titik parkir melalui pengaturan administrasi petugas
- Mengelola administrasi penugasan dan jadwal pengawasan juru parkir/petugas parkir
- Memastikan kelengkapan administrasi perizinan dan penetapan titik parkir

A.9 TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

A.9.1 Evaluasi Kinerja Tahun 2025

a. Penilaian Hasil Evaluasi

Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah terhadap Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2025 memperoleh nilai evaluasi atas implementasi SAKIP sebesar 78,58 atau predikat “**BB**” dapat diartikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Sangat Baik, yang ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ koordinator. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:



	Komponen Yang Dinilai	2024		2025	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,22	30	23,68
b.	Pengukuran Kinerja	30	22,20	30	23,09
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,30	15	12,04
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,50	25	19,77
	Nilai Hasil Evaluasi	100	78,22	100	78,58
	Predikat Akuntabilitas Kinerja		BB		BB

b. Uraian Hasil Evaluasi

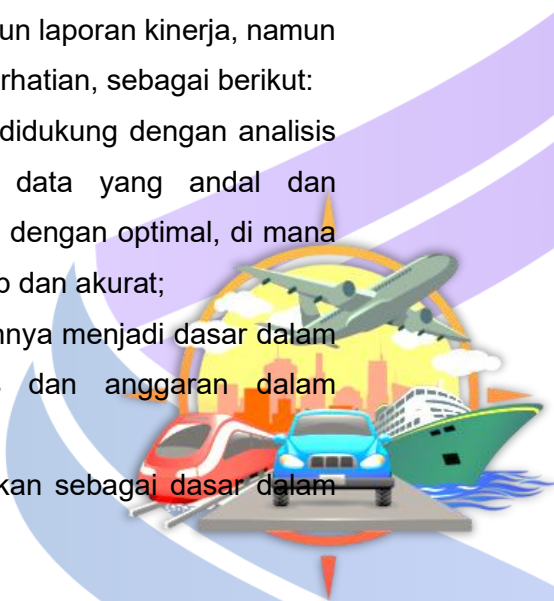
1) Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar memperoleh nilai sebesar 23,68 dari nilai maksimal 30. Dokumen perencanaan kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar telah tersedia yang memuat tujuan, sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka menengah serta target tahunan dan telah menggunakan penyelarasan (cascading) dengan memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting), dan dokumen perencanaan kinerja seluruhnya dipublikasikan tepat waktu.

2) Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar memperoleh nilai sebesar 23,09 dari nilai maksimal 30. Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar telah menyepakati perjanjian kinerja sebagai ukuran kinerja secara formal dan menyusun laporan kinerja, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, sebagai berikut:

- Pengukuran kinerja belum sepenuhnya didukung dengan analisis yang memadai, serta didukung dengan data yang andal dan memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dengan optimal, di mana masih terdapat data yang belum terisi lengkap dan akurat;
- Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja;
- Hasil pengukuran kinerja belum digunakan sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment;





d) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya secara aktif melibatkan seluruh pegawai dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pemahaman kinerja.

e) Rencana aksi belum dimanfaatkan dalam pengukuran kinerja sebagai bentuk pemantauan berkala, terlihat target yang ditetapkan pada laporan kinerja triwulan I yang belum sepenuhnya diukur atau dipantau;

3) Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar memperoleh nilai 12,04 dari nilai maksimal 15. Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), namun masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, sebagai berikut :

a) Reviu berjenjang belum secara optimal dilakukan untuk menjamin laporan kinerja telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar dan mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja;

b) Rekomendasi dalam LKJIP belum sepenuhnya disajikan berdasarkan Informasi yang dapat digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

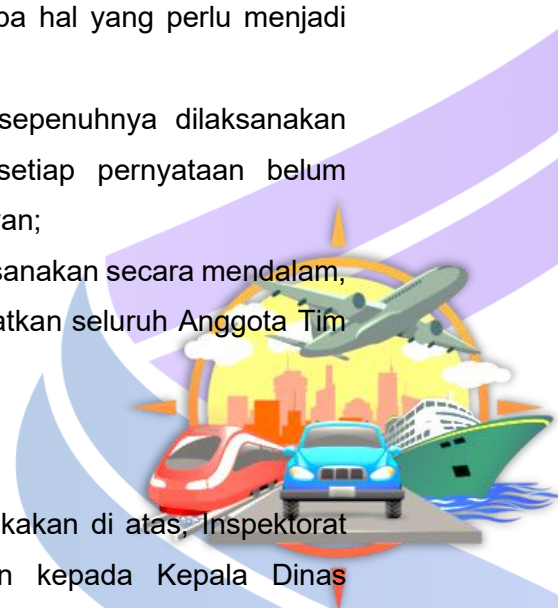
Hasil evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar memperoleh nilai sebesar 19,77 dari nilai maksimal 25. Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar telah melaksanakan Evaluasi Kinerja namun masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, sebagai berikut :

a) Pelaksanaan penilaian mandiri belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai standar, dimana hasil penilaian setiap pernyataan belum sepenuhnya disertai bukti dukung yang relevan;

b) Evaluasi Internal belum sepenuhnya dilaksanakan secara mendalam, berjenjang dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh Anggota Tim Evaluasi Internal;

c. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar merekomendasikan kepada Kepala Dinas





Perhubungan Kabupaten Banjar beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

- 1) Melakukan internalisasi kepada setiap Pegawai untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian, serta komitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
- 2) Melakukan pengukuran capaian kinerja yang didukung dengan data yang andal serta melaporkannya ke dalam laporan kinerja dan aplikasi simondalev secara lengkap;
- 3) Melibatkan setiap pegawai secara aktif dalam pengukuran kinerja sebagai bentuk upaya perubahan budaya kinerja yang lebih baik melalui dialog kinerja dengan seluruh pengampu sasaran kinerja, mulai dari tahap perencanaan, pengukuran hingga menyusun laporan serta dalam proses evaluasi internal;
- 4) Memanfaatkan Informasi dalam laporan kinerja berkala dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja pada periode berikutnya;
- 5) Melakukan reviu berjenjang terhadap pelaporan kinerja untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian serta memastikan laporan kinerja telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar dan mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dan komitmen dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 6) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian Reward dan Punishment;
- 7) Melakukan Evaluasi Internal yang dilakukan melalui secara mendalam untuk mendeteksi kelemahan dalam akuntabilitas kinerja seperti keselarasan antar indikator, penetapan indikator yang relevan dengan sasaran, kekurangan penyajian informasi dalam LKJIP, konsistensi dan validitas data serta pemanfaatan kinerja dalam pemberian penghargaan kepada pegawai.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja urusan perhubungan, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar juga memberikan rekomendasi peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Rekomendasi tersebut menekankan penguatan manajemen lalu lintas, keselamatan transportasi, pengawasan angkutan, pemeliharaan prasarana, serta pemanfaatan data dan koordinasi teknis antarinstansi. Rekomendasi yang dimaksud yaitu:

- 1) Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas



Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap kondisi lalu lintas, termasuk penataan rambu, marka jalan, APILL, serta rekayasa lalu lintas pada titik rawan kemacetan dan kecelakaan.

2) Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan

Pengawasan terhadap angkutan orang dan barang agar ditingkatkan, termasuk kepatuhan terhadap perizinan, kelayakan kendaraan, serta penegakan ketentuan muatan dan keselamatan.

3) Peningkatan Keselamatan Transportasi

Upaya peningkatan keselamatan transportasi agar dilaksanakan secara terencana melalui inspeksi keselamatan jalan, sosialisasi keselamatan berlalu lintas, serta penanganan lokasi rawan kecelakaan.

4) Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana perhubungan, seperti halte, terminal, rambu, dan fasilitas pendukung lainnya agar dilaksanakan secara berkelanjutan dan sesuai standar teknis.

5) Penguatan Pengelolaan Perizinan dan Pelayanan Teknis

Proses perizinan di bidang perhubungan agar dilaksanakan secara transparan, tepat waktu, dan sesuai ketentuan, dengan memanfaatkan sistem pelayanan berbasis elektronik.

6) Peningkatan Koordinasi Teknis dengan Instansi Terkait

Koordinasi teknis dengan kepolisian, Bappeda, OPD terkait, dan pemangku kepentingan lainnya agar diperkuat dalam pelaksanaan pengaturan lalu lintas, pengawasan angkutan, dan keselamatan transportasi.

7) Peningkatan Disiplin dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Kerja

Seluruh jajaran agar meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas, termasuk kepatuhan terhadap jam kerja, kehadiran kegiatan kedinasan, serta penyelesaian pekerjaan sesuai dengan target yang ditetapkan.

8) Optimalisasi Administrasi dan Pelaporan Kinerja

Setiap pelaksanaan kegiatan agar didukung dengan administrasi dan pelaporan yang tertib, akurat, dan tepat waktu sebagai bentuk akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

9) Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM





Seluruh jajaran didorong untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, serta pengembangan kapasitas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

10) Penegakan Etika, Integritas, dan Profesionalisme Aparatur

Seluruh jajaran diharapkan senantiasa menjunjung tinggi etika, integritas, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kedinasan.

A.9.2 TINDAK LANJUT

Dinas Perhubungan telah melakukan tindak lanjut guna mendapatkan kinerja yang lebih baik dengan tincian sebagai berikut:

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka merumuskan upaya dan solusi terhadap setiap faktor penghambat pada sub kegiatan yang dituangkan dalam monitoring rencana aksi per Triwulan Tahun 2025.
- 2) Memaksimalkan penggunaan aplikasi Sistem Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi (Simondalev) sebagai pelaksanaan pengendalian kegiatan pembangunan dimaksudkan agar kegiatan pembangunan terlaksana secara: tepat waktu, tepat mutu, tepat administrasi, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Pada Tahun 2025 penginputan realisasi kinerja dilakukan oleh masing-masing operator pada bidang di Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar agar sesuai dengan tenggat waktu dari Bappedalitbang tanggal 05 setiap bulan.
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dalam rapat setiap triwulan untuk menentukan tindak lanjut perbaikan pada sub kegiatan berdasarkan hasil pengukuran realisasi kinerja.
- 4) Telah melaksanakan rapat internal lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar secara rutin.
- 5) Melakukan monitoring terhadap realisasi fisik dan keuangan dalam rangka penyusunan rekomendasi tindak lanjut dan waktu pelaksanaan.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar tahun 2025 adalah sebesar Rp 24.264.619.959,00 dan realisasi sebesar Rp 20.364.982.339,00 dengan capaian sebesar 83,93%. Rincian belanja Dinas Perhubungan sebagai berikut:



a) Realisasi Jenis Belanja

Tabel 3.8
Realisasi Jenis Belanja

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	Belanja Operasi	Rp18.374.386.809,00	Rp14.811.075.511,00	80,61%
	a. Belanja Pegawai	Rp6.039.450.000,00	Rp5.467.968.781,00	90,54%
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp12.334.936.809,00	Rp9.343.106.730,00	75,75%
	c. Belanja Hibah	Rp0,00	Rp0,00	100%
2.	Belanja Modal	Rp5.890.233.150,00	Rp5.553.906.828,00	94,29%
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp3.817.713.910,00	Rp3.688.978.169,00	96,63%
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp1.862.519.240,00	Rp1.655.149.209,00	88,87%
	c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp20.000.000,00	Rp19.874.500,00	99,37%
	d. Belanja Modal Aset Lainnya	Rp190.000.000,00	Rp189.904.950,00	100%

b) Realisasi anggaran berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 3.9
Realisasi anggaran berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp11.449.442.558	Rp8.738.533.030	76,32%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp1.669.072.126	Rp1.405.474.610	84,21%
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp399.116.000	Rp197.980.828	49,60%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp1.669.072.126	Rp1.405.474.610	84,21%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rp46.617.500	Rp43.592.845	93,51%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp137.543.900	Rp134.175.498	97,55%
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rp267.341.750	Rp264.783.593	99,04%
	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Rp223.354.250	Rp220.882.663	98,89%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Rp43.987.500	Rp43.900.930	99,80%
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp168.162.500	Rp164.593.631	97,88%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp168.162.500	Rp164.593.631	97,88%



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp1.500.312.322	Rp1.449.291.729	96,60%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp954.988.040	Rp917.664.000	96,09%
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rp359.910.882	Rp347.215.729	96,47%
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp112.500.000	Rp112.500.000	100,00%
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp72.913.400	Rp71.912.000	98,63%
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp3.382.407.000	Rp3.325.746.674	98,32%
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp1.216.209.810	Rp1.177.345.024	96,80%
	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp180.610.000	Rp180.024.120	99,68%
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp19.240.000	Rp18.140.000	94,28%
	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rp1.760.255.190	Rp1.745.041.970	99,14%
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp206.092.000	Rp205.195.560	99,57%
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp8.607.000	Rp8.329.660	96,78%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Rp3.305.000	Rp3.285.000	99,39%
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Rp5.302.000	Rp5.044.660	95,15%
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp14.340.000	Rp11.110.000	77,48%
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Rp14.340.000	Rp11.110.000	77,48%
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp4.344.199.860	Rp2.014.803.133	46,38%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp315.383.400	Rp289.814.933	91,89%
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp4.028.816.460	Rp1.724.988.200	42,82%



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp95.000.000	Rp94.400.000	99,37%
	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp95.000.000	Rp94.400.000	99,37%
2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp1.943.195.100	Rp1.933.150.633	99,48%
	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Rp364.082.200	Rp361.878.656	99,39%
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp31.370.200	Rp30.963.255	98,70%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp332.712.000	Rp330.915.401	99,46%
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp1.389.112.900	Rp1.382.022.477	99,49%
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp200.000.000	Rp198.878.256	99,44%
	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp893.343.000	Rp890.360.921	99,67%
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp295.769.900	Rp292.783.300	98,99%
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp10.871.982.301	Rp9.693.298.676	89,16%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp57.239.700	Rp55.814.396	97,51%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp8.000.000	Rp7.641.099	95,51%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp11.430.000	Rp10.848.296	94,91%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp8.049.700	Rp7.945.940	98,71%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp8.760.000	Rp8.573.091	97,87%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp6.242.037.800	Rp5.628.245.840	90,17%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp6.030.700.000	Rp5.460.068.781	90,54%



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp202.470.000	Rp159.410.000	78,73%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp8.867.800	Rp8.767.059	98,86%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp7.997.000	Rp7.887.719	98,63%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp7.997.000	Rp7.887.719	98,63%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp137.622.300	Rp131.873.152	95,82%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp60.000.000	Rp54.460.852	90,77%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp349.875.800	Rp343.938.240	98,30%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp11.810.000	Rp11.651.818	98,66%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp24.602.000	Rp22.388.435	91,00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp13.638.800	Rp13.421.000	98,40%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp11.050.000	Rp10.183.000	92,15%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp199.172.000	Rp197.357.890	99,09%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp1.533.655.000	Rp1.441.444.098	93,99%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp1.296.834.000	Rp1.207.342.801	93,10%
	Pengadaan Mebel	Rp66.903.000	Rp66.022.800	98,68%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp169.918.000	Rp168.078.497	98,92%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.796.944.701	Rp1.339.515.717	74,54%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp79.949.701	Rp71.811.917	89,82%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.716.995.000	Rp1.267.703.800	73,83%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp746.610.000	Rp744.579.514	99,73%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp42.750.000	Rp42.710.743	99,91%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp615.910.000	Rp615.856.227	99,99%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp42.870.000	Rp41.212.544	96,13%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp45.080.000	Rp44.800.000	99,38%

c) Realisasi anggaran untuk mewujudkan sasaran kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Tabel 3.10
Realisasi anggaran sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya kinerja perhubungan berkualitas	Rasio Konektivitas Kabupaten	0,57	0,53	92,98%			
		Tingkat Keselamatan transportasi Daerah Kabupaten/Kota	99,5	99,46	99,96%			
2	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79	78,58	99,47%			
3	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	90,25	80,88	89,62%	Rp 10.871.982.301,00	Rp 9.693.298.676,00	89,16

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Meningkatnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas dan tepat waktu	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100	100	100%	Rp 57.239.700,00	Rp 55.814.396,00	97,51
5	Terselenggaranya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Pelayanan administrasi keuangan sesuai standar	100	100	100%	Rp 6.242.037.800,00	Rp 5.628.245.840,00	90,17
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	100	100	100%	Rp 7.997.000,00	Rp 7.887.719,00	98,63

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100%	Rp 137.622.300,00	Rp 131.873.152,00	95,82
8	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100%	Rp 349.875.800,00	Rp 343.938.240,00	98,30
9	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	100	100	100%	Rp 1.533.655.000,00	Rp 1.441.444.098,00	93,99
10	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100	100	100%	Rp 1.796.944.701,00	Rp 1.339.515.717,00	74,54

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100%	Rp 746.610.000,00	Rp 744.579.514,00	99,73
12	Meningkatnya kualitas Terminal & Halte Sesuai Standar	Persentase terminal & halte yang sesuai standar	56,34	59,37	105,38%	Rp 713.075.250,00	Rp 506.357.266,00	71,01
13	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan danau	Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	51,67	53,89	104,30%	Rp 1.943.195.100,00	Rp 1.933.150.633,00	99,48
14	Terpenuhiya Prasarana jalan yang sesuai standar	Persentase Prasarana jalan yang sesuai standar	47	50	106,38%	Rp 445.733.500,00	Rp 241.573.673,00	54,20
15	Meningkatnya kualitas Dermaga Sungai dan Danau	Persentase Dermaga yang sesuai standar	45	48	106,67%	Rp 1.389.112.900,00	Rp 1.382.022.477,00	99,49

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Terpenuhinya Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	60	68,98	114,97%	Rp 1.223.338.626,00	Rp 1.163.900.937,00	95,14
17	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	0,37	0,42	113,51%	Rp 4.628.692.626,00	Rp 4.509.087.271,00	97,42
18	Meningkatnya penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada pusat kegiatan dan ruas jalan/ persimpangan	Persentase penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas	100	100	100%	Rp 3.382.407.000,00	Rp 3.325.746.674,00	98,32
19	Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan andalalin	Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin	72,5	75	103,45%	Rp 8.607.000,00	Rp 8.329.660,00	96,78

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Meningkatnya penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada pusat kegiatan dan ruas jalan/ persimpangan	Persentase penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas	100	100	100,00%	Rp 3.382.407.000,00	Rp 3.325.746.674,00	98,32
21	Meningkatnya Ketaatan dan keselamatan Berlalu Lintas	Persentase Ketaatan Pengguna Jalan	85,5	84	98,25%	Rp 14.340.000,00	Rp 11.110.000,00	77,48
22	Meningkatnya Trayek Angkutan Umum	Persentase Izin Trayek Angkutan Umum Yang Aktif	16,67	16,67	100%	Rp 4.439.199.860,00	Rp 2.109.203.133,00	47,51
23	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	46,89	53,89	114,93%	Rp 1.943.195.100,00	Rp 1.933.150.633,00	99,48
24	Meningkatnya kualitas Dermaga Sungai dan Danau	Persentase Dermaga yang sesuai standar	45	48	106,67%	Rp 1.389.112.900,00	Rp 1.382.022.477,00	99,49

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Meningkatnya layanan perizinan angkutan sungai dan danau	Persentase meningkatnya layanan perizinan angkutan sungai dan danau	9	7	77,78%	Rp 364.082.200,00	Rp 361.878.656,00	99,39
26	Tersedianya Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Sungai dan Danau	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Sungai dan Danau	100	100	100%	Rp 190.000.000,00	Rp 189.249.500,00	99,61
27	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan Barang	Persentase angkutan umum dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	70	73,33	104,76%	Rp 4.344.199.860,00	Rp 2.014.803.133,00	46,38
28	Tersedianya Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Orang dan Barang	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan	100	100	100,00%	Rp 95.000.000,00	Rp 94.400.000,00	99,37

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Meningkatnya Kelaikan Transportasi Perhubungan	Persentase Transportasi Perhubungan yang Laik Jalan	79	84	106,33%	Rp 1.500.312.322,00	Rp 1.449.291.729,00	96,60
30	Meningkatnya Kelaikan Uji Laik Jalan	Persentase Pemeriksaan Uji Laik Jalan yang lulus uji	100	100	100,00%	Rp 472.410.882,00	Rp 459.715.729,00	97,31
31	Meningkatnya Kualitas Sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase kualitas Sarana Prasarana dalam kondisi baik	100	100	100,00%	Rp 1.027.901.440,00	Rp 989.576.000,00	96,27
32	Meningkatnya Kawasan Parkir Tertib	Persentase Kawasan Parkir Tertib	100	100	100,00%	Rp 168.162.500,00	Rp 164.593.631,00	97,88
33	Meningkatnya kualitas Terminal & Halte Sesuai Standar	Persentase terminal & halte yang sesuai standar	56,34	59,37	105,38%	Rp 713.075.250,00	Rp 506.357.266,00	71,01
34	Terpenuhinya Prasarana Terminal sesuai standar	Persentase Prasarana terminal yang sesuai standar	70	68,75	98,21%	Rp 267.341.750,00	Rp 264.783.593,00	99,04

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	Meningkatnya Efektivitas pengawasan parkir	Persentase Pengawasan titik Parkir	100	100	100,00%	Rp 168.162.500,00	Rp 164.593.631,00	97,88



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari laporan yang telah disusun maka dapat disimpulkan bahwa kinerja bahwa capaian tujuan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar telah mencapai target, dengan capaian sangat tinggi sebesar 118. Adapun tujuan kinerja Dinas Perhubungan yaitu **“Meningkatnya kualitas layanan perhubungan”** dengan indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) (sektor perhubungan) dengan target 60 persen dan telah terealisasi 70,56 persen sehingga memperoleh predikat capaian sangat tinggi dengan nilai 118%.

Adapun untuk capaian sasaran dinas ialah sebagai berikut.

1. Terwujudnya kinerja perhubungan berkualitas
 - a. Rasio Konektivitas Kabupaten sebesar 92,98 persen.
 - b. Tingkat Keselamatan transportasi Daerah Kabupaten/Kota sebesar 99,96 persen.
2. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah mendapat capaian sebesar 99,47%.

Realisasi pelaksanaan anggaran yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar tahun 2025 adalah sebesar Rp 20.364.982.339,00 dengan anggaran sebesar Rp 24.264.619.959,00 dengan capaian sebesar 83,93%.

B. SARAN - SARAN

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Menetapkan arah kebijakan dan prioritas program perhubungan yang jelas, terukur, dan selaras dengan dokumen perencanaan daerah.
- 2) Memperkuat kepemimpinan dalam pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program serta kegiatan perhubungan.
- 3) Mendorong pengambilan keputusan berbasis data dan kondisi faktual lapangan, khususnya terkait lalu lintas, angkutan, dan keselamatan transportasi.





- 4) Mengoptimalkan koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi terkait dalam penyelenggaraan urusan perhubungan.
- 5) Memastikan peningkatan kualitas pelayanan publik dan keselamatan transportasi sebagai fokus utama kinerja organisasi.
- 6) Mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalisme seluruh jajaran melalui pembinaan dan pengembangan SDM.
- 7) Menjaga akuntabilitas kinerja dan pengelolaan sumber daya secara efektif, efisien, dan transparan.
- 8) Program kegiatan yang kurang atau belum sesuai dengan harapan dalam Renstra atau Renja perlu ditingkatkan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna yang lebih maksimal.
- 9) Untuk mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran hendaknya para pelaku di dalam struktur organisasi Dinas Perhubungan menyatukan visi dan misi serta saling menunjang satu dengan yang lainnya.

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar tahun 2025 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.





LAMPIRAN

1. Pohon kinerja dan cascading ([Link Google Drive](#))
2. PK tahun 2025 ([Link Google Drive](#))

